



**Pengendalian Inflasi yang Berbasis Finansial Teknologi (*Fintech*), Inklusi
Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial di D-8 Negara Berkembang.**

SKRIPSI

Oleh :

M. AJI PRATAMA

1615210054

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi variabel dari interaksi variabel (FINTECH) dan Inklusi Keuangan Serta Kebijakan Makroprudensial terhadap pengendalian tingkat Inflasi (Jumlah Pengguna ATM, Kredit, Saving, SB, GWM, CGDP dan CAR). Penelitian Ini menggunakan data sekunder atau time series dari tahun 2009 sampai dengan 2018. Model analisis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah *Confirmatory Factor Analysis* (CFA), Regresi *Ordinary Least Square* (OLS) dan Panel ALDR. Berdasarkan dari Penelitian terdapat hasil CFA yaitu : terdapat 7 faktor yang di teliti, dari hasil metode tersebut terdapat 2 variabel yang relevan mempengaruhi INF yaitu : CGDP dan GWM. Hasil model OLS terdapat 3 hasil sebagai berikut : 1. CGDP dan GWM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap INF, hasil tersebut dibuktikan dari hasil uji F dimana di peroleh F hitung lebih besar dari F tabel. 2. CGDP mempunya pengaruh negatif signifikan terhadap INF. 3. GWM mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap INF. Hasil model Panel ALDR terdapat 5 hasil sebagai berikut : 1. Secara panel Jumlah Pengguna ATM mampu menjadi *leading indicator* pada kelompok negara D-8 Negara Berkembang hanya negara (Indonesia, Iran, dan Malaysia) dalam menjelaskan Pengendalian Inflasi. 2. Secara panel Rasio Kredit Swasta Dari Deposito Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Terhadap GDP (CGDP) mampu menjadi *leading indicator* pada kelompok negara D-8 Negara Berkembang hanya pada negara Iran dan Malaysia dalam Pengendalian Inflasi. 3. Secara panel Giro Wajib Minimum (GWM) mampu menjadi *leading indicator* pada kelompok negara D-8 Negara Berkembang hanya negara (Indonesia dan Malaysia) dalam Pengendalian Inflasi. 4. Hanya negara Malaysia yang memiliki pengaruh Fintech, Inklusi Keuangan serta Makroprudensial yang lebih besar dalam menjelaskan inflasi. 5. Indonesia hanya memiliki pengaruh Fintech dan Makroprudensial yang lebih besar dalam menjelaskan inflasi.

Kata Kunci : Finansial Teknologi (Fintech), Inklusi Keuangan, Kebijakan Makroprudensial, Model Confirmatory Factor Analysis (CFA), Regresi Ordinary Least Square (OLS), Panel ALDR. Inflasi, Capital Adequacy ratio (CAR), Rasio Kredit Swasta dari Deposito Bank dan Lembaga Keuangan lain Terhadap GDP (CGDP), pengguna ATM, Saving, Credit, Suku Bunga, Giro Wajib Minimum(GWM).

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN UJIAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI UJIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
F. Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Landasan Teori	15
2.1. Teori Inflasi	15
2.2. Financial Technology	16
2.2.1. Jenis Layanan <i>Financial Technology (Fintech)</i>	17
2.2.2. Keunggulan dan Kelemahan <i>Fintech</i>	18
2.2.3. Tantangan <i>Financial Technology (Fintech)</i>	19
2.2.4. Resiko <i>Financial Technology (Fintech)</i>	19
2.3. Kebijakan Makroprudensial	20
2.4. Giro Wajib Minimum (GWM)	23
2.4.1. Jenis-jenis Giro Wajib Minimum.....	24
2.4.2. Fungsi Giro Wajib Minimum.....	26
2.5. Capital Adequacy Ratio (CAR).....	26
2.6. Suku Bunga	29
2.7. Inklusi Keuangan.....	31
2.7.1. Visi dan Misi Keuangan Inklusif	32
2.7.2. Manfaat dan Tujuan Keuangan Inklusif.....	32
2.8. <i>Saving (Tabungan)</i>	34
2.8.1. Ciri-ciri Tabungan	35
2.9. Kredit.....	36
2.9.1. Unsur-unsur Kredit.....	36
2.9.2. Fungsi dan Tujuan Kredit.....	37

2.9.3. Jenis-jenis Kredit.....	38
B. Penelitian Terdahulu.....	39
C. Kerangka Konseptual.....	54
1. Kerangka Berpikir.....	54
2. Kerangka <i>Confirmatory Factor Analysis</i> (CFA).....	54
3. Kerangka Regresi Berganda <i>Ordinary Least Square</i> (OLS).....	55
4. Kerangka Panel ARDL.....	55
D. Hipotesis.....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Pendekatan Penelitian.....	57
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	57
C. Definisi Operasional Variabel.....	58
D. Jenis Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	59
F. Metode Analisis Data.....	59
1. Metode <i>Confirmatory Factor Analysis</i> (CFA).....	59
2. Metode Regresi Berganda <i>Ordinary Least Square</i> (OLS).....	60
3. Regresi Panel ARDL.....	61
a. Kriteria Panel ARDL.....	62
1). Uji Stasioneritas.....	62
2). Uji <i>Cointegrasi Lag</i>	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Hasil Penelitian.....	68
1. Perkembangan Prekonomian di Indonesia.....	68
2. Perkembangan Variabel Penelitian.....	71
a. Pertumbuhan Tingkat Inflasi.....	72
b. Pertumbuhan Pengguna ATM.....	74
c. Pertumbuhan Saving.....	76
d. Pertumbuhan <i>Credit</i>	78
e. Pertumbuhan Suku Bunga.....	80
f. Pertumbuhan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).....	82
g. Pertumbuhan Rasio kredit swasta dari Deposito Bank dan Lembaga Keuangan lain terhadap GWP (CGDP).....	84
h. Pertumbuhan Giro Wajib Minimum (GWM).....	86
3. Hasil Interpretasi (Indonesia).....	87
A. Interpretasi Hasil CFA.....	88
1. Uji Asumsi Klasik.....	93
a. Uji Normalitas Data.....	93
b. Uji Multikorelitas.....	94
c. Uji Auto Korelasi.....	95
2. Interpretasi Hasil Analisis Data Regresi Linier Berganda.....	95
a. Uji-t (Uji Hipotesis Parsial).....	97

b. Uji-f (Uji Hipotesis Simultan).....	98
c. Uji-D (Uji Determinasi)	100
3. Interpretasi Panel ALDR.....	101
a. Hasil Uji Panel Negara Indonesia	102
b. Hasil Uji Panel Negara Iran	103
c. Hasil Uji Panel Negara Malaysia	104
d. Hasil Uji Panel Bangladesh.....	105
e. Hasil Uji Panel Negara Nigeria.....	106
B. Pembahasan	107
1. CFA, Regresi Berganda OLS (<i>Ordinary Least Square</i>) dan Panel ALDR.....	107
a. Pembahasan Metode <i>Confirmatory Factor Analysis</i> (CFA).....	107
b. Pembahasan Metode Regresi Berganda OLS (<i>Ordinary Least Square</i>)	109
1). Pengaruh CGDP terhadap INF	109
2). Pengaruh GWM terhadap INF	109
c. Pembahasan Metode Panel ALDR.....	110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	112
A. Kesimpulan.....	112
1. Hasil <i>Confirmatory Factor Analysis</i> (CFA).....	112
2. Hasil Regresi Berganda <i>Ordinary Least Square</i> (OLS).....	112
3. Hasil Panel ALDR.....	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Daftar Negara 8 Developong Countries (D-8 Negara Berkembang)	7
Tabel 1.2. Data Pertumbuhan Inflasi Di D-8 Negara Berkembang.....	8
Tabel 1.3. Data Pengguna Internet Di D-8 Negara Berkembang.....	10
Tabel 1.4. Keaslian Penelitian.....	14
Tabel 2.3 Instrumen Kebijakan Makroprudensial.....	22
Tabel 2.5.1. Klasifikasi tingkat Capital Adequacy Ratio Menurut BI	27
Tabel 2.1G. Penelitian Terdahulu	39
Tabel 2.1. Skedul Proses Penelitian	57
Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel.....	58
Tabel 4.1. Pertumbuhan Tingkat Inflasi pada negara D-8 Negara berkembang tahun 2009-2018	72
Tabel 4.2. Pertumbuhan pengguna ATM pada negara D-8 Negara berkembang tahun 2009-2018	74
Tabel 4.3. Pertumbuhan <i>Saving</i> pada negara D-8 Negara berkembang tahun 2009- 2018	76
Tabel 4.4. Pertumbuhan <i>Credit</i> pada negara D-8 Negara berkembang tahun 2009- 2018	78
Tabel 4.5. Pertumbuhan Suku Bunga pada negara D-8 Negara berkembang tahun 2009-2018	80
Tabel 4.6. Pertumbuhan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) pada negara D-8 Negara berkembang tahun 2009-2018	82
Tabel 4.7. Pertumbuhan Kredit Swasta dari Deposito Bank dan Lembaga Keuangan lain terhadap GDP (CGDP) pada negara D-8 Negara berkembang tahun 2009-2018	84
Tabel 4.8. Pertumbuhan Giro Wajib Minimum (GWM) pada negara D-8 Negara berkembang tahun 2009-2018	86
Tabel 4.9. <i>KMO and Bartlett's Test</i>	87
Tabel 4.10. <i>Communalities</i>	88
Tabel 4.11. <i>Total Variance Explained</i>	89
Tabel 4.12. <i>Component Matrix</i>	90
Tabel 4.13. <i>Rotated Component Matrix</i>	91
Tabel 4.14. <i>Component Transformation Matrix</i>	92
Tabel 4.15. Uji Multikorelitas	94
Tabel 4.16. Uji auto korelasi	95
Tabel 4.17. Output Regresi Linier Berganda	96
Tabel 4.18. Uji-t	98
Tabel 4.19. Uji-f.....	99
Tabel 4.20. Uji-D	100

Tabel 4.21. Output Panel ALDR.....	101
Tabel 4.22. Output Panel Indonesia.....	102
Tabel 4.23. Output Panel Iran.....	103
Tabel 4.24. Output Panel Malaysia.....	104
Tabel 4.25. Output Panel Bangladesh.....	105
Tabel 4.26. Output Panel Nigeria.....	106
Tabel 4.27. Rangkuman Panel ALDR.....	108

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Grafik Pertumbuhan inflasi D-8 Negara Berkembang	8
Gambar 1.2. Grafik Pertumbuhan Jumlah Pengguna Internet D-8 Negara Berkembang	11
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	54
Gambar 2.1. Kerangka Metode <i>Confirmatory Factor Analysis</i> (CFA)	54
Gambar 2.2. Kerangka Metode Regresi Berganda (OLS)	55
Gambar 2.3. Kerangka Panel ARDL.....	55
Gambar 4.1. Grafik Pertumbuhan tingkat Inflasi di negara D-8 Negara Berkembang	72
Gambar 4.2. Grafik Pertumbuhan pengguna ATM di negara D-8 Negara Berkembang	75
Gambar 4.3. Grafik Pertumbuhan <i>Saving</i> di negara D-8 Negara Berkembang	76
Gambar 4.4. Grafik Pertumbuhan <i>Credit</i> di negara D-8 Negara Berkembang	78
Gambar 4.5. Grafik Pertumbuhan Suku Bunga di negara D-8 Negara Berkembang	80
Gambar 4.6. Grafik Pertumbuhan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) di negara D-8 Negara Berkembang.....	82
Gambar 4.7. Grafik Pertumbuhan Rasio Kredit swasta dari Deposito Bank dan Lembaga Keuangan lain terhadap GDP (CGDP) di negara D-8 Negara Berkembang.....	84
Gambar 4.8. Grafik Pertumbuhan Giro Wajib Minimum (GWM) di Negara D-8 Negara Berkembang.....	86
Gambar 4.9. Grafik <i>Scree Plot</i>	90
Gambar 4.10. Uji Normalitas Data.....	93
Gambar 4.11. Uji Normalitas <i>JB Test</i>	93
Gambar 4.12. Stabilitas Jangka waktu Pengendalian Inflasi di negara D-8 Negara Berkembang	111

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana I pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam mempersiapkan tugas akhir ini, penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda serta Adinda yang telah memberikan dorongan, nasehat, kasih sayang, doa, dan dukungan material dan spiritual.
2. Bapak H. Muhammad Isa Indrawan,SE.,MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Surya Nita,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Bakhtiar Efendi,S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
5. Ibu Lia Nazliana Nasution,SE.,M.Si dan bapak Bakhtiar Efendi,SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga laporan magang ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan dari awal kuliah hingga sekarang ini.
7. Kepada Sahabat-Sahabat saya dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis lampirkan satu per satu.

8. Serta teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat serta dapat bekerja sama dengan Penulis.

Akhirnya penulis mengharapkan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan juga para pembaca. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin

Medan, Juni 2020

Penulis,

M. Aji Pratama

1615210054

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2008 adalah momok menakutkan bagi negara-negara berkembang seperti negara Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang masih sangat bergantung kepada investasi asing, dengan adanya krisis global yang terjadi, secara otomatis investor asing langsung menarik dana dari Indonesia yang mengakibatkan anjlok atau turunnya nilai mata uang rupiah. Guncangan krisis yang terjadi pada perekonomian global mempengaruhi perekonomian dalam negeri, untuk mengurangi dampak tersebut dibutuhkan kebijakan yang efektif dan efisien baik kebijakan moneter maupun fiskal dengan diikuti kebijakan ekonomi lainnya.

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam kegiatannya perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya kesempatan lapangan kerja. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi aspek yang semakin penting, bahkan menjadi prioritas utama di Indonesia, terutama bagi bank sentral di berbagai negara. Saat ini Bank Indonesia (BI) mulai fokus pada kebijakan makroprudensial

sebagai salah satu bagian dari pilar stabilitas sistem keuangan pasca pengalihan sebagian tugasnya kepada OJK(Nuryana, 2017).

Kebijakan moneter di Indonesia fokus pada inflasi dan nilai tukar, sekalipun demikian aspek pertumbuhan tetap menjadi perhatian. Dengan ekonomi yang terbuka kebijakan moneter juga berimplikasi pada nilai tukar (exchange rate). Karena itu kebijakan menaikkan atau menurunkan BI rate berimplikasi tidak saja pada inflasi, tetapi juga pada pertumbuhan, dan nilai tukar(Juoro, 2013). Inflasi adalah fenomena yang dialami sebagian besar ekonomi modern, terutama negara-negara berkembang dan berbagai teori yang menjelaskan fenomena ini dalam berbagai kebijakan ekonomi untuk menghilangkannya. Inflasi adalah kasus ketidakseimbangan ekonomi yang disebabkan oleh inflasi yang kuat yang bekerja pada kenaikan yang terus-menerus pada tingkat harga umum, selama hal itu berpengaruh kuat pada jalannya kegiatan ekonomi(Mohamed, 2016).

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum, atau inflasi dapat juga dikatakan sebagai penurunan daya beli uang. Makin tinggi kenaikan harga makin turun nilai uang (Faoriko, 2013). Sejak tahun 1990 penggunaan inflasi sebagai jangkar nominal yang digunakan sebagai target utama kebijakan moneter mulai menjadi pilihan bagi bank sentral di beberapa negara (Bernanke Mishkindalam(Setiawan, 2012). Inflasi yang menjadi dilema bagi Negara-negara berkembang dan terus memberikan hambatan pada pertumbuhan ekonomi di kawasan regional, nasional, maupun Internasional, Inflasi yang sering terjadi di Negara-negara berkembang seperti di Indonesia yang berdominan sebagai negara agraris. Guncangan yang terjadi dalam ekonomi berdampak pada kenaikan harga-harga di pasar domestik secara terus menerus yang dapat menyebabkan terjadinya

inflasi. Secara umum, terjadinya inflasi akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang, serta berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang akibatnya akan melemahnya suatu perekonomian.

Fokus penerapan kebijakan moneter di Indonesia sesuai dengan UU no. 23 tahun 1999 yang kemudian telah diubah dalam UU No. 3 tahun 2004 mengenai kebijakan moneter, bahwa Bank Indonesia diberikan amanah sebagai otoritas moneter ganda yang menjalankan kebijakan moneter konvensional maupun syariah, maka kebijakan moneter yang di tempuh menggunakan *dual monetary policy* yakni konvensional dan syariah yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai atau memelihara kestabilan rupiah dan harga (inflasi) dan nilai tukar rupiah. Sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia. Inflasi merupakan masalah yang sangat besar dalam perekonomian setiap negara dan merupakan suatu fenomena moneter yang selalu meresahkan negara karena kebijakan yang diambil untuk mengatasi inflasi sering menjadi belati bermata dua yang akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Diantaranya keseimbangan eksternal dan tingkat bunga, terjadinya guncangan dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik yang berakhir dengan peningkatan inflasi pada perekonomian (Daniel, 2018).

Pada tahun 2012 inflasi berada pada angka 4.3% lalu pada tahun 2013-2015 mengalami fluktuasi yang cukup tinggi sebesar 6.4% di tiga tahun tersebut. Angka inflasi tersebut kurang baik karena hampir mencapai angka 10% dan pada tahun 2015 nilai tukar naik sebesar Rp. 13.500/dollar AS dalam hal ini diketahui pencapaian inflasi yang kurang memuaskan. Pada tahun 2016-2018 inflasi mengalami penurunan, pada tahun 2016 inflasi turun 3.02% dari 3.35% di tahun

sebelumnya dengan target inflasi $4\pm 1\%$, pada tahun 2017 inflasi naik 3.61% dari 3.02% di tahun sebelumnya dengan target inflasi $4\pm 1\%$, lalu pada tahun 2018 inflasi turun sebesar 3.13% dari 3.61% di tahun sebelumnya dengan target inflasi $3,5\pm 1\%$ yang artinya dalam 3 tahun terakhir Bank Indonesia berhasil dalam pencapaian target inflasi dan menjaga tingkat kestabilan inflasi (B.I, 2012)

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia biasanya akan memainkan dan mengatur jumlah uang beredar untuk menstabilkan ekonomi moneter negara. Jumlah uang beredar yang stabil akan menekan tingginya angka inflasi. Uang yang beredar dalam suatu Negara amat penting. Dalam artian luas, uang beredar adalah uang yang di dalamnya termasuk aset keuangan yang memenuhi fungsinya sebagai uang dengan tingkat liquiditas yang berbeda satu sama lain (Fauziah, 2015)

Bank Indonesia sebagai bank sentral menjalankan kebijakan moneter, mereka melakukan pengaturan atau penyesuaian dalam ekonomi yang bekerja di pasar barang maupun pasar aset. Perubahan instrument moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan yang berujung pada tujuan akhir yaitu inflasi. Penerapan kebijakan moneter di pengaruhi oleh pembelanjaan output dan penyerapan sumber daya (*employment*) dalam jangka pendek, yang berujung pada perubahan harga dalam jangka menengah dan jangka panjang. Pengaruhnya kebijakan moneter yang di lakukan oleh BI dalam mempengaruhi harga-harga aset dan sebelum akhirnya menentukan tingkat inflasi.

Rancangan rencana strategis dalam pengendalian inflasi yang telah dirancang oleh bank Indonesia ini lebih populer disebut dengan *Inflation Targetting Framework* (ITF). *Inflation Targetting Framework* (ITF) adalah suatu kerangka kerja kebijakan moneter yang mempunyai ciri-ciri utama adanya pernyataan resmi dari bank sentral dan dikuatkan dengan undang-undang bahwa tujuan akhir dari kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah, dan mengumumkan target inflasi kepada publik (Rusiadi & Novalina, 2015). Salah satu taktor utama dalam terjadinya inflasi antara lain jumlah uang beredar (JUB). Anggapan bagi kaum monetaris peredaran jumlah uang beredar yang terlalu banyak di pasar adalah penyebab salah satu faktor utama dalam terjadinya inflasi di suatu negara. Apa lagi terlalu sedikit atau kecilnya peredaran uang kartal dari pada uang giral yang ada, maka dari itu sulitnya proses pengendalian Jumlah Uang Beredar maka makin meluasnya monetaris dalam kegiatan perekonomian. Alasan dari sebuah negara menggunakan kerangka kerja IT (*inflation targeting*) adalah: pertama, inflasi merupakan satu-satunya variable ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter dalam jangka panjang. Kedua, keyakinan bahwa inflasi yang rendah dan stabil dalam jangka panjang sangat penting untuk pencapaian sasaran makroekonomi lainnya, termasuk dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonomi (Satria, 2012).

Empat prinsip pokok rezim kebijakan moneter dengan ITF, yaitu:

1. Memiliki sasaran utama, yaitu sasaran inflasi, yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian (*overriding objective*) dan acuan (*nominal anchor*) kebijakan moneter.

2. Bersifat antisipatif (*preemptive atau forward looking*) dengan mengarahkan respon kebijakan moneter saat ini untuk pencapaian sasaran inflasi ke depan.
3. Mendasarkan pada analisis, prakiraan, dan kaidah kebijakan tertentu dalam menetapkan pertimbangan respon kebijakan moneter (*constrained discretion*).
Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat (*good governance*), yaitu berkejelasan tujuan, konsisten, transparan, dan berakuntabilitas

Disatu sisi diyakini oleh para ahli ekonomi makro bahwa inflasi yang rendah dan stabil akan mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Disisi lain berdasarkan teori pembangunan ekonomi inflasi adalah akibat adanya masalah dalam pembangunan ekonomi yang menyebabkan output tidak mampu meresponkenaikan *effective demand*. Indonesia saat ini merupakan salah satu negara berkembang yang menerapkan *inflation targeting* sebagai kerangka kebijakan moneter. Disisi lain Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki permasalahan *supply side*. Sebagai konsekuensinya upaya pencapaian target inflasi dalam penerapan kerangka kerja *Inflation Targeting* di Indonesia dapat menjadi tidak efektif karena adanya fenomena *structural inflation* dalam perekonomian. Kondisi ini menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut khususnya untuk kasus Indonesia (Satria, 2012). Pelaksanaan ITF tersebut dilakukan dengan tetap mengupayakan keseimbangan yang optimal antara mempertahankan kestabilan harga, menjaga ketenangan pasar keuangan, mengawal integritas sistem, dan menggairahkan sektor riil (Budiyanti, 2014).

Pada negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki kekayaan yang melimpah dan dengan hasil bumi yang melimpah ruah, Namun hal ini bukan terbilang bagus untuk system ekonomi yang ada di karenakan ketidak stabilan

yang ekonomi yang ada Indonesia rentan mengalami krisis yang yang di sebabkan krisis global maupun krisis di negara itu sendiri. Ketidak stabilan itu dilihat dari tingginya pengangguran, tidak stabilan harga di karenakan kenaikan harga barang yang ditinggi sehingga tergambarkan melalui tingkat inflasi.

Dalam penelitian kali ini penulis akan membahas tentang wilayah D-8 Developing Countries yang artinya D-8 Negara Berkembang, yang di mana terdapat 8 negara yang terdaftar dalam wilayah 8 Developing Countries yang di mana sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Negara 8 Developing Countries (D-8 Negara Berkembang)

NAMA NEGARA D-8	
TURKI	MALAYSIA
BANGLADESH	INDONESIA
MESIR	RIAN
NIGERIA	PAKISTAN

Sumber : <http://developing8.org/>

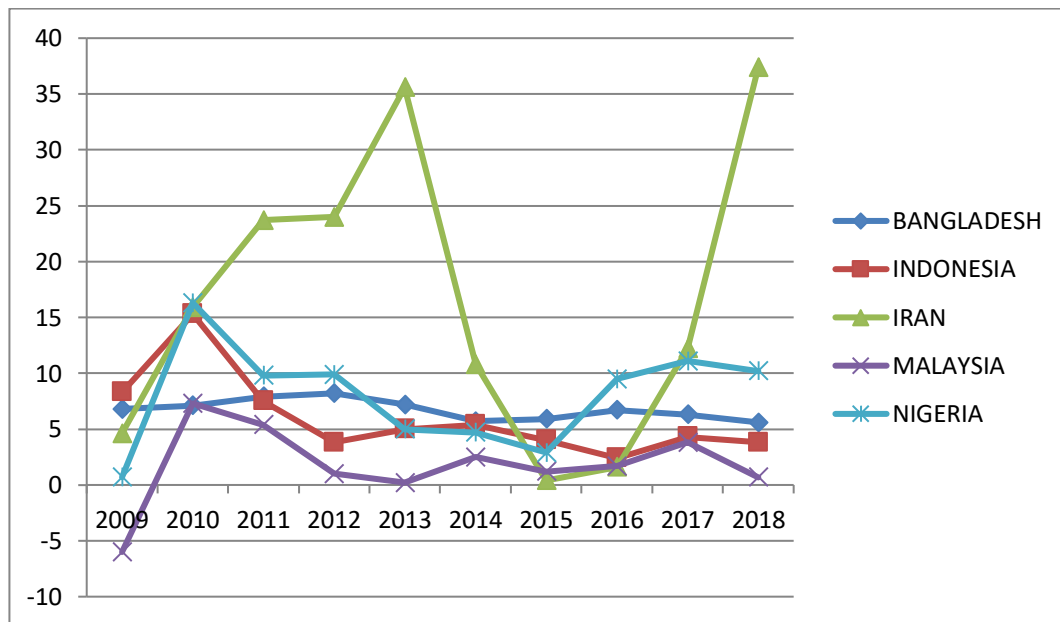
Dalam peneltiain ini penulis membahas wilayah negara D-8 (Developing Countries) karena ada beberapa artikel yang penulis baca tentang wilayah D-8, oleh karena itu penulis mengambil kelompok negara ini untuk penulis teliti sebagai lokasi penelitian, dari 8 negara yang ada penulis hanya mengambil 5 negara, dikarenakan untuk memperkecil ruang lingkup dan keterbatasan data yang digunakan. 5 negara yang penulis pakai adalah Indonesia, Iran, Malaysia, Bangladesh, Nigeria.

Fenomena masalah dalam penelitian ini yaitu dengan melihat respon variabel-variabel makro ekonomi terhadap kemampuan transmisi kebijakan moneter dalam mengendalikan perekonomian negara di D-8 negara berkembang, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Infasi D-8 Negara Berkembang (%) tahun 2008-2018

Tahun	Bangladesh	Iran, Islamic Rep.	Nigeria	Malaysia	Indonesia
2008	7.9	19.4	7.9	10.4	18.1
2009	6.8	4.6	0.7	-6.0	8.3
2010	7.1	15.9	26.8	7.3	15.3
2011	7.9	23.7	9.8	5.4	7.5
2012	8.2	24.0	9.9	1.0	3.8
2013	7.2	35.6	5.0	0.2	5.0
2014	5.7	10.8	4.7	2.5	5.4
2015	5.9	0.4	2.9	-0.4	4.0
2016	6.7	1.6	9.5	2.0	2.4
2017	6.3	12.2	11.1	3.8	4.3
2018	5.6	37.4	10.2	0.9	3.8

Sumber : World bank



Sumber : Tabel 1.1

Gambar 1.1 : Perkembangan Inflasi (%) D-8 Negara berkembang Tahun 2008 s/d 2018.

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa kenaikan tingkat inflasi pada tahun 2017 di negara Bangladesh dimana penurunan tingkat inflasi sebesar 6,3% dari 6,7% di tahun sebelumnya, negara Iran mengalami kenaikan tingkat inflasi yang cukup tinggi sebesar 12,2% dari 1,6% di tahun sebelumnya, di susul negara Nigeria sebesar 11,1% dari 9,5% di tahun sebelumnya, hal yang sama dialami oleh naiknya tingkat inflasi di negara Malaysia 3,8% dari 2%, dan negara tetangga Malaysia mengalami hal yang sama yaitu Indonesia kenaikan terjadi sebesar 4,3% dari 2,4% di tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak krisis ekonomi yang kerap terjadi di negara Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.

Harga yang membumbung tinggi tergambar dalam inflasi yang tinggi. Sementara itu, harga yang relatif stabil tergambar dalam angka inflasi yang rendah. Tingkat inflasi adalah kenaikan persentase tahunan dalam tingkat harga umum yang diukur berdasarkan indeks harga konsumen atau indeks harga lainnya. Dengan adanya inflasi menyebabkan harga barang-barang mengalami peningkatan, sehingga daya beli masyarakat akan menurun. Hal ini akan menurunkan minat investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Jika minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan turun, maka terjadi penurunan terhadap harga-harga saham perusahaan. Hal ini secara otomatis akan menyebabkan harga saham menurun (Arif, 2014)

Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan akan kecenderungan naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama periode waktu tertentu. Naiknya tingkat harga ini daya beli dari masyarakat akan menurun akibatnya barang-barang hasil produksi tidak akan habis terjual dan produsen pun tidak akan menambah besaran investasinya.

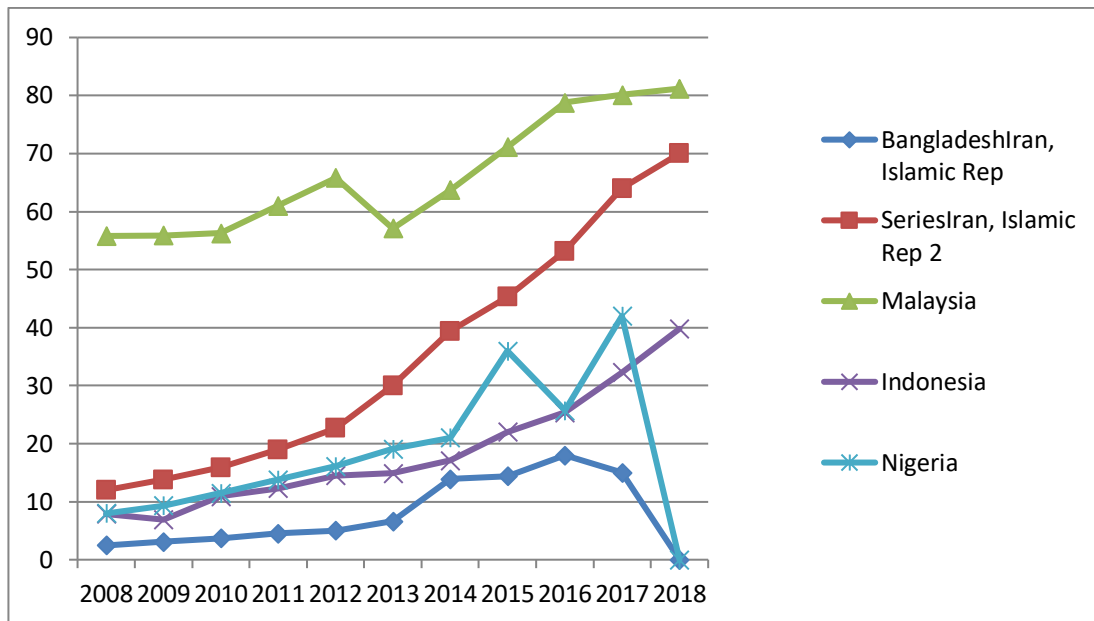
Akibatnya kenaikan permintaan total dan biaya produksi, hal ini akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa atau biasa disebut dengan inflasi (Novianty, 2017)

Tingkat inflasi yang rendah dan stabil akan menjadi stimulator bagi pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi yang terkendali akan menambah keuntungan pengusaha, pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi di masa datang dan pada akhirnya akan mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak negatif pada perekonomian yang selanjutnya dapat mengganggu kestabilan sosial dan politik. Dampak negatif pada perekonomian diantaranya mengurangi keagairahan penanam modal, tidak terjadinya pertumbuhan ekonomi, memperburuk distribusi pendapatan dan mengurangi daya beli masyarakat. Oleh karena itu perlu diupayakan jangan sampai penyakit ekonomi itu menjadi penghambat jalannya roda pembangunan (Sutawijaya & Zulfahmi, 2012)

Tabel 1.3 Pengguna Internet (%) D-8 Negara Berkembang Tahun 2008-2018

tahun	Bangladesh	Iran, Islamic Rep,	Malaysia	Indonesia	Nigeria
2008	2,5	12	55,8	7,9	8
2009	3,1	13,8	55,9	6,9	9,3
2010	3,7	15,9	56,3	10,9	11,5
2011	4,5	19	61	12,3	13,8
2012	5	22,7	65,8	14,5	16,1
2013	6,6	30	57,1	14,9	19,1
2014	13,9	39,4	63,7	17,1	21
2015	14,4	45,3	71,1	22	36
2016	18	53,2	78,8	25,4	25,7
2017	15	64	80,1	32,3	42
2018	„	70	81,2	39,8	„

Sumber : World Bank



Sumber : table 1.2

Gambar 1.2 : Perkembangan pengguna Internet D-8 Negara Berkembang tahun 2008 s/d 2018

Pada tahun 2017 negara Bangladesh mengalami penurunan pengguna internet 15% dari 18% di tahun sebelumnya, di susul oleh Iran yang pengguna internet di negara tersebut meningkat 64% dari 53,2% di tahun sebelumnya, pengguna internet di Malaysia naik 80,1% dari 78,8% di tahun sebelumnya, Indonesia mengalami peningkatan dengan pengguna internet sebesar 32,3% dari 25,7% di tahun sebelumnya, di susul oleh Nigeria sebesar 42% dari 25,7 di tahun sebelumnya.

Berdasarkan fenomena masalah diatas, maka perlu untuk diteliti bagaimana transmisi kebijakan moneter mampu menjaga stabilitas system keuangan, sehingga penulis mencoba melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengendalian Inflasi yang Berbasis Finansial Teknologi (Fintech), Inklusi Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial di D-8 Negara Berkembang.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas serta untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terjadi kenaikan inflasi di negara *D-8* tahun 2017, yang merupakan dampak dari kenaikan harga komoditi di pasar Internasional, dan di negara Indonesia inflasi di akibatkan oleh pencabutan subsidi listrik, bagi mereka yang tidak berhak mendapat subsidi.
2. Terjadi penurunan pengguna internet di beberapa negara *D-8* terutama di Indonesia tahun 2016, angka tersebut jauh lebih rendah ketimbang negara tetangga Malaysia di picu pertumbuhan pengguna internet negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian penulis membatasi masalah hanya pada Pengendalian Inflasi yang Berbasis Finansial Teknologi (*FINTECH*) (jumlah pengguna ATM), dan Inklusi Keuangan (*CGDP*, *SAVING*, *CREDIT*) serta Kebijakan Makroprudensial (*GWM*, *CAR*, Suku Bunga) di *D-8* Negara Berkembang. di 5 negara *D-8* yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria.

D. Rumusan Masalah

Adapun masalah dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah(ATM, SAVING, SB, CREDIT, CGDP, CAR,dan GWM) relevan dalam mempengaruhi INF di Indonesia ?
2. Apakah variabel yang relevan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap INF di Indonesia?
3. Negara manakah yang pengaruh pengendalian inflasi terbesar yang berbasis Finansial Teknologi dan Inklusi Keuangan serta Kebijakan Makroprudensial di D-8 Negara Berkembang ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis (ATM, SAVING, SB, CREDIT, CGDP, CAR,dan GWM) relevan dalam mempengaruhi INF di Indonesia.
2. Menganalisisvariabel yang relevan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap INF di Indonesia.
3. Menganalisis Negara yang mempunyai pengaruh pengendalian inflasi terbesar yang berbasis Finansial Teknologi dan Inklusi Keuangan serta Kebijakan Makroprudensial di D-8 Negara Berkembang.

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Sasaran akhir kebijakan moneter yang berbasis finansial teknolgi yang di dukung kebijakan makroprudensial dalam meningkatkan akselerasi ekonomi dan menajaga inflasi negara *D-8 negara Berkembang*

2. Menjadi jurnal yang merekomendasi bagi instansi terkait (BI, World Bank) menentukan Sasaran akhir kebijakannya moneter sehingga transmisi kebijakan moneter dalam menstabilkan keuangan efektif dalam pengendalian ekonomi.
3. Sebagai bahan refensi untuk melakukan penelitian lebih jauh terutama yang berkaitan dengan kemampuansasaran akhir kebijakan moneter yang berbasis finansial teknologi dan inklusi keuangan serta dukungan makroprudensial terhadap Akselerasi Ekonomi.

F. Keaslian penelitian

No	Nama	Variabel	Metode	Lokasi	Tahun
1	Eric Matheus Tena Yoel	ATMR, CAR, GWM	Path analysis	Indonesia	2016
2	Fitri Rusdianasari	NPL, kredit UMKM, ATM, Layanan, e-money, GDP per kapitan, Investasi langsung	Error Correction Model (ECM)	Indonesia	2016
3	M Aji Pratama	INF , Suku bunga, JUB, CAR, GWM, CGDP, Credit,Saving, Jumlah pengguna ATM	CFA, Regresi Berganda, Panel ALDR	Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria.	2019

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

2.1. Inflasi.

Pada awalnya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar yang diduga telah menyebabkan adanya kenaikan harga-harga¹. Dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum, artinya inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan (atau dikonsumsi) dalam suatu perekonomian. Kata kunci kedua adalah terus menerus, kenaikan harga yang terjadi karena faktor musiman, misalnya, menjelang hari-hari besar atau kenaikan harga sekali saja dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan juga tidak dapat disebut inflasi karena kenaikan harga tersebut bukan masalah kronis ekonomi.

Laju inflasi dinyatakan dalam angka persentase (%). Laju inflasi dapat terjadi pada tingkat yang ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah 10%; inflasi sedang antara 10 - 30%; dan inflasi berat antara 30 -100% per tahun; dan hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Ekonom Keynesian menyatakan bahwa teori kuantitas tidak valid karena teori tersebut mengasumsikan ekonomi dalam kondisi full employment (kapasitas

ekonomi penuh). Dalam kondisi kapasitas ekonomi yang belum penuh, maka ekspansi (pertambahan) uang beredar justru akan menambah output (meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja) dan tidak akan meningkatkan harga. Pendekatan Keynes juga menyatakan bahwa teori kuantitas yang mengasumsikan elastisitas dan perputaran uang (*velocity of circulation*) adalah tetap juga tidak benar. Elastisitas dan perputaran uang sangat sulit diprediksi dan banyak dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat serta perubahan barang-barang yang merupakan substitusi uang (*financial assets*). Hal tersebut terbukti bahwa dalam suatu perekonomian yang sektor keuangannya telah maju dan terdapat instrumen-instrumen keuangan yang berfungsi sebagai substitusi uang, maka perputaran uang akan menjadi semakin sulit diprediksi. (Suseno & Astiyah, 2009)

2.2. *Financial Technology.*

Financial Technology (Fintech) memiliki arti dan pengertian yang luas. Sebuah lembaga riset NDRC (*The National Digital Research Centre*) menyebutkan bahwa *Fintech* adalah sebuah istilah untuk inovasi dalam jasa finansial, dimana teknologi adalah kuncinya. Sementara menurut mantan Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo dalam sambutan kuncinya (*keynote speech*) di acara *Indonesia Fintech Festival and Conference 2016*, di Jakarta mengatakan bahwa *Fintech* merupakan layanan keuangan yang berbasis teknologi informasi seperti *big data*, *cloud computing*, dan *distributed ledger system* (Ansori, 2019). Sedangkan menurut Hsueh (2017) dalam (Ansori, 2019),

Teknologi Keuangan juga disebut sebagai *Fintech*, merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi.

2.2.1. Jenis Layanan *Financial Technology (Fintech)*

Menurut Hsueh (2017) dalam (Ansori, 2019), Terdapat tiga tipe financial technology adalah sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*) , Contoh - contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu crossborderEC, online-to-offline (O2O), sistem pembayaran *mobile*, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.
2. *Peer-to-Peer Lending* merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer-to-Peer Lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. Menurut Hsueh, (2017) dalam (Ansori, 2019), *Peer-to-Peer Lending* merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. *Peer-to-Peer Lending* memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional. Dari beberapa pengertian tentang *Peer-to-Peer Lending* maka dapat diambil kesimpulan bahwa

Peer-to-Peer Lending merupakan model bisnis keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui sebuah platform dimana model ini lebih menguntungkan dibanding platform keuangan tradisional.

3. *Crowdfunding* merupakan tipe *Fintech* di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

2.2.2. Keunggulan dan Kelemahan Fintech

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) dalam (Ansori, 2019), kelebihan dari Fintech adalah:

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Sedangkan kekurangan dari *Fintech* adalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
2. Ada sebagian perusahaan *Fintech* belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

2.2.3. Tantangan *Financial Technology (Fintech)*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) dalam (Ansori, 2019) , tantangan yang dihadapi industri *Fintech* adalah sebagai berikut :

1. Peraturan dalam Mendukung Pengembangan *Fintech*. Hal ini terkait dengan bagaimana mengadopsi peraturan terkait tanda tangan (*digital signature*) dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri *Fintech*.
2. Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian Terkait untuk mengoptimalkan potensi *Fintech* dengan lingkungan bisnis (*business environment*) yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

2.2.4. Resiko *Financial Technology (Fintech)*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) dalam (Ansori, 2019), Resiko yang dialami oleh pengguna *Fintech*. Strategi untuk melindungi konsumen adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan dana pengguna. Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun *force majeure* dari kegiatan *Fintech*.
2. Pelindungan data pengguna. Isu privasi pengguna *Fintech* yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan *hacker* atau *malware*). Strategi untuk melindungi kepentingan nasional adalah sebagai berikut :

1. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh *Fintech* menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme.
2. Stabilitas Sistem Keuangan. Perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

2.3. Kebijakan Makroprudensial.

Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan untuk menjaga ketahanan sektor keuangan secara keseluruhan agar mampu untuk mengatasi risiko sistemik akibat gagalnya lembaga atau pasar keuangan yang berdampak menimbulkan krisis yang merugikan perekonomian (Bank Indonesia, 2012) dalam (Yoel, 2016).

Borio (2003) dalam (Yoel, 2016) menjelaskan bahwa kebijakan makroprudensial memiliki tujuan antara dan tujuan akhir. Tujuan antara kebijakan makroprudensial adalah pemantauan dan penilaian terhadap sistem

keuangan secara keseluruhan dan tujuan akhir kebijakan makroprudensial adalah menekan biaya krisis.

Kebijakan makroprudensial adalah instrumen regulasi prudensial yang ditujukan untuk mendorong stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan kesehatan lembaga keuangan secara individu. Kebijakan makroprudensial digunakan untuk mencegah terjadinya siklus penawaran kredit yang berlebihan dan likuiditas yang dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian. Dengan peran menjaga stabilitas suplai intermediasi keuangan ini, kebijakan makroprudensial mempunyai peran yang menunjang tujuan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga dan output (Siravati, 2017).

Tujuan dari kebijakan makroprudensial yang bersifat *countercyclical* tersebut akan bersinergi dengan tujuan kebijakan moneter dalam mengurangi fluktuasi perekonomian. Kebijakan makroprudensial untuk memperketat persyaratan modal 25 dan likuiditas di saat perekonomian sedang melaju kencang akan mendorong bank untuk mengurangi pertumbuhan kredit sehingga menjaga daya tahan bank ke depan di saat perekonomian memburuk. Dalam kondisi demikian, upaya menjaga daya tahan sistem perbankan akan secara simultan mendukung tujuan kebijakan moneter untuk menstabilkan suplai kredit (Siravati, 2017).

Penggunaan instrumen makroprudensial sebenarnya bukan hal yang baru, hanya saja instrumen tersebut lebih banyak diterapkan pasca krisis global tahun 2008. Negara-negara *emerging market* menggunakan instrumen makroprudensial lebih luas dibandingkan negara-negara maju. Beberapa negara

menggunakan instrumen yang bervariasi. Penggunaan instrumen tersebut tergantung pada tingkat perkembangan ekonomi dan keuangan, rezim nilai tukar, dan daya tahan (kerentanan) terhadap guncangan (*shocks*). Instrumen yang digunakan untuk kebijakan makroprudensial sebenarnya mengadopsi instrumen mikroprudensial yang ada pada saat ini, seperti standar kehati-hatian (misalnya kewajiban untuk memelihara modal yang cukup tinggi dan penyangga likuiditas) dan mengurangi kegiatan atau aktivitas yang dapat meningkatkan risiko (Siravati, 2017)

Tabel 2.3 Instrumen Kebijakan Makroprudensial

Masalah	Instrumen	Target
Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Caps on the loan to value (LTV) ratio</i> 2. <i>Caps on the deb to income (DTI) ratio</i> 3. <i>Caps on foreign currency lending</i> 4. <i>Ceilings on credit or credit growth</i> 	<i>Prosiklikalitas</i> <i>Prosiklikalitas</i> <i>Prosiklikalitas</i> <i>Prosiklikalitas</i>
Likuiditas	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Limits on net open currency positions/ currency mismatch (NOP)</i> 2. <i>Limits on maturity mismatch</i> 3. <i>Reserve requirements</i> 	<i>Common exposure</i> <i>Common exposure</i> <i>Prosiklikalita</i>
Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Countercyclical/ time varning capital requirements</i> 2. <i>Time varying/ dynamic provisioning</i> 3. <i>Restrictions on profit distribution</i> 	<i>Prosiklikalitas</i> <i>Prosiklikalitas</i> <i>Prosiklikalitas</i>

Sumber: *IMF Financial Stability and Macroprudential Policy Survey*, 2010 dalam (Siravati, 2017)

Instrumen-instrumen tersebut sering kali digunakan secara komplemen dengan kebijakan makroekonomi lainnya, misalnya kebijakan moneter dan

kebijakan fiskal, dan berfungsi sebagai *automatic stabilizer* mengingat digunakan *countercyclical* (Siravati, 2017).

2.4. Giro Wajib Minimum (GWM).

Giro Wajib Minimum disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar Persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga Bank / DPK (merupakan kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing). Giro Wajib Minimum (GWM) ini merupakan jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank setiap hari. Besaran GWM ditetapkan oleh bank sentral sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga (DPK). Lazimnya, dana GWM tersebut ditempatkan dalam bentuk giro di bank sentral dan masih menjadi milik bank untuk dipergunakan dalam aktivitas transaksi non tunai dan atau pemenuhan penarikan dana nasabah intrahari. (Fita Dela, 2018)

Berdasarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 6/15/PBI/2004 Giro Wajib Minimum (*Stationary Reserve*), atau selanjutnya disebut giro wajib minimum, adalah simpanan umum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK (Dana Pihak Ketiga).

Likuiditas wajib minimum atau cadangan wajib minimum atau *Reserve Requirement* adalah sejumlah tertentu alat liquid yang harus tetap berada dibank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank tersebut. Aturan ini untuk menjamin kemampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditas, seperti penarikan dana simpanan nasabah, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan lain-lain. Ketentuan likuiditas wajib minimum selama ini dapat dibedakan dalam dua kategori perhitungan, yaitu likuiditas wajib dalam rupiah dan likuiditas wajib dalam valuta asing.

2.4.1 Jenis-Jenis Giro Wajib Minimum

1. Giro Wajib Minimum

Primer Giro Wajib Minimum Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. Giro Wajib Minimum Primer dalam rupiah adalah sebesar 8% dari DPK dalam rupiah.

2. Giro Wajib Minimum Sekunder

Giro Wajib Minimum Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa SBI (Sertifikat Bank Indonesia), (Surat Utang Negara), SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan Excess Reserve yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. Besaran GWM Sekunder dalam rupiah adalah 2,5% dari DPK dalam rupiah. Excess Reserve adalah kelebihan

saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer dan GWM LDR yang wajib dipelihara di Bank Indonesia.

3. Giro Wajib Minimum *Loan Deposite to Ratio* (LDR)

Giro Wajib Minimum LDR adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh Bank dengan LDR Target. Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LDR dalam rupiah ditetapkan (dapat sewaktu-waktu diubah oleh BI) sebagai berikut:

- a. Batas bawah LDR target sebesar 78%
- b. Batas atas LDR target sebesar 100%
- c. KPMM Insentif sebesar 14%
- d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1
- e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 4.

Giro Wajib Minimum Valas Giro Wajib Minimum dalam valuta asing ditetapkan sebesar persentase tertentu (dapat diubah sewaktu-waktu oleh BI) dari Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing. Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk Bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari: giro, tabungan, simpanan berjangka/deposito, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Saat ini ketentuan pemenuhan GWM dalam valuta asing ditetapkan sebagai berikut:

1. Sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam valuta asing.
2. Sejak tanggal 1 Juni 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing.

2.4.2. Fungsi Giro Wajib Minimum

Fungsi GWM antara lain:

1. Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia
2. Untuk jaminan pembayaran pencairan tabungan masyarakat
3. Untuk mempertahankan agar bank tetap dapat mengikuti kliring
4. Untuk memperkuat daya tahan dalam persaingan antar bank
5. Untuk menentukan tingkat kesehatan bank
6. Merupakan salah satu alat kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar
7. Sebagai salah satu alat otoritas moneter dalam menstabilkan nilai tukar uang
8. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

2.5. Capital Adequacy Ratio.

CAR adalah perbandingan antara total modal dengan aset tertimbang menurut risiko yang oleh Bank Indonesia diterjemahkan menjadi KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum)(Purba, 2011). Adapun klasifikasi

tingkat CAR menurut Bank Indonesia secara rinci adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{ATMR} \times 100\%$$

Secara terperinci dijabarkan dalam rumus:

$$CAR = \frac{\text{Modal inti} + \text{modal pelengkap}}{ATMR \text{ neraca} + ATMR \text{ rekening administratif}} \times 100$$

BI menetapkan ketentuan modal minimum bagi perbankan sebagaimana ketentuan dalam standar *Bank for International Settlements* (BIS) bahwa setiap bank umum diwajibkan menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Adapun klasifikasi tingkat CAR menurut Bank Indonesia secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.1 Klasifikasi tingkat *Capital Adequacy Ratio* menurut

BI

Tingkat CAR	Predikat
8% keatas	Sehat
6,4%-7,9%	Kurang Sehat
Dibawah 6,4%	Tidak Sehat

Sumber: www.bi.go.id dalam (Purba, 2011).

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh anaktiva bank yang mengandung risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan

pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, CAR adalah rasio kinerja bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko, misalnya pembiayaan yang diberikan(Purba, 2011).

- a. Rasio CAR merupakan alat pengukur kinerja keuangan bank. Selain itu, CAR juga menggambarkan kondisi perbankan di antaranya Indikasi permodalan apakah telah memadai (*adequate*) untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif karena setiap kerugian akan mengurangi modal. CAR mengukur kemampuan permodalan bank dalam mengantisipasi penurunan aktiva dan menutup kemungkinan terjadinya kerugian dalam pembiayaan. CAR yang tinggi mencerminkan semakin baiknya permodalan karena modal dapat digunakan untuk menjamin pemberian pembiayaan. CAR yang rendah mencerminkan bahwa permodalan bank kurang baik karena bank kurang mampu menutup kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pembiayaan.
- b. Kemampuan membiayai operasional dan membiayai seluruh aktiva tetap dan inventaris bank. CAR yang tinggi menunjukkan cukupnya modal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan dapat melakukan pengembangan bisnis serta ekspansi usaha dengan lebih aman.

- c. Kemampuan bank dalam meningkatkan profitabilitas. CAR yang tinggi menunjukkan bank tersebut memiliki tingkat modal yang cukup besar dalam meningkatkan cadangan kas yang dapat digunakan untuk memperluas pembiayaannya, sehingga akan membuka peluang yang lebih besar bagi bank untuk meningkatkan profitabilitas.
- d. Ketahanan dan efisiensi perbankan. Bila CAR rendah, kemampuan bank untuk *survive* pada saat mengalami kerugian juga rendah. Modal sendiri cepat habis untuk menutupi kerugian yang dialami dan akhirnya kelangsungan usaha bank menjadi terganggu.

2.6. Suku Bunga.

Bunga pada prinsipnya adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak yang membutuhkan uang kepada pihak yang memerlukan uang. Bunga dapat di lihat dari dua sisi yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Bunga dari sisi penawaran merupakan pendapatan atas pemberian kredit sehingga pemilik dana akan menggunakan dananya pada jenis investasi yang menjanjikan pembayaran yang tinggi, sedangkan bunga dari sisi permintaan adalah biaya atas pinjaman atau jumlah yang dibayarkan sebagai imbalan atas penggunaan uang yang dipinjam. bunga merupakan harga yang dibayar atas modal (Deviana, 2014).

Menurut Kasmir (2012 : 114)dalam jurnal (Rompas, 2018) bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) yang harus di bayar nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Pandangan Keynes, bahwa tingkat bunga tergantung pada sejumlah uang yang beredar dan preferensi likuiditas (permintaan uang), yang dimaksud dengan preferensi likuiditas adalah permintaan uang atas uang oleh seluruh masyarakat dalam perekonomian. Keynes menyatakan bahwa permintaan uang oleh masyarakat mempunyai 3 tujuan (Sadono Sukirno, 2004)dalam (Rompas, 2018):

1. Transaksi (untuk membayar konsumsi oleh masyarakat).
2. Berjaga-jaga (untuk menghadapi masalah yang tidak terduga-duga seperti kematian dan kehilangan pekerjaan)
3. Spekulasi (untuk ditanamkan ke saham atau surat berharga lain).

Menurut Kasmir (2012 : 114) dalam (Deviana, 2014)kegiatan bank sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut :

1. Bunga simpanan Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan berupa bunga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman Bunga pinjaman yang diberikan kepada peminjam atau bunga yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga pinjaman tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga mempengaruhi ikut naik, demikian pula sebaliknya (Rompas, 2018).

2.7. Inklusi Keuangan.

Financial Inclusion didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Halim Alimsyah, 2016) dalam (Nasution, Nasution, & Yafiz, 2017). *Financial Inclusion* merupakan sebagai bentuk strategi nasional Keuangan Inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat (Nasution, Nasution, & Yafiz, 2017).

Keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan serta layanan. Selain itu, layanan keuangan yang aman dimaksudkan agar masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dari risiko yang mungkin timbul (Kemenkeu, 2016).

2.7.1. Visi dan Misi Keuangan Inklusif

Adapun visi dan misi keuangan inklusif menurut (Kemenkeu, 2016)

1. Visi

Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui peningkatan pemahaman tentang sistem, produk, dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Misi

- a. Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.
- b. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan.
- d. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
- e. Mendorong pengembangan keuangan inklusif untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia.

2.7.2. Manfaat dan Tujuan Keuangan inklusif(Nasution, Nasution, & Yafiz, 2017).

Tujuan Financial Inclusion tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Menjadikan strategi Keuangan Inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan.
- b. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan.
- d. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan.
- e. Memperkuat sinergi antara Bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non Bank.
- f. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

Manfaat *Financial Inclusion*

Adapun manfaat dari Keuangan Inklusif yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta, antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi ekonomi.
- Mendukung stabilitas sistem keuangan.
- Mengurangi *shadow Banking* atau *irresponsible finance*.
- Mendukung pendalaman pasar keuangan.

- Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
- Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.
- Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan.
- Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan *rigiditas low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

2.8. Saving (Tabungan).

Menurut pandangan Klasik Tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga . dalam perkembangannya teori ini dikembangkan oleh Wicksell yang menyatakan bahwa tingginya minat masyarakat untuk menabung di pengaruhi oleh tingkat bunga. Artinya pada Tingkat bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih tertarik untuk mengorbankan konsumsi masa sekarang guna menambah tabungannya. Teori Keynes menyatakan bahwa tingkat bunga merupakan fenomena moneter sehingga tabungan tidaklah ditentukan oleh tingkat bunga melainkan lebih disebabkan oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan akan semakin tinggi pula tabungan yang dilakukan oleh Sektor Rumah Tangga.

Menurut Kaum Klasik tingkat bunga itu merupakan hasil interaksi antara Tabungan (S) dan Investasi (I). makin tinggi tingkat bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung Artinya , pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan/mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah

tabungan.

Tabungan dapat dilakukan oleh seorang pedagang dengan membeli barang dagangan dengan maksud untuk mengkonsumsi lebih besar pada waktu yang akan datang. Pandangan Klasik : Pada pandangan Klasik menyatakan makin tinggi Suku Bunga makin banyak tabungan yang dilakukan oleh masyarakat. Pandangan Keynes : Apabila tingkat pendapatan nasional rendah, tabungan masyarakat negatif. Keadaan ini berarti bagi masyarakat menggunakan tabungan di masa lalu untuk membiayai hidupnya. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin banyak tabungan masyarakat Maka dalam perkembangan dunia perekonomian sekarang ini.

Ditetapkan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang dijelaskan sebagai berikut : Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet Giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Kay, 2015).

Tabungan atau saving merupakan dana atau kekayaan yang disisihkan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Batasan ini penting mengingat bahwa menabung bukan hanya dilakukan dalam bentuk uang, tetapi dapat dilakukan dalam bentuk logam mulia (perhiasan), perlengkapan rumah tangga, tanah maupun aset-aset lain yang mudah diuangkan apabila dibutuhkan, baik dengan cara dijual atau digadaikan(Yasid M. , 2009).

Tabungan merupakan bagian dari kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk menahan sejumlah uang dari pendapatannya untuk di simpan di bank untuk keperluan dimasa yang akan mendatang(Saputra, 2012)

2.8.1 Ciri-ciri Tabungan

1. Simpanan pihak ke 3 pada bank.
2. Penarikannya hanya dapat melakukan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati.
3. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut.
4. Penarikannya tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro dll
5. Penarikannya tidak boleh melebihi jumlah tertentu
6. Penyetoran dan penarikan dilakukan oleh penabung dengan slip
7. Penabung diberi bunga sebagai imbalannya
8. Penyetorannya dapat dilakukan secara tunai maupun cara lainnya.

2.9. Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 21 ayat 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Anggraeni, Husaini, & Nuzula, 2014).

2.9.1. Unsur-unsur Kredit

a. Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur.

b. Waktu

Waktu (*time*) adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analisis finance khususnya oleh analisis kredit.

c. Risiko

Menyangkut persoalan *degree of risk*, yang paling dikaji adalah keadaan yang terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet.

d. Prestasi

Prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur.

e. Adanya kreditur

Pihak yang memiliki uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) untuk dipinjamkan kepada pihak lain.

f. Adanya debitur

Pihak yang memerlukan uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat waktu ((Anggraeni, Husaini, & Nuzula, 2014)(Fahmi, 2010:7)).

2.9.2. Fungsi dan Tujuan Kredit

a. Meningkatkan Daya Guna Uang

b. Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

c. Meningkatkan Daya Guna

d. Meningkatkan Peredaran Barang

e. Kredit sebagai Akat Stabilitas Ekonomi

- f. Meningkatkan Kegairahan Berusaha
- g. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan
- h. Meningkatkan Hubungan Internasional ((Anggraeni, Husaini, & Nuzula, 2014)(Kasmir, 2012:117)).

2.9.3. Jenis-jenis Kredit

a. Kredit dilihat dari sudut tujuannya

- 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
- 2) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
- 3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang yang akan dijual kembali.

b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktu

- 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya maksimum 1 tahun.
- 2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
- 3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

c. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya

- 1) Kredit eksploitasi, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal.
- 2) Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka

panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.

d. Kredit dilihat dari sudut jaminannya

- 1) Kredit tanpa jaminan
- 2) Kredit dengan agunan (dalam jurnal (Anggraeni, Husaini, & Nuzula, 2014) (Thomas Suyatno dkk, 2003:88).

B. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.10. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	VARIABEL	METODE	HASIL
1.	Linda Seprillina1, Ghozali Maskie, Moh. Khusaini. Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Brawijaya Malang 2016.	ANALISIS RESPON KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN MAKROPRUDEN SIAL DALAM MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER JALUR KREDIT DI INDONESIA	Kebijakan Moneter, Kebijakan Makroprudensial, Suku Bunga SBI, <i>Reserve Requirement</i> , <i>Loan to Deposit Ratio</i> , dan MTKM jalur kredit.	VECM (<i>vector error correction model</i>)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen kebijakan moneter dengan menggunakan instrumen suku bunga SBI tidak dapat mempengaruhi tingkat inflasi yang disebabkan oleh berbagai permasalahan krusial dalam sektor keuangan itu sendiri khususnya pada sektor kredit. Sedangkan instrumen makroprudensial menunjukkan hasil bahwa kedua instrumen ini ternyata justru mempunyai respon yang efektif terhadap tingkat inflasi di Indonesia.
2	ANTONIUS EGO PANTANGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2017	ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN MAKROPRUDEN SIAL, KEBIJAKAN MONETER, DAN INDIKATOR MAKROEKONOMI TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN INDONESIA TAHUN 2006:Q1-2016:Q4	Resiko kredit, Stabilitas sistem keuangan	metode regresi OLS pada data sekunder <i>time series</i> kuartalan	Berdasarkan hasil regresi pada IHPR, tingkat LDR, tingkat CAR, tingkat BI rate serta inflasi terhadap kredit, dapat disimpulkan bahwa IHPR, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan moneter berpengaruh terhadap kredit sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap kredit. Walaupun kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter bisa digunakan untuk mengendalikan kredit, penulis menyarankan agar pemerintah tetap siap menghadapi

					kemungkinan terjadinya gangguan pada sistem keuangan, baik gangguan endogen maupun eksogen. Pemerintah juga perlu mengendalikan laju pertumbuhan IHPR untuk menghindari ancaman risiko sistemik.
3	Eric Matheus Tena Yoel Universitas Katolik Parahyangan 2016	PENGARUH KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL TERHADAP SIKLUS KREDIT: SEBUAH STUDI ATAS PENGGUNAAN INSTRUMEN CAR DAN GWM PERBANKAN INDONESIA 2006-2013	Kebijakan Makroprudensial, CAR, GWM, Siklus Kredit.	teknik <i>path analysis</i> ,	Dengan menggunakan teknik <i>path analysis</i> , peneliti menemukan bahwa CAR mempengaruhi penyaluran kredit perbankan secara negatif sedangkan GWM mempengaruhi penyaluran kredit perbankan secara positif baik pada model pertama dan model kedua. Pada model kedua, peneliti juga menemukan bahwa CAR mempengaruhi ATMR pasar secara positif. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan makroprudensial CAR dan GWM cukup efektif dalam meredam siklus kredit.
4	IDA NURYANA Universitas Kanjuruhan Malang 2015	ASSESSMENT EFEKTIFITAS INSTRUMEN MAKROPRUDENSIAL DALAM MENGURANGI RISIKO KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA	Capital Adequacy Ratio, Capital Buffer, GWM Loan Deposits to Ratio	Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda serta melakukan analisis data dengan melakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Capital Buffer dan GWM LDR berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit. Secara parsial Capital Buffer berpengaruh terhadap risiko kredit, sedangkan GWM LDR tidak berpengaruh terhadap risiko kredit.
5	Farah Fauziah Lingkar Studi Ekonomi Syariah 2015	KEBIJAKAN MONETER DALAM MENGATASI INFLASI DI INDONESIA	<i>moneter syariah; moneter konvensional; VAR; FEVD; IRF</i>	<i>Vector Autoregressive (VAR). Hasil penelitian VAR ini dilakukan dengan Uji Impulse Response Function (IRF) dan Uji Forecast Error Variance Decomposition (FEVD).</i>	Hasil IRF menunjukkan bahwa pada konvensional (Model I) variabel SBI memberikan dampak negatif dan obligasi memberikan dampak positif terhadap inflasi (IHK), sedangkan pada sisi syariah (Model II) memberikan dampak positif dalam menurunkan inflasi. Gejala pada mekanisme transmisi moneter syariah lebih cepat mereda dan stabil dibandingkan pada mekanisme transmisi kebijakan moneter

					konvensional. Untuk hasil uji FEVD pada model I menaikkan inflasi sebesar 43,86%, sedangkan pada model II mampu menurunkan inflasi (IHK) sebesar 25,77%. Sehingga mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah lebih baik dibandingkan mekanisme transmisi kebijakan moneter konvensional.
6	Eka Budiyantri P3DI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik 2014	PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP KINERJA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA	kebijakan moneter, sektor industri manufaktur, estimasi ECM	uji empiris menggunakan <i>Error Correction Model</i> (ECM)	Hasil uji empiris menunjukkan bahwa <i>money supply</i> dan tingkat suku bunga signifikan memengaruhi PDB manufaktur. <i>Money supply</i> berpengaruh positif terhadap PDB manufaktur, sedangkan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap PDB manufaktur. Dari kedua variabel tersebut, <i>money supply</i> memiliki pengaruh terbesar terhadap PDB manufaktur yaitu sebesar 0,26 persen, sedangkan tingkat suku bunga hanya berpengaruh sebesar 0,0054 persen terhadap PDB manufaktur. Karenanya, diperlukan perhatian yang lebih dari pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian <i>money supply</i> sehingga dapat meningkatkan output sektor industri di Indonesia. Walaupun pengaruh tingkat suku bunga terhadap PDB manufaktur tidak terlalu besar, pemerintah dan Bank Indonesia juga tetap perlu menekan tingkat suku bunga yang dapat mendorong investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
7	Nyak Ilham dan Hermanto Siregar Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB	DAMPAK KEBIJAKAN HARGA PANGAN DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP STABILITAS EKONOMI	kebijakan harga pangan, kebijakan moneter, stabilitas, ekonomi makro, VECM	model VECM (<i>Vector Error Correction Model</i>) dan teknik IRF (<i>Impulse Response Function</i>).	Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan harga pangan tidak menyebabkan instabilitas ekonomi makro, sedangkan kebijakan moneter menyebabkan peningkatan angka pengangguran.

	2007	MAKRO			
8	Dewa Nyoman Gede I Wayan Sudirman Gede Sudjana Budhiasa Universitas Udayana (Unud) Bali Indonesia 2012	DAMPAK KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN ROA INDUSTRI PERBANKAN REGIONAL STUDI KASUS PADA PT BANK SINAR HARAPAN BALI	Moneter, Kebijakan, Bank Regional	metode ekonometrik simultan regresi dua tahap.	Hasil analisis menunjukkan bahwa SBI memiliki hubungan negative dengan ROA sebesar -0.359, sedangkan GWM ditemukan positif sebesar 0.155 terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa instrument SBI berdampak menurunkan kinerja ROA, sedangkan parameter GWM berdampak positif dan searah terhadap ROA Bank Sinar Harapan Bali. Jika dianalisis pembentukan kinerja ROA melalui kinerja variabel antara LDR dan NIM, tampak bahwa keduanya memberikan dukungan positif, sehingga apabila hubungan tidak langsung dari kebijakan moneter SBI berperan semakin menguat dimasa depan, maka dampak kinerja negative SBI dapat direduksi melalui peran mediasi LDR dan NIM.
9	Amaluddin Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura 2010	KEBIJAKAN MONETER, INVESTASI SWASTA DAN TINGKAT OUTPUT DI INDONESIA : SUATU APLIKASI GRANGER CAUSALITY TEST, PERIODE 1999-2009	Kebijakan Moneter, Investasi Swasta, Output dan Kausalitas.	kausalitas Granger (Granger Causality Test) dalam kerangka VECM (Vector Error Correction Model).	hasil uji kausalitas Granger (IRF), dalam jangka pendek terdapat hubungan yang saling mempengaruhi atau hubungan dua arah (bi-directional causality) antara kebijakan moneter dan tingkat output. Kondisi tersebut didukung oleh pola hubungan kausalitas dua arah (bi-directional causality) antara Intermediasi keuangan perbankan dan investasi swasta meski demikian hanya terdapat hubungan satu arah (uni-directional causality) dari kebijakan moneter ke investasi swasta. Dalam jangka panjang hanya terdapat hubungan kausalitas berpola 1 arah (uni-directional causality) yang berlangsung dari tingkat output ke kebijakan moneter mengisyaratkan adanya respon dari Bank Indonesia sebagai otorita moneter dengan instrumennya untuk mengendalikan kondisi

					makroekonomi.
10	Arif Setiawan(a) Pusat Harmonisasi Kebijakan, Kementerian Keuangan 2012	INFLATION TARGETING FRAMEWORK DAN PERUBAHAN RESPON KEBIJAKAN MONETER	<i>Inflation Targeting Framework, Monetary Policy Responses, Time Varying Parameter.</i>	metode yang akan digunakan yaitu CUSUM test dan Time Varying Parameter dengan Kalman Filter.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ITF di Indonesia membuat respon kebijakan moneter meningkat terhadap inflasi pada awal penerapan ITF yang menunjukkan gejala <i>over shooting</i> . Respon kemudian cenderung menurun dan stabil pada periode berikutnya. Dengan tambahan analisis <i>event study</i> krisis keuangan global dan kenaikan pada harga BBM, dalam penelitian ini kita dapat juga melihat bagaimana otoritas moneter bereaksi menghadapi dua kejadian penting tersebut dalam perekonomian.
11	Wahyu Alimirruchi UNDIP Semarang. 2017	ANALYZING OPERATIONAL AND FINANCIAL PERFORMANCE ON THE FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) FIRM (Case Study on Samsung Pay)	<i>keuangan, Samsung pay, kinerja operasional, kinerja keuangan</i>	<i>Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data penelitian.</i>	Hasil penelitian menemukan bahwa nilai dari kinerja keuangan dan operasionalnya Samsung Pay adalah 3,1 dari 4. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja operasional dan keuangan dari Samsung Pay adalah baik. Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak adanya keterangan jumlah pendapatan dan pekerjaan dari pengguna Samsung Pay di Amerika Serikat, penelitian ini tidak terlibat langsung di dalam Samsung Pay tetapi melalui analisis dokumen, serta sedikitnya informasi atau data mengenai Samsung Pay. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menggunakan data dengan objek penelitian lain di negara yang berbeda dan menambahkan indikator kinerja yang lainnya selain dari keuangan dan operasional.
12	Immanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pelita Harapan Tangerang 2017	ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI TEKNOLOGI FINANSIAL TERHADAP KUALITAS LAYANAN PERBANKAN DI INDONESIA	teknologi finansial, layanan perbankan, kualitas layanan.	Metoda penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah deskriptif	Mencermati berbagai realita yang telah diuraikan di atas, maka melalui analisis SWOT implementasi kebijakan teknologi finansial ini, diharapkan kualitas layanan perbankan semakin dapat ditingkatkan dan dirasakan oleh seluruh lapisan

				kualitatif.	masyarakat Indonesia secara riil dan para pelaku perbankan dapat memahami pengelolaan fungsi manajemen perbankan dengan tepat didasarkan pada sikap takut akan Tuhan dan menghargai sesama, dalam konteks pengelolaan aset internal maupun eksternal yang mencakup aktivitas perbankan secara holistik. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan Indonesia di era digital melalui studi literatur perbankan.
13	Posma Sariguna Johnson Kennedy Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia, Jakarta 2017	Literature Review: Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya	<i>Bank Indonesia; Financial Technology (Fintech); Inovasi Disruptif; Jasa Keuangan; Otoritas Jasa Keuangan.</i>	<i>metode penelitian yang dilakukan adalah kajian literatur dari berbagai sumber pustaka terutama dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.</i>	Perkembangan fintech di Indonesia masih dalam tahap awal, banyak industri yang belum terjamah dan banyak peluang yang belum terkesplorasi maksimal. Perlu kolaborasi secara bersama-sama mengembangkan fintech di Indonesia, baik oleh pemain lama (incumbent) pemain baru fintech dan regulator demi kemaslahatan bersama.
14	Avendri Sutrisno Simatupang UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017	ANALISIS DAMPAK BAURAN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL, INFLATION TARGETING DAN KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP SIKLUS KEUANGAN INDONESIA DALAM SISTEM KURS MENGAMBANG	Reserve Requirement – Loan to Deposit Ratio, Inflation Targeting, Fiscal Policy, Financial Cycle, Hodrick-Prescott Filter, Error Correction Model.	model error correction mechanism.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan makroprudensial melalui giro wajib minimum – <i>loan to deposit ratio</i> (GWM-LDR) terbukti mengurangi prosiklikalitas dalam siklus keuangan atau bersifat countercyclical, kebijakan moneter melalui <i>inflation targeting framework</i> juga terbukti mengurangi prosiklikalitas keuangan di Indonesia atau bersifat countercyclical. Namun, untuk kebijakan fiskal melalui pertumbuhan utang pemerintah bersifat procyclical atau mendorong prosiklikalitas dalam siklus keuangan di Indonesia. Rezim

					nilai tukar mengambang di Indonesia menunjukkan karakter yang beriringan atau searah dengan siklus keuangan.
15	Muhammad Rizky Prima Sakti, Hassanudin bin Mohd Thas Thaker, Abdul Qoyum, Ibnu Qizam Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) 2018	The Concept and Practices of Macroprudential Policy in Indonesia: Islamic and Conventional	Interest Rates, Inflation, Economic Growth	<i>Vector Error Correction Model (VECM)</i>	penelitian ini menemukan bahwa kebijakan makroprudensial berdasarkan instrumen GWM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit bank konvensional dan syariah. Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan kredit dipengaruhi secara positif oleh PDB dan dipengaruhi secara negatif oleh BI Rate dan inflasi. Selain itu, kredit juga dipengaruhi oleh rasio danapihak ketiga (LDPK) dan NPL. Menariknya, ada pengaruh yang berbeda dari instrumen capital buffer terhadap pertumbuhan kredit. Instrumen capital buffer berdampak negatif terhadap pertumbuhan pembiayaan bank syariah di Indonesia.
16	Komang Agus Rudi Indra Laksmiana,* , Ngurah Arya Suryadhana B Universitas Mahendradatta, Denpasar, Indonesia 2018	Dampak Pertumbuhan Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia	Financial inclusion, GDP, NPL	analisis multivariate.	hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM memiliki pengaruh negatif terhadap risiko kredit yang dikaitkan dengan stabilitas yang lebih baik. Tingkat pertumbuhan PDB memiliki posisi efek langsung signifikan dan signifikan pada stabilitas keuangan (NPL) dari bank di Indonesia. Pada saat yang sama, ia memiliki pengaruh yang signifikan sebagai variabel moderasi pada hubungan antara inklusi keuangan dan stabilitas keuangan bank di Indonesia.
17	Muhammad Anif Afandi , Indanazulfa Qurrota A'yun 1*Faculty of Economics and Business ,University of Indonesia 2*Faculty of Economics and	THE FORECASTING OF FINANCIAL INCLUSION IN EAST JAVA THROUGH ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTION : ANAUTOREGRESSIVE	Financial Inclusion, Islamic Rural Banks, ARIMA, East Java	Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan nilai perkiraan hingga Desember 2020, jumlah BPRS diprediksi akan berkurang dengan angka terakhir sebanyak 27 bank, DPK akan bertambah dengan angka terakhir Rp1.680.558,79 juta Rupiah, jumlah pembiayaan akan bertambah dengan angka

	Business, Gadjah Mada University 2018	INTEGRATED MOVING AVERAGE APPROACH			terakhir sebanyak 1.822.810.80 juta Rupiah, aset akan meningkat dengan angka terakhir 2.299.250,44 juta Rupiah, dan NPF akan meningkat dengan angka terakhir 12,48 persen
18	Paramjit Sujlana Research Scholar , Punjabi University, Patiala, Punjab, India Chhavi Kiran Junior Research Fellow, Punjabi University Regional Centre for Information Technology and Management, Mohali, Punjab , India 2018	A Study on Status of Financial Inclusion in India	Financial inclusion, inclusive growth, banks, Indian economy .	Descriptive	Melalui makalah ini upaya telah dilakukan untuk memberikan ikhtisar tentang status inklusi keuangan di India dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat dinyatakan bahwa inklusi keuangan sedang dalam tahap progresif di India dalam hal penetrasi cabang. Namun upaya-upaya tertentu menuju pertumbuhan inklusif masih merupakan tahap awal dan perlu diberikan bentuk konkret dengan upaya kolaboratif Pemerintah India bersama dengan warga negara.
19	Sanderson Abel , Learnmore Mutandwa , Pierre Le Roux 1*Senior Economist at Bankers Association of Zimbabwe, Zimbabwe, 2*Lecturer at Midlands State University, Zimbabwe, 3*Nelson Mandela University, South Africa. 2018	A Review of Determinants of Financial Inclusion	Financial Inclusion, Financial Discourse, Financial System	Descriptive	Studi ini merekomendasikan bahwa pemerintah harus menerapkan kebijakan yang mendorong penyedia layanan keuangan untuk mengatur operasi mereka lebih dekat dengan masyarakat atau memastikan mereka mengadopsi teknologi yang memastikan layanan keuangan lebih mudah diakses seperti agensi dan mobile banking. Karena itu pemerintah harus mendorong penggunaan akun KYC lite untuk mempermudah persyaratan dokumentasi tanpa mengurangi kerangka kerja anti pencucian uang yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.
20	Abiola A. Babajide, Folasade B. Adegboye , Alexander E. Omankhanlen 1*Department of Banking and Finance, Covenant University, P.M.B 1023, Ota, Ogun State, Nigeria, 2*Department of	International Journal of Economics and Financial Issues Financial Inclusion and Economic Growth in Nigeria	Financial Inclusion, Economic Growth, Nigeria	ordinary least square regression model was used to analyze the data ordinary least square (OLS) regression model was	Hasilnya menunjukkan bahwa FI merupakan penentu yang signifikan dari total faktor produksi, serta modal per pekerja, yang selalu menentukan tingkat output akhir dalam perekonomian. Studi ini merekomendasikan bahwa sumber daya alam dan ekonomi harus dimanfaatkan secara memadai, sebagai cara alternatif revitalisasi dan

	Banking and Finance, Covenant University, P.M.B 1023, Ota, Ogun State, Nigeria, 3*Department of Banking and Finance, Covenant University, P.M.B 1023, Ota, Ogun State, Nigeria 2015			used to analyze the data	diversifikasi ekonomi monokultural Nigeria yang bergantung pada minyak.
21	Amram Rohi Bire, Heni Matelda Sauw, Maria Universidad Técnica de Manabí. 2019	The Effect of Financial Literacy towards Financial Inclusion through Financial Training	enterprises; finance; inclusive; literacy; MSMEs	path analysis technique.	Hasil analisis menunjukkan bahwa literasi keuangan telah berdampak langsung dan signifikan terhadap inklusi keuangan. Kontribusinya terhadap pelatihan keuangan adalah 33%. Di sisi lain, kontribusi literasi keuangan terhadap inklusi adalah 32%. Selain itu, pelatihan keuangan telah memediasi hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan. Presentasi adalah 11%. Fenomena ini menunjukkan bahwa di masa depan, perlu untuk meningkatkan frekuensi pelatihan keuangan bagi para pelaku UMKM di kota Kupang, Indonesia.
22	Nofita Wulansari, Wahyu Dan Yunus Kurniawan Universitas Jember 2017	AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI SINERGI UMKM DAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA	Pertumbuhan Ekonomi, UMKM, good governance, fintech	metode analisis deskriptif	Berdasarkan hasil temuan ini diperlukan harmonisasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah untuk mendorong pembangunan UMKM melalui kemudahan akses permodalan. Selain itu, konsep good governance juga sangat penting agar unit usaha mampu bertahan ditengah persaingan bisnis serta tantangan perekonomian global.
22	Diana Adriani & I Gst. Bgs. Wiksuana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia 2018	INKLUSI KEUANGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERTUMBUHAN UMKM DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN	inklusi keuangan, UMKM, kesejahteraan masyarakat	kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) Inklusi keuangan mampu memicu pertumbuhan UMKM baru dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, 2) Inklusi keuangan dalam jangka pendek belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menekan angka kemiskinan.

		MASYARAKAT DI PROVINSI BALI			
23	Lia Nazliana Nasution, SE, M.Si Handriyani Dwilita, SE, M.Si Dosen FEB - UNPAB Medan 2016	KEUANGAN INKLUSIF DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SUMUT	Jumlah tabungan, jumlah kredit UMKM, jumlah angkatan kerja, jumlah pinjaman (investasi, konsumsi, dan modal kerja), PDRB	Analisis korelasi sederhana (bivariate correlation)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya jumlah tabungan dengan jumlah kantor cabang bank, jumlah pinjaman (investasi, konsumsi, dan modal kerja), dan PDRB yang memiliki hubungan korelasi sangat kuat dan signifikan. Sedangkan jumlah tabungan dengan jumlah penyaluran kredit UMKM dan jumlah angkatan kerja memiliki hubungan korelasi yang rendah dan tidak signifikan.
24	Ari Nugroho & Evi Yulia Purwanti Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 2014	DETERMINAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA (GLOBAL FINDEX 2014)	individual characteristic, financial inclusion, Indonesia, logit regression model	the logit regression model.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik individu seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan usia secara signifikan mempengaruhi kepemilikan dan rekening tabungan di lembaga keuangan formal. Sedangkan gender tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Pada indikator ketiga yang merupakan pinjaman dari lembaga keuangan formal, hanya kuintil pendapatan termiskin dan usia memiliki pengaruh yang signifikan.
25	Obaid M Fahmy, M. Rustam, Evi Asmayadi. Universitas Tanjungpura 2016	Pengaruh Keuangan Inklusif Terhadap Kredit Yang disalurkan pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia	MSMEs, Financial Inclusion, Access Dimensi on, Usage Dimensi on, LDR, NPL	penelitian asosiatif dengan teknik analisis kuantitatif	Dari hasil pembahasan maka diambil simpulan bahwa dimensi akses perbankan secara uji parsial (uji-t) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit yang disalurkan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, maknanya semakin banyak jaringan kantor bank maka semakin besar kredit yang terserap pada sektor UMKM. Kedua, dimensi penggunaan layanan perbankan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit yang disalurkan pada sektor UMKM (Uji-t), artinya semakin besar penggunaan layanan bank dalam hal ini menyimpan dananya di bank (DPK), maka semakin besar

					pula pertumbuhan kredit pada sektor UMKM ini. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol LDR dan NPL yang menunjukkan bahwa LDR secara bersama-sama dengan variabel akses dan variabel penggunaan layanan perbankan berpengaruh positif signifikan. Sedangkan NPL mempunyai arah negatif namun tidak signifikan.
26	Setyani Irmawati, Delu Damelia, Dita Wahyu Puspita. Universitas Negeri Semarang, Indonesia 2013	MODEL INKLUSI KEUANGAN PADA UMKM BERBASIS PEDESAAN	UMKM Batik berbasis perdesaan, lembaga keuangan, Inklusi Keuangan, analisis deskriptif, Analisis SWOT	analisis deskriptif, Analisis SWOT	Hasil yang diperoleh yaitu model inklusi keuangan untuk UMKM Batik di Kabupaten Klaten yaitu masuknya lembaga keuangan dalam segi permodalan yaitu berbentuk kredit bunga rendah dan KUR, yang selanjutnya dilakukan pendampingan dari lembaga keuangan. Sedangkan dari segi pemasaran, diperlukan adanya pendampingan intensif, pengikutsertaan pameran batik serta advertisement. Dengan model tersebut, diharapkan akan terbentuk UMKM Batik Klaten yang berkualitas.
27	Poppy Alvianolita Sanistasya, Kusdi Rahardjo, Mohammad Iqbal Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Indonesia 2019	Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur	literasi keuangan, inklusi keuangan, kinerja usaha kecil	kuantitatif dan menggunakan alat analisis PLS (Partial Least Square)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja usaha kecil dan inklusi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja usaha kecil.
28	Svetlana Saksonova, Irina Kuzmina-Merlino University of Latvia Transport and Telecommunication Institute 2017	Fintech as Financial Innovation –The Possibilities and Problems of Implementation	fintech, competition, innovation in financial services.	Descriptive	Makalah ini mendokumentasikan hasil survei yang bertujuan untuk mengklarifikasi seberapa baik informasi konsumen di Latvia tentang layanan fintech, kenyamanan, kecepatan dan keamanan mereka, serta kepuasan konsumen saat ini dengan layanan banking.

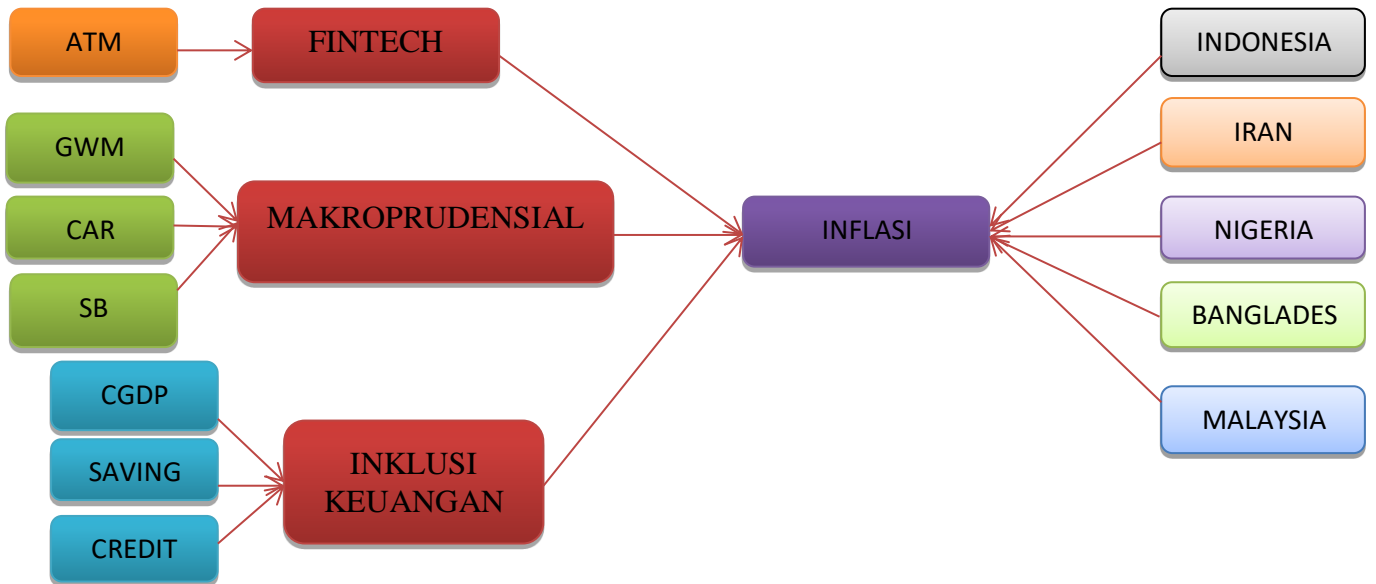
29	Diardo Luckandi, S.Kom. Universitas Islam Indonesia 2018	Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan Fintech Pada UMKM di Indonesia: Pendekatan Adaptive Structuration Theory	fintech, pembayaran, transaksi, umkm	Descriptive	Fintech menjadi sebuah layanan keuangan yang dapat membantu pelaku untuk melakukan transaksi pembayaran, dengan berbagai keuntungan yang dijanjikan. Pada kenyataannya, banyak faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat pelaku UMKM untuk menggunakan teknologi ini. Adaptive Structuration Theory dapat digunakan untuk mencari faktor-faktor tersebut, sehingga ditemukan sebuah kesimpulan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penggunaan teknologi ini.
31	Indah Piliyanti Faculty of Islamic Economics and Business, IAIN Surakarta	Fintech Achieving Sustainable Development The Side Perspective of Crowdfunding Platform	crowdfunding, Islamic crowdfunding, micro financing.	Descriptive	Data telah dikumpulkan dari situs web tertentu, di bawah lima standar: jaringan sosial, acara, motivasi pengguna, versi insentif, dan massa kritis. Artikel ini mengungkapkan bahwa bersama dengan jenis platform crowdfunding lainnya, crowdfunding Islam telah mengganggu pembiayaan syariah di Indonesia, namun aturan terkait pembiayaan belum mengakomodasi perkembangan besar ini.
32	Ferry Hendro Basuki dan Hartina Husein Dosen Tetap Pada FEB Jurusan Akuntansi Universitas Pattimura Ambon 2018	ANALISIS SWOT FINANCIAL TECHNOLOGY P ADA DUNIAPERBAN KAN DI KOTA AMBON	Financial Tecnology, SWOT, Bank, Digital Information Technology	metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Financial Technology yang di implementasikan memberikan kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang bagi dunia perbankan secara bersamaan sehingga membuat para bankers harus memperbaiki infrastruktur teknologi informasi agar dapat berkolaborasi dengan fintech. Pada gilirannya akan membuat peningkatan layanan dunia perbankan sehingga kastamer semakin mendapatkan pengalaman terkini terkait layanan perbankan digital.

33	<p>Riduwan and Rofiul WahyudiAhmad Dahlan University Yogyakarta 2017</p>	<p>Contribution of Macroprudensial Policy of Central Bank On Microprudensial Islamic Banking</p>	<p>Pembiayaan, Makroprudensial Bank Sentral, Mikroprudensial Bank Syariah</p>	<p>analisis kuantitatif dengan regresi data panel</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan kontribusi kebijakan makroprudensial melalui instrumen LTV terhadap FDR terdapat pengaruh negatif dan signifikan. GWM berdasarkan LFR terhadap FDR terdapat pengaruh positif dan signifikan dan CCB terhadap FDR perbankan syariah Indonesia menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan.</p>
34	<p>Meyliana, Erick Fernando, and Surjandy Information Systems Department, School of Information Systems, Bina Nusantara University 2019</p>	<p>The Influence of Perceived Risk and Trust inAdoption of FinTech Services in Indonesia</p>	<p>Index Terms— Trust, Perceived Risk, FinTech, TAM</p>	<p>Structural Equation Model (SEM)</p>	<p>Hasilnya menunjukkan bahwa faktor pengguna mempercayai pengaruh kegunaan yang dirasakan dalam adopsi untuk menggunakan layanan FinTech. Namun, faktor risiko tidak mempengaruhi penggunaan layanan FinTech, yang selanjutnya tidak mempengaruhi sikap pengguna. Karya ini berkontribusi pada penerapan adopsi layanan FinTech, yang memberikan pandangan menentukan niat pengguna untuk menggunakan layanan FinTech di Indonesia.</p>
35	<p>Yonghee KimPh.D. Candidate, Graduate School of Business Soongsil University. Young-Ju Park Ph.D. Candidate, Graduate School of Business Soongsil University. Jeongil Choi Associate Professor, College of Business Administration Soongsil University. Jiyoung Yeon Assistant Professor, Division of Tourism Baekseok University 2016</p>	<p>The Adoption of Mobile Payment Services for “Fintech”</p>	<p>Elaboration Likelihood Model, Fintech, K Pay, Mobile Payment Service.</p>	<p>Path Analysis</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa kegunaan, kemudahan penggunaan dan kredibilitas memiliki efek pada niat untuk menggunakan, dan self-efficacy ditemukan memiliki efek moderat pada variabel independen dan dependen. Selanjutnya, kepedulian terhadap privasi informasi ditemukan menjadi faktor yang menghalangi jalan menuju niat untuk menggunakan. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam promosi layanan Fintech jenis pembayaran, kenyamanan dan kegunaan adalah variabel yang paling penting dan berpengaruh dalam hal penggunaan, sementara deregulasi pemerintah dan keamanan yang lebih kuat diperlukan dari aspek kelembagaan.</p>

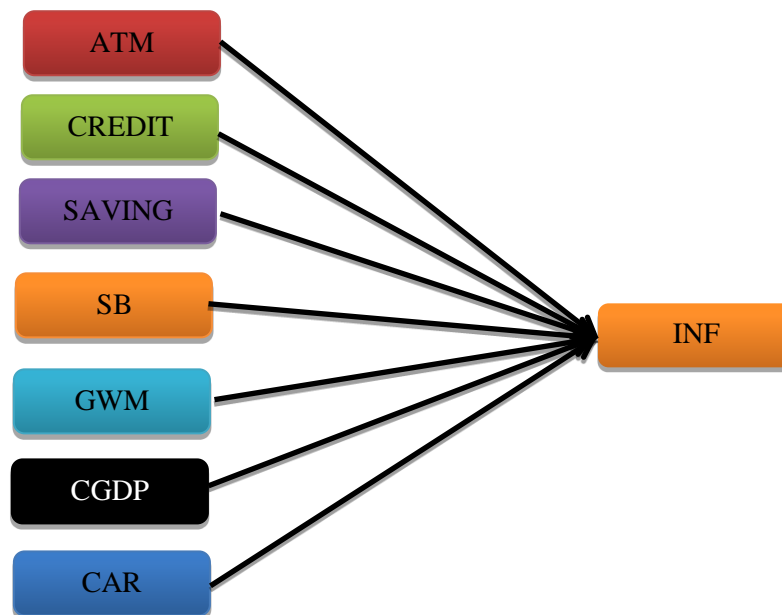
36	Fitri Rusdianasari Source : jurnal ekonomi kuantitatif terapan 2018	Peran Inklusi Keuangan melalui Integrasi Fintech dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia	NPL, kredit UMKM, ATM, Layanan, e-money, GDP per kapitan, Investasi langsung	Error Correction Model (ECM)	Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah cabang bank memiliki pengaruh jangka panjang yang signifikan terhadap stabilitas keuangan melalui kinerja NPL, maka investasi langsung yang diarahkan pada sektor perbankan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan dalam jangka panjang. Namun, instrumen fintech seperti ATM dan e-money tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan jangkauan pada pengembangan fintech pada sektor keuangan terlebih pada masyarakat unbankable.
37	Aris Soelistyo and Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono Universitas Muhammadiyah Malang 2019	Econometry Model of the Impact of Macprudential Policy on Poverty inIndonesia	Poverty, gini ratio, Provincial Minimum Wages, Asset of Rural Banks, NetPerforming Loans, economic regional growth, macroprudential policy	Regression model with panel	Hasil dari penelitian ini mengungkapkan kebijakan makroprudensial melalui kontrol NetPerformance Loans akan meningkatkan kemiskinan, sementara kebijakan makroprudensial pada pengendalian aset BPR akan mengurangi kemiskinan. Kebijakan peningkatan Upah Minimum Regional dan pertumbuhan ekonomi regional akan mengurangi kemiskinan, tetapi peningkatan ketidaksetaraan dalam distribusi hasil mengakibatkan peningkatan kemiskinan.
38	Eko Fajar Cahyono & Lina Nugraha Rani Faculty of Economics and Business,	Macprudential Policy on Sharia Banking Financing The Indonesian Experience	macroprudential policy, credit risk, sharia bank	panel data analysis	Pendekatan penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel dinamis untuk menyelidiki hubungan antara pengambilan risiko kredit bank syariah dan kebijakan

	Universitas Airlangga 2018				makroprudensial untuk bank di perbankan syariah Indonesia yang baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh kebijakan makroprudensial Bank Indonesia terhadap pembiayaan murabahah di Indonesia
39	Yener Altunbas, Mahir Biniciand Leonardo Gambacorta. Bank for International Settlements 2017	Macroprudential policy and bank risk Macroprudential policy and bank risk	macroprudential policies, effectiveness, bank risk.	empirical model, Descriptive	Pertama, ada bukti yang menunjukkan bahwa alat makroprudensial memiliki dampak signifikan terhadap risiko bank. Kedua, tanggapan terhadap perubahan alat makroprudensial berbeda di antara bank, tergantung pada karakteristik neraca spesifik mereka. Khususnya, bank-bank yang kecil, bermodal lemah, dan dengan porsi besar dana grosir bereaksi lebih kuat terhadap perubahan alat makroprudensial. Ketiga, mengendalikan karakteristik khusus bank, kebijakan makroprudensial lebih efektif dalam pengetatan daripada dalam episode pelonggaran.
40	Vasile Cocriș & Anca Elena Nucu Metary policy and financial stability: empirical evidence from Central and Eastern European countries, Baltic Journal of Economics 2013	Monetary policy and financial stability: empiricalevidence from Central and Eastern European countries	monetary policy, financial stability, Structural Vector Autoregressive model, CEE countries	Structural Vector Autoregressive model	Selain itu, hasil kami menunjukkan bahwa di Latvia dan Lithuania penyesuaian terhadap kebijakan moneter Bank Sentral Euro-pean (ECB) tidak sesuai dengan kondisi spesifik negara. Makalah ini berkontribusi pada perdebatan kebijakan tentang desain kebijakan makro-kehati-hatian setelah siklus boom-bust yang dialami oleh negara-negara Eropa Tengah dan Timur pada paruh kedua dekade terakhir.

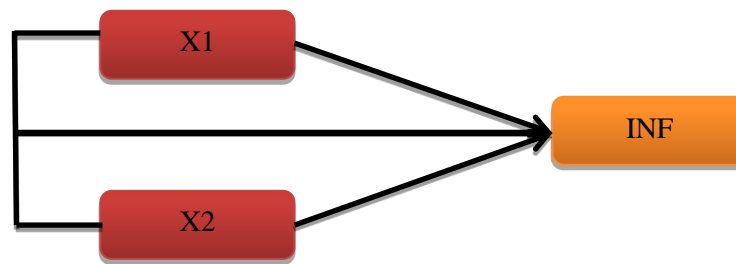
C. KERANGKA KONSEPTUAL



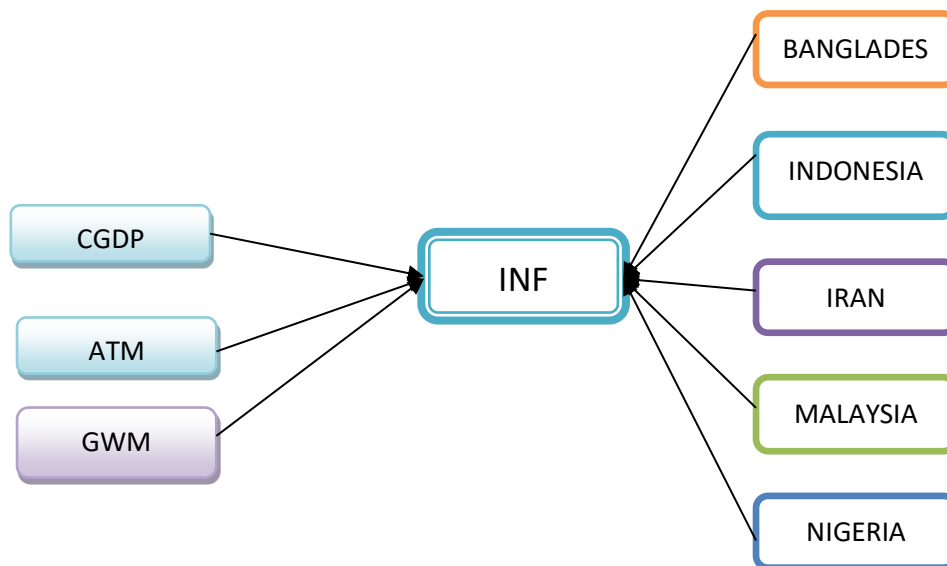
Gambar 2.1. Kerangka konseptual Pengendalian Inflasi berbasis Fintech, Inklusi Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial di D-8 Negara Berkembang



Gambar 2.2. Kerangka Metode *Confirmatory Factor Analysis* (CFA)



Gambar 2.3. Kerangka Metode Regresi Berganda (OLS)



Gambar 2.4. . Kerangka konseptual Panel ARDL .

D. Hipotesis

Teori empirik yang dikemukakan oleh Umar (2008) sebagai berikut :
 Hipotesis adalah suatu proposisi, kondisi atau prinsip untuk sementara waktu dianggap benar dan barangkali tanpa keyakinan supaya bisa ditarik suatu konsekuensi logis dan dengan cara ini kemudian diadakan pengujian tentang kebenarannya dengan menggunakan data empiris hasil penelitian.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- 1 Semua(ATM, SAVING, SB, CREDIT, CGDP, CAR,dan GWM) relevan dalam mempengaruhi INF di Indonesia.
- 2 Variabel yang relevan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap INF di Indonesia.
- 3 Semua negara menjadi pengaruh pengendalian Inflasi terbesar yang berbasis Finansial Teknologi dan Inklusi Keuangan serta Kebijakan Makroprudensial di D-8 Negara Berkembang.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif/kuantitatif. di dukung dengan alat analisis prediksi CFA, Regresi OLS dan Panel ARDL. Materi yang di gunakan dalam penelitian ini berkaitan pada Kebijakan Moneter.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada negara-negara developoing 8 countries yaitu Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, dan Nigeria. Waktu penelitian yang direncanakan mulai September 2019 sampai dengan Januari 2020 dengan rincian waktu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun														
		September, 2019			Desember, 2019			Februari 2020			Mei 2020			Agustus 2020		
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■	■	■												
2	Penyusunan Proposal				■	■	■									
3	Seminar Proposal							■	■	■						
4	Perbaikan Acc Proposal										■	■	■			
5	Pengolahan Data										■	■	■	■	■	■
6	Penyusunan Skripsi													■	■	■
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■
8	Meja Hijau															■

Sumber : penulis (2019)

C. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan pada masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel

NO	VARIABEL	DESKRIPSI	SKALA
1	INFLASI	Kenaikan harga secara umum dan terus menerus.	Rasio
2	CGDP	Rasio kredit swasta dari deposito bank dan lembaga keuangan lain terhadap GDP yang merupakan rasio nilai kredit yang diberikan kepada perbankan dan lembaga keuangan lain untuk pihak swasta terhadap GDP.	Rasio
3	SB	Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu.	Rasio
4	CAR	Selisih lebih antara rasio kecukupan modal (CAR) yang di miliki perbankan dengan persyaratan minimum modal perbankan yang diberlakukan regulator.	Rasio
5	GWM	Simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya di tetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase dari Dana Pihak Ketiga (DPK)	Rasio
6	KREDIT	Jumlah uang pinjaman uang yang di berikan bank kepada nasabah	Rasio
7	SAVING	Jumlah tabungan uang nasabah yang ada di bank	Rasio
8	ATM	<i>Auto Teller Machine</i> , alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek tabungan tanpa dilayani “teller” manusia	Rasio

D. Jenis Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder secara time series yang berasal dari Bank Indonesia dan *World Bank*. <http://www.worldbank.org/http://www.bi.go.id/id/Default.aspx>

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mengolah data dari informasi terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dan diolah dari *Worldbank* dan Bank Indonesia dari tahun 2008-2018 (10 Tahun).

F. Metode Analisis Data

1. *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*

Metode *Confirmatory Factor Analysis* di gunakan bertujuan untuk menemukan suatu cara meringkas informasi yang ada dalam variabel asli (awal) menjadi satu set dimensi baru atau faktor dengan rumus :

$$\mathbf{X_i} = \mathbf{B_{i1} F_1} + \mathbf{B_{i2} F_2} + \mathbf{B_{i3} F_3} + \dots \mathbf{V_{\mu i}}$$

$$\mathbf{X_i} = \mathbf{B_{i1} F_1} + \mathbf{B_{i2} F_2} + \mathbf{B_{i3} F_3} + \mathbf{B_{i4} F_4} + \mathbf{B_{i5} F_5} + \mathbf{B_{i6} F_6} + \mathbf{B_{i7} F_7}$$

$$\text{INF} = \text{B1 ATM} + \text{B2 CREDIT} + \text{B3 SAVING} + \text{B4 SB} + \text{B5 GWM} + \text{B6 CGDP} + \text{B7 CAR.}$$

Keterangan :

X_i = Variabel ke-I yang dibakukan

B_{ij} = Koefisien regresi parsial untuk variabel I pada common factor ke-j

FJ = Common faktor ke-i

V_i = Koefisien regresi yang dibakukan untuk variabel ke-I pada faktor yang unik ke-i

μ_i = faktor unik variabel

2. Regresi Linier Berganda (OLS).

Metode Regresi Linier Berganda bertujuan untuk membuktikan apakah dari faktor yang terpilih berpengaruh signifikan terhadap INF. Dengan rumusan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Regresi Linier Berganda didukung oleh test good ness of fit yaitu :

- a. Uji t (Uji hipotesis Parsial)
- b. Uji f (Uji hipotesis Simultan)
- c. Uji d (Uji determinasi)

Regresi linier berganda dalam penelitian ini, harus memenuhi syarat asumsi klasik yaitu :

- a. Uji Normalitas data.
- b. Uji Multikolinieritas.
- c. Uji Autokorelasi.

3. Regresi Panel ARDL

Dalam penelitian ini menggunakan data panel yaitu dengan menggunakan data antar waktu dan data antar daerah. Regresi panel digunakan untuk mendapatkan hasil estimasi masing-masing karakteristik individu secara terpisah.

Pengujian Regresi Panel dengan rumus:

$$INF_{it} = \alpha + \beta_1 CGDPS_{it} + \beta_2 ATM_{it} + \beta_3 GWM_{it} + \epsilon$$

Berikut rumus panel regression berdasarkan negara :

$$INF_{Bangladesh} = \alpha + \beta_1 CGDPS_{it} + \beta_2 ATM_{it} + \beta_3 GWM_{it} + \epsilon$$

$$INF_{Indonesia} = \alpha + \beta_1 CGDPS_{it} + \beta_2 ATM_{it} + \beta_3 GWM_{it} + \epsilon$$

$$INF_{Iran} = \alpha + \beta_1 CGDPS_{it} + \beta_2 ATM_{it} + \beta_3 GWM_{it} + \epsilon$$

$$INF_{Malaysia} = \alpha + \beta_1 CGDPS_{it} + \beta_2 ATM_{it} + \beta_3 GWM_{it} + \epsilon$$

$$INF_{Nigeria} = \alpha + \beta_1 CGDPS_{it} + \beta_2 ATM_{it} + \beta_3 GWM_{it} + \epsilon$$

Dimana:

INF : Inflasi negara (%)

ATM : Jumlah pengguna ATM (%)

GWM : Jumlah Dana Minimum yang wajib di simpan (%)

CGDP : Rasio Kredit Swasta dari Deposito Bank dan Lembaga Keuangan lain Terhadap GDP (%)

CAR : Jumlah Modal Bank untuk mengurangi resiko bank (%)

ϵ : error term

β : koefisien regresi

α : konstanta

i : jumlah observasi 5 Negara di D-8 Development Countries

t : banyaknya waktu 10 tahun

a. Kriteria Panel ARDL :

Model Panel ARDL yang diterima adalah model yang memiliki lag terkointegrasi, dimana asumsi utamanya adalah nilai coefficient pada Short Run Equation memiliki slope negatif dengan tingkat signifikan 5%. Syarat

Model Panel ARDL : nilainya negatif (-0,597) dan signifikan ($0,012 < 0,05$) maka model diterima.

1). Uji Stasioneritas

Data deret waktu (*time series*) biasanya mempunyai masalah terutama pada stasioner atau tidak stasioner. Bila dilakukan analisis pada data yang tidak stasioner akan menghasilkan hasil regresi yang palsu (*spurious regression*) dan kesimpulan yang diambil kurang bermakna (Enders, 1995). Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah menguji dan membuat data tersebut menjadi stasioner. Uji stasionaritas ini dilakukan untuk melihat apakah data *time series* mengandung akar unit (*unit root*). Untuk itu, metode yang biasa digunakan adalah uji *Dickey-Fuller (DF)* dan uji *Augmented Dickey-Fuller (ADF)*. Data dikatakan stasioner dengan asumsi mean dan variansinya konstan. Dalam melakukan uji stasionaritas alat analisis yang dipakai adalah dengan uji akar unit (*unit root test*). Uji akar unit pertama kali dikembangkan oleh Dickey-Fuller dan dikenal dengan uji akar unit *Dickey-Fuller (DF)*. Ide dasar uji stasionaritas data dengan uji akar unit dapat dijelaskan melalui model berikut:

$$Y_t = \rho Y_{t-1} + e_t \quad (3.1)$$

Dimana: $-1 \leq \rho \leq 1$ dan e_t adalah residual yang bersifat random atau stokastik dengan rata-rata nol, varian yang konstan dan tidak saling berhubungan (*nonautokorelasi*) sebagaimana asumsi metode OLS. Residual yang mempunyai sifat tersebut disebut residual yang *white noise*. Jika nilai $\rho = 1$ maka kita katakan bahwa variabel random (stokastik) Y mempunyai

akar unit (*unit root*). Jika data *time series* mempunyai akar unit maka dikatakan data tersebut bergerak secara random (*random walk*) dan data yang mempunyai sifat *random walk* dikatakan data tidak stasioner. Oleh karena itu jika kita melakukan regresi Y_t pada *lag* Y_{t-1} dan mendapatkan nilai $\rho = 1$ maka dikatakan data tidak stasioner. Inilah ide dasar uji akar unit untuk mengetahui apakah data stasioner atau tidak. Jika persamaan (3.1) tersebut dikurangi kedua sisinya dengan Y_{t-1} maka akan menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y_t - Y_{t-1} = \rho Y_{t-1} - Y_{t-1} + e_t = (\rho - 1)Y_{t-1} + e_t \quad (3.2)$$

Persamaan tersebut dapat ditulis menjadi:

$$\Delta Y_t = \theta \rho Y_{t-1} + e_t \quad (3.3)$$

Didalam prakteknya untuk menguji ada tidaknya masalah akar unit kita mengestimasi persamaan (3.3) daripada persamaan (3.2) dengan menggunakan hipotesis nul $\theta = 0$. jika $\theta = 0$ maka $\rho = 1$ sehingga data Y mengandung akar unit yang berarti data *time series* Y adalah tidak stasioner. Tetapi perlu dicatat bahwa jika $\theta = 0$ maka persamaan persamaan (3.1) dapat ditulis menjadi:

$$\Delta Y_t = e(t) \quad (3.4)$$

karena e_t adalah residual yang mempunyai sifat *white noise*, maka perbedaan atau diferensi pertama (*first difference*) dari data *time series* *random walk* adalah stasioner. Untuk mengetahui masalah akar unit, sesuai dengan persamaan (3.3) dilakukan regresi Y_t dengan Y_{t-1} dan mendapatkan koefisiennya θ . Jika nilai $\theta = 0$ maka kita bisa menyimpulkan bahwa data Y adalah tidak stasioner. Tetapi jika θ negatif maka data Y adalah stasioner.

karena agar θ tidak sama dengan nol maka nilai p harus lebih kecil dari satu. Uji statistik yang digunakan untuk memverifikasi bahwa nilai θ nol atau tidak tabel distribusi normal tidak dapat digunakan karena koefisien θ tidak mengikuti distribusi normal. Sebagai alternatifnya *Dickey- Fuller* telah menunjukkan bahwa dengan hipotesis nul $\theta = 0$, nilai estimasi t dari koefisien Y_{t-1} di dalam persamaan (3.3) akan mengikuti distribusi statistik τ (tau). Distribusi statistik τ kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Mackinnon dan dikenal dengan distribusi statistik Mackinnon.

2). Uji *Cointegrasi Lag*

Dalam menggunakan teknik ko-integrasi, perlu menentukan peraturan ko-integrasi setiap variabel. Bagaimanapun, sebagai mana dinyatakan dalam penelitian terdahulu, perbedaan uji memberi hasil keputusan yang berbeda dan tergantung kepada pra-uji akar unit. Menurut Pesaran dan Shin (1995) dan Pesaran, et al. (2001) memperkenalkan metodologi baru uji untuk ko-integrasi. Pendekatan ini dikenali sebagai prosedur ko-integrasi uji sempadan atau *autoregresi distributed lag* (ARDL). Kelebihan utama pendekatan ini yaitu menghilangkan keperluan untuk variabel-variabel ke dalam $I(1)$ atau $I(0)$. Uji ARDL ini mempunyai tiga langkah. Pertama, kita mengestimasi setiap 6 persamaan dengan menggunakan teknik kuadrat terkecil biasa (OLS). Kedua, kita menghitung uji Wald (statistik F) agar melihat hubungan jangka panjang antara variabel. Uji Wald dapat dilakukan dengan batasan-batasan untuk melihat koefisien jangka panjang. Model Panel ARDL yang diterima adalah model yang memiliki *lag* terkointegrasi, dimana asumsi utamanya adalah nilai coefficient memiliki slope negatif

dengan tingkat signifikan 5%. Syarat Model Panel ARDL : nilainya negatif dan signifikan ($< 0,05$) maka model diterima.

Metode ARDL merupakan salah satu bentuk metode dalam ekonometrika. Metode ini dapat mengestimasi model regresi linear dalam menganalisis hubungan jangka panjang yang melibatkan adanya uji kointegrasi diantara variabel-variabel times series. Metode ARDL pertama kali diperkenalkan oleh Pesaran dan Shin (1997) dengan pendekatan uji kointegrasi dengan pengujian *Bound Test Cointegration*. Metode ARDL memiliki beberapa kelebihan dalam operasionalnya yaitu dapat digunakan pada data short series dan tidak membutuhkan klasifikasi praestimasi variabel sehingga dapat dilakukan pada variabel I(0), I(1) ataupun kombinasi keduanya. Uji kointegrasi dalam metode ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistic dengan nilai F tabel yang telah disusun oleh Pesaran dan Pesaran (1997).

Dengan mengestimasi langkah pertama yang dilakukan dalam pendekatan ARDL *Bound Test* untuk melihat F-statistic yang diperoleh. F-statistic yang diperoleh akan menjelaskan ada atau tidaknya hubungan dalam jangka panjang antara variabel. Hipotesis dalam uji F ini adalah sebagai berikut: $H_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_n = 0$; tidak terdapat hubungan jangka panjang, $H_1 = \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_n \neq 0$; terdapat hubungan jangka panjang, 15 Jika nilai F-statistic yang diperoleh dari hasil komputasi pengujian *Bound Test* lebih besar daripada nilai *upper critical value* I(1) maka tolak H_0 , sehingga dalam model terdapat hubungan jangka panjang atau terdapat kointegrasi, jika nilai F-statistic berada di bawah nilai *lower critical value* I(0) maka

tidak tolak H_0 , sehingga dalam model tidak terdapat hubungan jangka panjang atau tidak terdapat kointegrasi, jika nilai F-statistic berada di antara nilai *upper* dan *lower critical value* maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. Secara umum model ARDL (p,q,r,s) dalam persamaan jangka panjang dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_t = a_0 + a_1 t + \sum_{i=1}^p a_2 Y_{t-i} + \sum_{i=0}^q a_3 X_{1t-i} + \sum_{i=0}^r a_4 X_{2t-i} + \sum_{i=0}^s a_5 X_{3t-i} + et$$

Pendekatan dengan menggunakan model ARDL mensyaratkan adanya *lag* seperti yang ada pada persamaan diatas. Menurut Juanda (2009) *lag* dapat di definisikan sebagai waktu yang diperlukan timbulnya respon (Y) akibat suatu pengaruh (tindakan atau keputusan). Pemilihan *lag* yang tepat untuk model dapat dipilih menggunakan basis *Schawrtz-Bayesian Criteria* (SBC), *Akaike Information Criteria* (AIC) atau menggunakan informasi kriteria yang lain, model yang baik memiliki nilai informasi kriteria yang terkecil. Langkah selanjutnya dalam metode ARDL adalah mengestimasi parameter dalam short run atau jangka pendek. Hal ini dapat dilakukan dengan mengestimasi model dengan *Error Correction Model* (ECM), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari model ARDL kita dapat memperoleh model ECM. Estimasi dengan *Error Correction Model* berdasarkan persamaan jangka panjang diatas adalah sebagai berikut:

$$\Delta Y_t = a_0 + a_1 t + \sum_{i=1}^p \beta_i \Delta Y_{t-i} + \sum_{i=0}^q \gamma_i \Delta X_{1t-i} + \sum_{i=0}^r \delta_i \Delta X_{2t-i} + \sum_{i=0}^s \theta_i \Delta X_{3t-i} + \vartheta ECM_{t-1} + et$$

Di mana ECTt merupakan *Error Correction Term* yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$ECM_t = Y - a_0 - a_{1t} - \sum_{i=1}^p a_2 Y_{t-i} - \sum_{i=0}^q a_3 X_{1t-i} - \sum_{i=0}^r a_4 X_{2t-i} - \sum_{i=0}^s a_5 X_{5t-i}.$$

Hal penting dalam estimasi model ECM adalah bahwa *error correction term* (ECT) harus bernilai negatif, nilai negatif dalam ECT menunjukkan bahwa model yang diestimasi adalah valid. Semua koefisien dalam persamaan jangka pendek di atas merupakan koefisien yang menghubungkan model dinamis dalam jangka pendek konvergen terhadap keseimbangan dan ϑ merepresentasikan kecepatan penyesuaian dari jangka pendek ke keseimbangan jangka panjang. Hal ini memperlihatkan bagaimana ketidakseimbangan akibat *shock* di tahun sebelumnya disesuaikan pada keseimbangan jangka panjang pada tahun ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perkembangan Perekonomian Di Indonesia.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan tingkat inflasi pada 2020 berada pada angka 3% +/- 1% seiring dengan perkembangan inflasi pada 2019. Deputy Gubernur Senior BI menyatakan hal ini seiring dengan permintaan agregat yang terkelola serta pengaruh global yang minimal.

Hal tersebut juga didukung yaitu, dimana tingkat inflasi inti yang terkendali sejalan dengan kapasitas produksi domestik dalam rangka memenuhi permintaan. Distribusi barang dan jasa juga makin membaik seiring dengan pengembangan infrastruktur yang baik sehingga menurunkan biaya logistik dan diikuti oleh menurunnya inflasi.

Prospek inflasi yang rendah juga didukung koordinasi yang erat antara BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah sehingga turut mengendalikan inflasi *volatile food* pada level rendah,". Hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia mencatatkan tingkat inflasi sesuai dengan target yakni 3,5% +/- 1%. Adapun beberapa daerah-daerah yang mengalami tingkat inflasi lebih tinggi dari target inflasi nasional antara lain Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Maluku.

Ketiga daerah tersebut masing-masing mengalami inflasi sebesar 6,3% (yoy), 4,5% (yoy), dan 5,2% (yoy). Per Juli tahun 2019, inflasi indeks harga konsumen (IHK) masih terjaga pada 3,32% (yoy) didorong oleh inflasi inti yang terus terkendali. Inflasi inti tercatat pada angka 3,18%

(yoy) dan inflasi kelompok *administered price* tercatat mencapai 2,22% (yoy). Adapun kelompok inflasi yang masih perlu diwaspadai adalah inflasi kelompok *volatile food* di mana per Juli 2019 tercatat mencapai 4,9% (yoy). *Volatile food* tercatat melambat meski demikian, produk hortikultura terutama cabe merah tetap harus menjadi perhatian (ekonomibisnis.com, 2019).

Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan arah kebijakan moneter untuk ke depannya. Salah satu kebijakan yang akan diputuskan BI yakni kebijakan suku bunga acuan atau BI-7 days repo rate (BI7RR). Pengumuman ini merupakan hasil keputusan dari Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang sudah berlangsung sejak. Sejumlah ekonom pun optimis pada siang ini BI akan kembali memangkas suku bunga acuannya.

Salah satu Ekonom memperkirakan BI akan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,25%. Pemangkasan mempertimbangkan kestabilan harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta perkembangan nilai tukar rupiah. Laju inflasi cenderung stabil di tengah ekspektasi yang cenderung terjangkar dalam target sasaran BI. Adapun target inflasi BI berada di kisaran $3,5 \pm 1\%$ hingga akhir tahun 2019.

Nilai tukar rupiah yang sudah cenderung stabil dalam sebulan terakhir, dengan turunnya volatilitas rupiah secara rata-rata. Penurunan terindikasi dari one-month implied volatility yang turun menjadi 6,4% saat dari rata-rata Agustus yang tercatat sekitar 7,6%. Rupiah secara rata-rata menguat sekitar 1% ke level Rp 14.100 per dolar AS sepanjang bulan September

ini. Terkendalnya laju inflasi dan serta stabilnya nilai tukar rupiah juga ditopang oleh ekspektasi penurunan defisit transaksi berjalan. Hal ini sejalan dengan membaiknya neraca perdagangan sepanjang kuartal III-2019 tahun ini.

Perbaikan defisit transaksi berjalan didorong oleh turunnya laju impor yang lebih besar dibandingkan penurunan laju ekspor. Namun demikian, penurunan laju impor tersebut mengindikasikan bahwa realisasi investasi cenderung stagnan, terutama di tengah tren perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi pertumbuhan permintaan domestik.

Tingkat inflasi yang terkendali, stabilnya nilai tukar rupiah, dan perbaikan defisit transaksi berjalan, maka ruang pelonggaran kebijakan moneter menjadi terbuka. Momentum pelonggaran kebijakan moneter yang bersamaan dengan penurunan suku bunga acuan juga dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Apalagi pada saat di tengah perlambatan ekonomi global, serta ancaman resesi dari beberapa negara maju dan berkembang.

Seyogyanya penurunan suku bunga BI sebesar 25 bps kemungkinan besar bisa saat nya terjadi. Nafan menilai, penurunan ini dapat dipengaruhi oleh salah satunya oleh pergerakan rupiah yang masih stabil. Selain itu, cadangan devisa yang mulai bertambah terus menguatkan optimisme penurunan suku bunga acuan BI. Di sisi lain, bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) juga baru saja menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 bps menjadi 1,75% - 2%. Namun The Fed mengingatkan agar selalu tetap waspada dalam memantau perkembangan geopolitik.

Tak berhenti sampai disitu, Wakil Direktur Institute of Development for Economics and Finance (INDEF) memprediksikan dimana akan ada ruang penurunan suku bunga acuan BI sebesar 0,25% kali ini. Meskipun inflasi sedikit naik menjadi 3,49% secara tahunan dan nilai tukar cenderung stabil jika dibandingkan awal bulan September. Bahwa adanya faktor lain yang menguatkan ruang penurunan yaitu cadangan devisa yang cukup besar. Serta, spread inflasi terhadap bunga acuan 7DRR sekitar 2% (katadata, 2019)

2. Perkembangan Variabel Penelitian

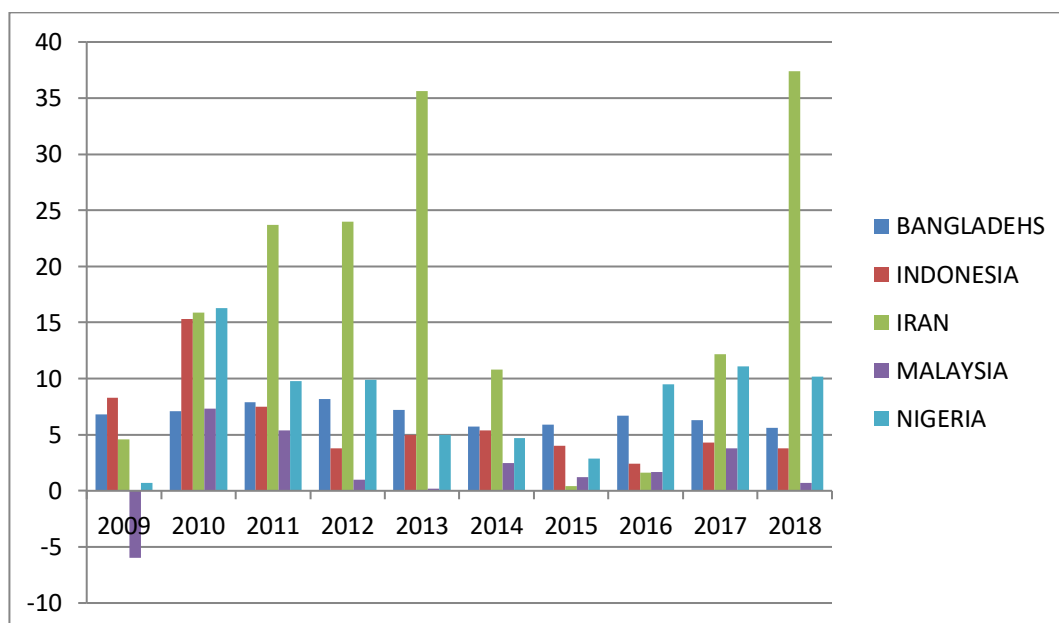
Pada bagian ini penulis akan membahas pertumbuhan di setiap variabel penelitian yang ada sebagai berikut : Rasio kredit swasta dari deposito bank dan lembaga keuangan lain terhadap GDP (CGDP), Kredit, Simpanan (*Saving*), Suku Bunga, Jumlah pengguna ATM, Giro Wajib Minimum (GWM), Kredit, dan *Gross Domestic Product* (GDP), *Capital Aquacy Ratio* (CAR Rasio) dan Inflasi pada negara D-8 Negara Berkembang dari tahun 2009 sampai tahun 2018.

a. Pertumbuhan Tingkat Inflasi

Tabel 4.1 pertumbuhan tingkat Inflasi pada negara D-8 Negara Berkembang Tahun 2009 sampai 2018 (Persen)

NO	TAHUN	Inflasi				
		BANGLADESH	INDONESIA	IRAN	MALAYSIA	NIGERIA
1	2009	6,8	8,3	4,6	-6	0,7
2	2010	7,1	15,3	15,9	7,3	16,3
3	2011	7,9	7,5	23,7	5,4	9,8
4	2012	8,2	3,8	24	1	9,9
5	2013	7,2	5	35,6	0,2	5
6	2014	5,7	5,4	10,8	2,5	4,7
7	2015	5,9	4	0,4	1,2	2,9
8	2016	6,7	2,4	1,6	1,7	9,5
9	2017	6,3	4,3	12,2	3,8	11,1
10	2018	5,6	3,8	37,4	0,7	10,2

Sumber: <http://www.worldbank.org>



Sumber: Tabel 4.1

Gambar 4.1 Grafik Pertumbuhan tingkat Inflasi di negara D-8 Negara Berkembang

Berdasarkan pada tabel 4.1 dan grafik 4.1 pada negara Bangladesh pada tahun 2010 mengalami kenaikan inflasi di banding di tahun sebelum nya. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan inflasi terus menerus hingga tahun 2013, pada tahun 2014 terjadi penurunan tingkat inflasi yang menyebabkan terjadi nya fluktuasi, pada tahun 2015 tingkat inflasi terus mengalami kenaikan yang signifikan hingga tahun 2016, pada tahun 2017 tingkat inflasi kembali turun hingga tahun 2018. Pada negara Indonesia di tahun 2009 ke 2010 terjadi kenaikan inflasi yang cukup tinggi, pada tahun 2011 hingga 2012 terjadi penurunan tingkat inflasi yang mengakibatkan terjadi nya fluktuasi hingga tahun 2018. Pada negara Iran di tahun 2009 hingga 2013 terjadi kenaikan yang cukup tinggi, lalu kembali mengalami penurunan tingkat inflasi dari tahun 2013 hingga 2014, pada tahun 2015 tingkat inflasi di iran di bawah angka 1, lalu terus mengalami kenaikan yang tinggi hingga tahun 2018.

Pada 2009 Malaysia mengalami tingkat inflasi di bawah angka 1, dan mengalami kenaikan pada tahun berikutnya, pada tahun 2011 inflasi mengalami penurunan yang signifikan, lalu pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup besar, pada tahun 2013 tingkat inflasi di Malaysia di bawah angka 1, lalu pada tahun berikutnya kembali mengalami kenaikan hingga tahun 2017, dan tingkat inflasi kembali mengalami penurunan tingkat inflasi hingga di bawah angka 1. Pada Negara Nigeria inflasi pada tingkat di bawah angka 1 persen, dan mengalami kenaikan yang sangat besar pada tahun berikutnya, lalu pada tahun 2011 tingkat inflasi kembali turun, pada tahun berikutnya tingkat inflasi mengalami kenaikan yang signifikan, lalu pada tahun 2013 hingga tahun 2015 tingkat inflasi mengalami penurunan yang signifikan, dan pada tahun 2016

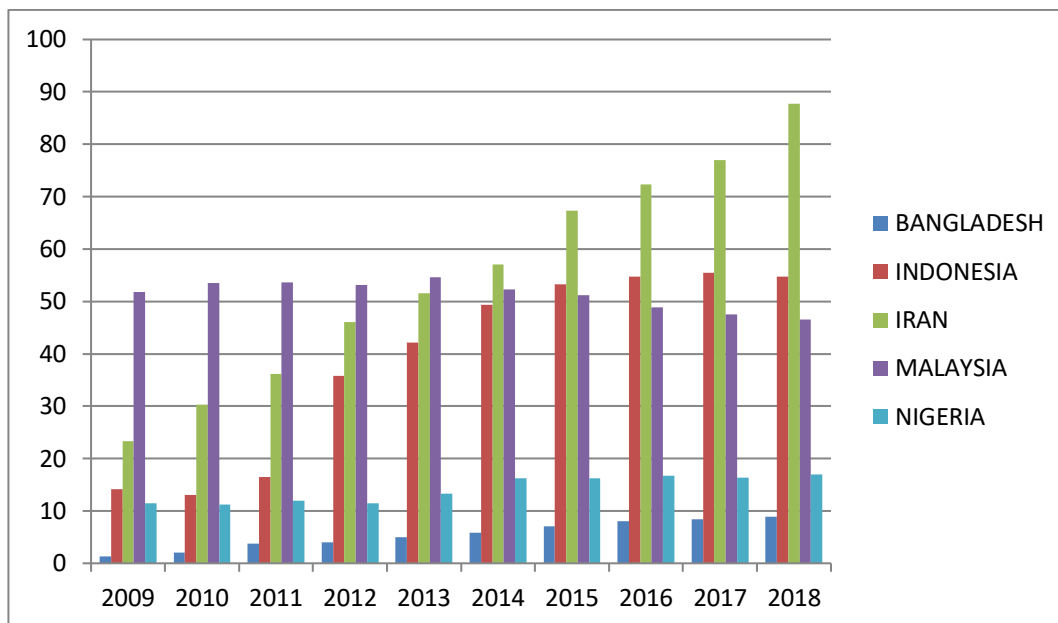
mengalami fluktuasi tingkat inflasi hingga tahun 2018. Terjadinya ketimpangan tingkat inflasi pada negara D-8 Negara Berkembang di tahun 2010 dimana negara Bangladesh yaitu 7,1% dan Malaysia 7,3 memiliki tingkat inflasi yang hampir sama dan disusul oleh negara Indonesia dengan 15,3% dan negara Iran sebesar 15,9% lalu tingkat inflasi tertinggi di negara Nigeria dengan inflasi sebesar 16,3%.

b. Pertumbuhan Pengguna ATM

Tabel 4.2 pertumbuhan pengguna ATM pada negara D-8 Negara Berkembang Tahun 2009 sampai 2018 (100.000 adults)

NO	TAHUN	Pengguna ATM				
		BANGLADESH	INDONESIA	IRAN	MALAYSIA	NIGERIA
1	2009	1,3	14,1	23,3	51,8	11,5
2	2010	2,1	13,1	30,3	53,5	11,2
3	2011	3,7	16,5	36,1	53,6	11,9
4	2012	4,0	35,8	46,0	53,2	11,5
5	2013	5,0	42,2	51,5	54,6	13,3
6	2014	5,8	49,4	57,0	52,3	16,2
7	2015	7,1	53,3	67,3	51,2	16,2
8	2016	8,0	54,7	72,3	48,9	16,7
9	2017	8,4	55,5	77,0	47,5	16,3
10	2018	8,9	54,7	87,7	46,6	16,9

Sumber: <http://www.worldbank.org>



Sumber: Tabel 4.2

Gambar 4.2 Grafik Pertumbuhan Pengguna ATM di negara D-8 Negara Berkembang

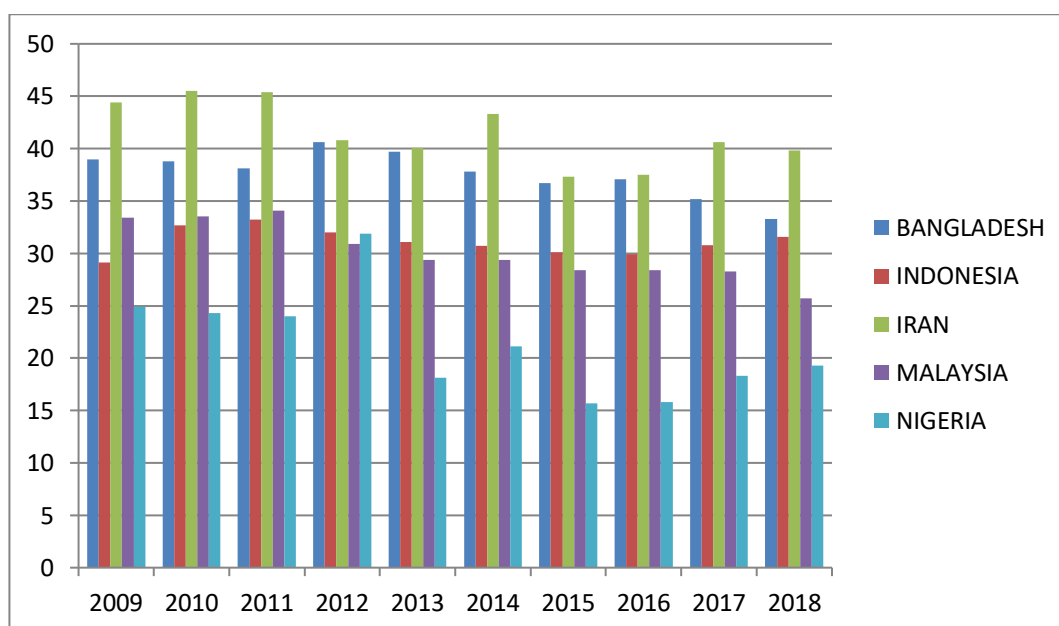
Berdasarkan pada tabel 4.2 dan grafik 4.2 pada negara Bangladesh pada tahun 2010 pengguna ATM mengalami kenaikan di tahun sebelumnya, lalu terus meningkat hingga tahun 2018, peningkatan tersebut di susul oleh beberapa negara berkembang lainnya seperti Indonesia, Iran, Malaysia dan Nigeria dari tahun 2009 hingga tahun 2018. Terjadi ketimpangan jumlah Pengguna ATM di negara D-8 Negara Berkembang pada tahun 2016 dimana negara Bangladesh dengan jumlah pengguna hanya 8% dan di negara Nigeria sebesar 16,7% di susul oleh negara Malaysia dengan jumlah pengguna ATM nya sebesar 48,9%, dan Indonesia sebanyak 54,7% disusul negara Iran dengan jumlah pengguna ATMnya sebesar 72,3%.

c. Pertumbuhan *Saving*

Tabel 4.3 pertumbuhan *Saving* pada negara D-8 Negara Berkembang Tahun 2009 sampai 2018 (Persen)

NO	TAHUN	SAVING				
		BANGLADESH	INDONESIA	IRAN	MALAYSIA	NIGERIA
1	2009	39	29,1	44,4	33,4	24,9
2	2010	38,8	32,7	45,5	33,5	24,3
3	2011	38,1	33,2	45,4	34,1	24
4	2012	40,6	32	40,8	30,9	31,9
5	2013	39,7	31,1	40,1	29,4	18,1
6	2014	37,8	30,7	43,3	29,4	21,1
7	2015	36,7	30,1	37,3	28,4	15,7
8	2016	37,1	29,9	37,5	28,4	15,8
9	2017	35,2	30,8	40,6	28,3	18,3
10	2018	33,3	31,6	39,8	25,7	19,3

Sumber: <http://www.worldbank.org>



Sumber: Tabel 4.3

Gambar 4.3 Grafik Pertumbuhan *Saving* di negara D-8 Negara Berkembang

Di negara Bangladesh pada tahun 2009 hingga tahun 2011, pertumbuhan *saving* turun secara signifikan, lalu pada tahun 2012 mengalami kenaikan, dan mengalami penurunan hingga tahun 2015, pada tahun 2016 pertumbuhan *saving* di

negara Bangladesh kembali naik secara signifikan dan di tahun 2017 hingga 2018 kembali turun. Di Indonesia tingkat *saving* dari tahun 2009 mengalami kenaikan hingga tahun 2011, dan di tahun 2012 hingga 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan, di tahun 2017 hingga 2018 pertumbuhan *saving* terus naik. Di negara Iran pertumbuhan *saving* di tahun 2009 hingga tahun 2010 mengalami kenaikan, dan di tahun berikutnya terjadi fluktuasi di mana di tahun 2011 pertumbuhan *saving* menurun hingga tahun 2013, pada tahun 2014 pertumbuhan *saving* meningkat cukup signifikan, lalu di tahun 2015 terjadi fluktuasi hingga tahun 2018.

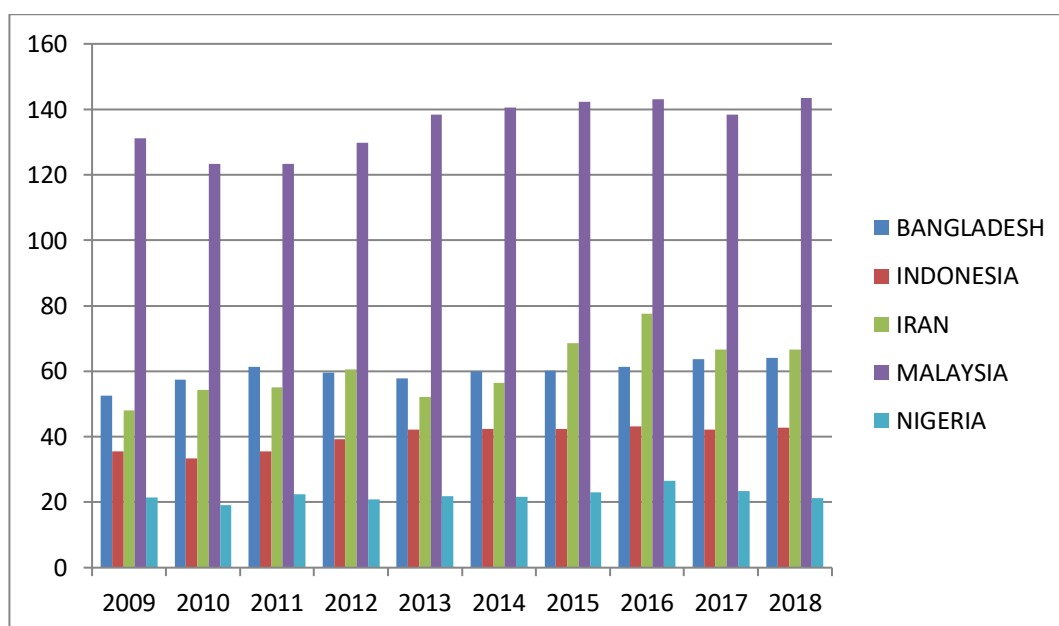
Pada tahun 2009 Malaysia mengalami kenaikan pertumbuhan *saving* hingga tahun 2011, pada tahun 2012 hingga di tahun 2018 terus terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan *saving* di negara tersebut. Di negara Nigeria sendiri, pada tahun 2009 hingga 2011 terjadi penurunan *saving* dan meningkat pada tahun 2012, terjadi nya fluktuasi dari tahun 2013 dan di 2014, lalu pada tahun 2015 pertumbuhan *saving* kembali turun secara signifikan, hingga di tahun 2016 hingga 2018 terus mengalami kenaikan pertumbuhan *saving* di negara tersebut. Terjadi di ketimpangan tingkat *saving* di negara D-8 Negara Berkembang dimana pada tahun 2012 negara Malaysia memiliki persentase *saving* terendah yaitu 30,9%, di negara Nigeria sebesar 31,9% hampir sama dengan Indonesia sebesar 32% di susul Bangladesh 40,6% dan Iran sebesar 40,8%.

d. Pertumbuhan *Credit*

Tabel 4.4 pertumbuhan *Credit* pada negara D-8 Negara Berkembang Tahun 2009 sampai 2018 (Persen)

NO	TAHUN	<i>Credit</i>				
		BANGLADESH	INDONESIA	IRAN	MALAYSIA	NIGERIA
1	2009	52,6	35,6	48	131,1	21,5
2	2010	57,4	33,3	54,2	123,3	19,1
3	2011	61,3	35,6	55	123,4	22,4
4	2012	59,5	39,3	60,5	129,8	20,9
5	2013	57,9	42,1	52,1	138,4	21,9
6	2014	60	42,4	56,5	140,6	21,6
7	2015	60,2	42,4	68,5	142,4	23,1
8	2016	61,4	43,1	77,6	143	26,6
9	2017	63,7	42,1	66,6	138,4	23,3
10	2018	64,1	42,8	66,6	143,5	21,2

Sumber: <http://www.worldbank.org>



Sumber: Tabel 4.4

Gambar 4.4 Grafik Pertumbuhan Credit di negara D-8 Negara Berkembang

Pada negara Bangladesh di tahun 2009 hingga tahun 2011 terjadi kenaikan kredit, lalu pada tahun 2012 kredit di Bangladesh mengalami penurunan yang signifikan hingga tahun 2013, di tahun 2014 hingga 2018 jumlah persentas kredit

terus meningkat. Di Indonesia pada tahun 2009 hingga 2010 terjadinya penurunan kredit dan naik kembali pada tahun 2011 hingga tahun 2016, dan terjadi penurunan persentase jumlah kredit pada tahun 2017 dan naik kembali pada tahun berikutnya. Pada negara Iran di tahun 2009 hingga tahun 2012 terjadi kenaikan persentase kredit yang cukup tinggi, lalu terjadi penurunan pada tahun 2013, di tahun berikutnya hingga tahun 2016 persentase kredit mengalami kenaikan dan kemudian pada tahun 2017 kembali turun dan tahun sebelumnya mengalami persentase kredit pada nilai yang sama.

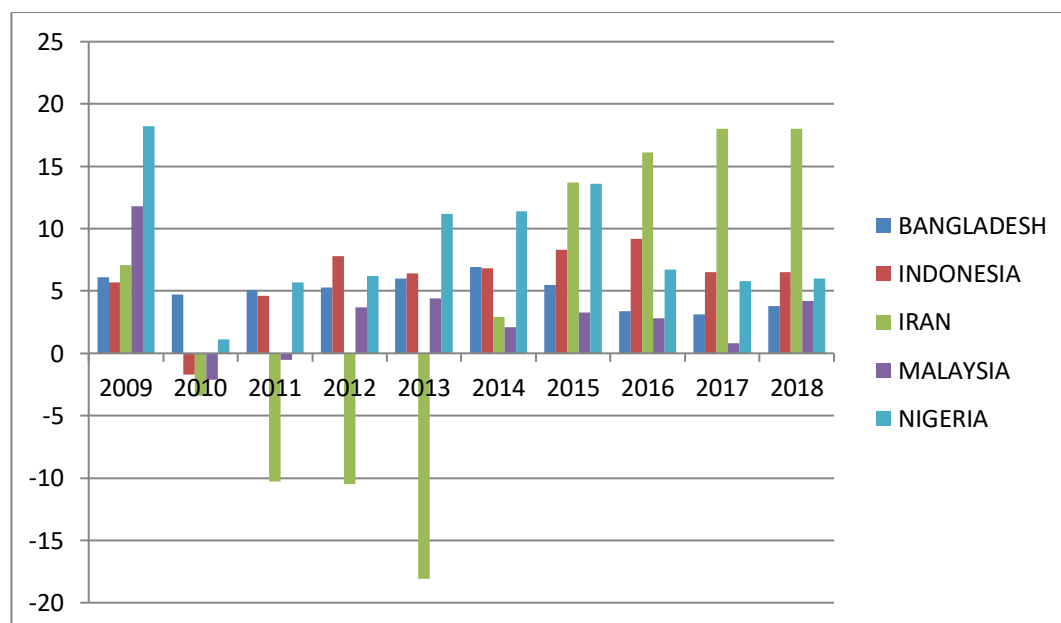
Di negara Malaysia sendiri persentase kredit mengalami fluktuasi hingga tahun 2012, dan di tahun 2013 hingga tahun 2016 persentase kredit di negara Malaysia kembali naik, dan turun pada tahun 2017 dan persentase pertumbuhan jumlah kredit pada tahun berikutnya kembali naik. Pada tahun 2009 di negara Nigeria persentase jumlah kredit mengalami fluktuasi dimana di tahun 2010 mengalami penurunan persentase jumlah kredit dan kembali naik pada tahun berikutnya, di tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami fluktuasi persentase jumlah kredit, dan tahun 2017 kembali naik cukup signifikan, lalu di tahun berikutnya persentase jumlah kredit mengalami penurunan kembali. Terjadi ketimpangan yang tinggi antara negara Nigeria dan Indonesia dengan negara Malaysia, Bangladesh dan Iran, di mana negara Nigeria memiliki persentase terkecil sebesar 32,1% di susul oleh Indonesia sebesar 42,2%, Sedangkan Bangladesh pada angka 60,2% di susul negara Iran yang sebesar 68,5% dan persentase terbesar yaitu Malaysia sebesar 142,4%.

e. Pertumbuhan Suku Bunga

Tabel 4.5 pertumbuhan Suku Bunga pada negara D-8 Negara Berkembang Tahun 2009 sampai 2018 (Persen)

NO	TAHUN	Suku Bunga				
		BANGLADESH	INDONESIA	IRAN	MALAYSIA	NIGERIA
1	2009	6,1	5,7	7,1	11,8	18,2
2	2010	4,7	-1,7	-3,4	-2,1	1,1
3	2011	5,1	4,6	-10,3	-0,5	5,7
4	2012	5,3	7,8	-10,5	3,7	6,2
5	2013	6	6,4	-18,1	4,4	11,2
6	2014	6,9	6,8	2,9	2,1	11,4
7	2015	5,5	8,3	13,7	3,3	13,6
8	2016	3,4	9,2	16,1	2,8	6,7
9	2017	3,1	6,5	18	0,8	5,8
10	2018	3,8	6,5	18	4,2	6

Sumber: <http://www.worldbank.org>



Sumber: Tabel 4.5

Gambar 4.5 Grafik Pertumbuhan Suku bunga di negara D-8 Negara Berkembang

Di negara Bangladesh pada tahun 2009, tingkat suku bunga mengalami fluktuasi hingga tahun 2013, di tahun 2014 tingkat suku bunga di negara tersebut

kembali naik secara signifikan, dan di tahun berikutnya tingkat suku bunga terus turun hingga tahun 2017, dan kembali naik pada tahun berikutnya. Di negara Indonesia sendiri tingkat suku bunga pada tahun 2009 menuju tahun 2010 menurun hingga mencapai di bawah angka 1 atau negatif, dan tingkat suku Bunga kembali naik hingga tahun 2012, di tahun berikutnya suku bunga kembali menurun, pada tahun 2014 tingkat suku bunga terus menaik hingga tahun 2016 dan kembali turun pada tahun berikutnya dan di tahun 2018 suku bunga pada angka yang sama dengan tahun sebelumnya. Di negara Iran pada tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami penurunan tingkat suku bunga yang sangat besar sampai di bawah angka satu atau negatif, pada tahun 2014 angka tingkat tersebut terus menerut naik hingga tahun 2018.

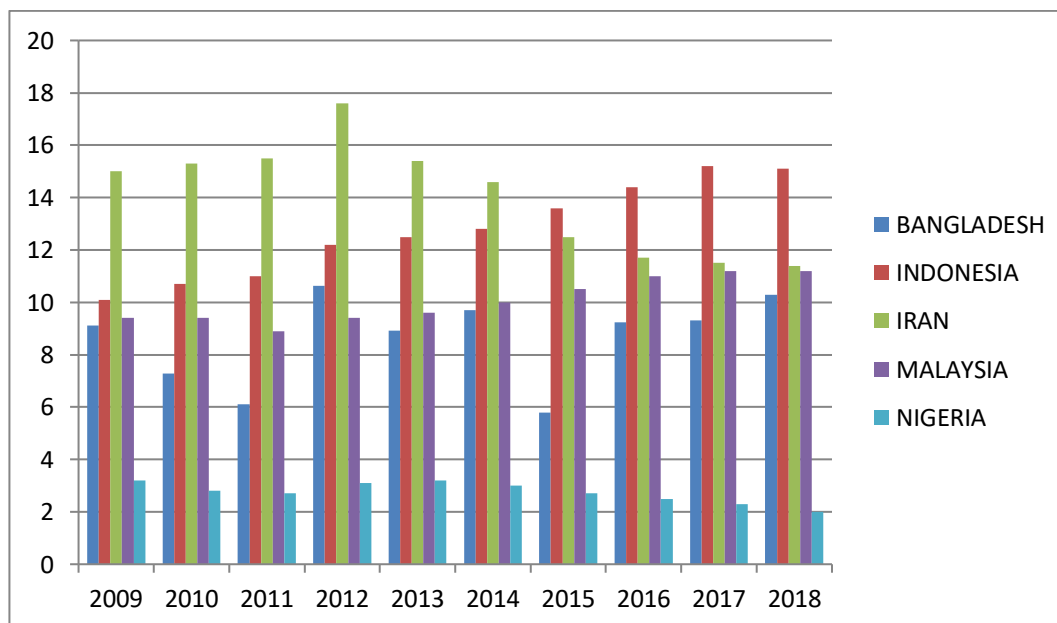
Di negara Malaysia pada tahun 2009 hingga taun 2011 mengalami penurunan tingkat suku bunga hingga di bawah angka 1 atau negatif, dan pada tahun berikutnya terus naik hingga 2013, terjadi fluktuasi tingkat suku bunga dari tahun 2014 hingga 2017 dan pada tahun berikutnya tingkat suku kembali naik. Di negara Nigeria tingkat suku bunga dari 2009 hingga tahun 2011 terus turun dan kembali terus naik dari tahun 2012 hingga tahun 2015, pada saat tahun 2016 tingkat suku bunga di negara tersebut kembali turun, dan mengalami fluktuasi hingga tahun 2018. Terjadi ketimpangan antara negara Iran dan Malaysia dengan negara Bangladesh, Indonesia dan Nigeria dimana negara Iran dengan persentasi terendah sebesar -18,1% dan Malaysia 4,4% sedangkan negara Bangladesh di mana tingkat suku Bungan mencapai 6% di susul oleh negara Indonesia dengan nilai tingkat suku Bungan 6,4% dan Nigeria dengan tingkat suku bunga 11,2%.

f. Pertumbuhan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Tabel 4.6 *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada D-8 Negara Berkembang Tahun 2009 sampai 2018 (Persen)

NO	TAHUN	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)				
		BANGLADESH	INDONESIA	IRAN	MALAYSIA	NIGERIA
1	2009	9,12	10,1	15	9,4	3,2
2	2010	7,27	10,7	15,3	9,4	2,8
3	2011	6,12	11	15,5	8,9	2,7
4	2012	10,63	12,2	17,6	9,4	3,1
5	2013	8,93	12,5	15,4	9,6	3,2
6	2014	9,69	12,8	14,6	10	3
7	2015	5,79	13,6	12,5	10,5	2,7
8	2016	9,23	14,4	11,7	11	2,5
9	2017	9,31	15,2	11,5	11,2	2,3
10	2018	10,3	15,1	11,4	11,2	2

Sumber: <http://www.worldbank.org>



Sumber: Tabel 4.6

Gambar 4.6 Grafik Pertumbuhan Capital Adequacy Ratio (CAR) di negara D-8 Negara Berkembang

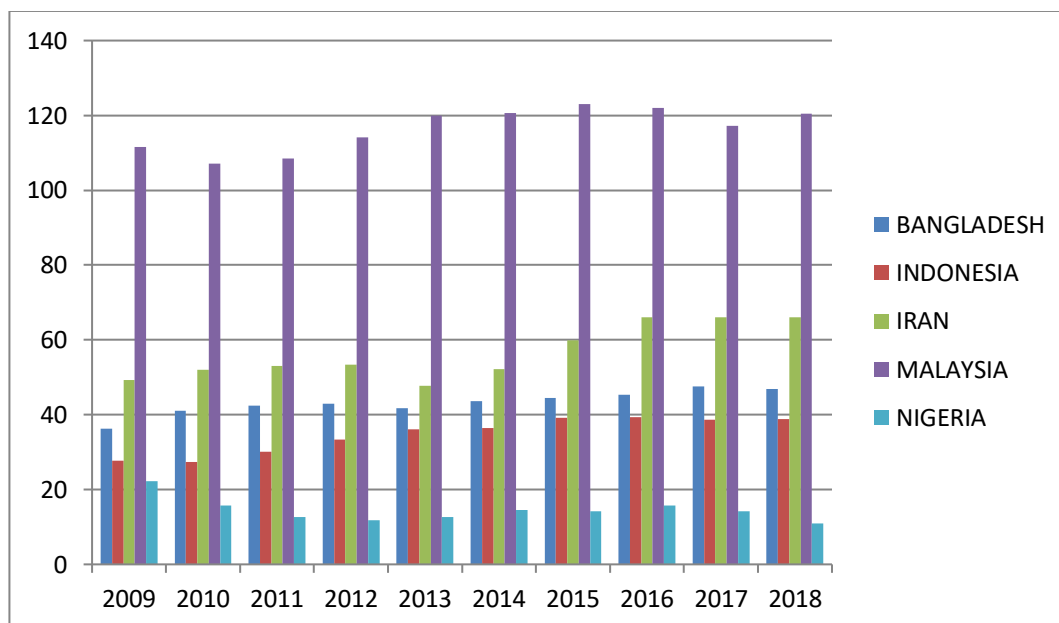
Pada negara Bangladesh di tahun 2009 hingga tahun di tahun 2011 tingkat pertumbuhan CAR terjadi penurunan yang cukup signifikan, dan kembali naik di tahun 2012, pada tahun berikut terjadi fluktuasi hingga tahun 2015, dan pertumbuhan terus naik pada tahun 2016 hingga tahun 2018, di negara Indonesia pertumbuhan CAR pada tahun 2009 hingga di tahun 2017 terus mengalami kenaikan, dan pertumbuhan CAR di tahun berikutnya kembali turun. Negara Iran pada pertumbuhan CAR di tahun 2009 hingga tahun 2012 mengalami kenaikan, lalu pada tahun berikutnya terus turun hingga sampai tahun 2018. Di negara Malaysia pada tahun 2009 dan 2010 mengalami nilai yang tetap dan di tahun 2011 turun secara signifikan, pada tahun berikutnya hingga tahun 2018 pertumbuhan CAR terus naik secara signifikan. Di negara Nigeria sendiri pertumbuhan CAR pada tahun 2009 hingga tahun 2011 menurun, di tahun 2013 hingga di tahun 2014 terjadi fluktuasi yaitu kenaikan pertumbuhan CAR dan terus turun hingga tahun 2018. Terjadi ketimpangan di negara D-8 Negara Berkembang di tahun 2015 Nigeria memiliki pertumbuhan *Capital Aquacy Ratio* (CAR) sebesar 2,7% dan di susul oleh negara Nigeria dengan pertumbuhan *Capital Aquacy Ratio* (CAR) sebesar 5,79%, pada negara Malaysia memiliki pertumbuhan *Capital Aquacy Ratio* (CAR) sebesar 10,5%, sedangkan di negara Iran memiliki pertumbuhan *Capital Aquacy Ratio* (CAR) 12,5% dan Indonesia sebesar 13,6%.

g. **Pertumbuhan Rasio kredit swasta dari Deposito Bank dan Lembaga Keuangan Lain Terhadap GDP (CGDP)**

Tabel 4.7 Rasio Kredit Swasta dari Deposito Bank dan Lembaga Keuangan lain Terhadap GDP (CGDP) pada negara D-8 Negara Berkembang Tahun 2009 sampai 2018 (Persen)

NO	TAHUN	Rasio Rredit Rwasta dari Deposito Bank dan Lembaga Keuangan Lain Terhadap GDP				
		BANGLADESH	INDONESIA	IRAN	MALAYSIA	NIGERIA
1	2009	36,2	27,7	49,2	111,6	22,3
2	2010	41	27,3	52	107,1	15,7
3	2011	42,5	30,1	53,1	108,4	12,6
4	2012	43	33,4	53,4	114,1	11,8
5	2013	41,8	36,1	47,7	119,9	12,6
6	2014	43,7	36,4	52,1	120,6	14,6
7	2015	44,4	39,1	59,8	123,1	14,2
8	2016	45,3	39,4	66,1	122	15,7
9	2017	47,6	38,7	66,1	117,2	14,2
10	2018	46,9	38,8	66,1	120,4	10,9

Sumber: <http://www.worldbank.org>



Sumber: Tabel 4.7

Gambar 4.7 Grafik Pertumbuhan Rasio Kredit Swasta Dari Deposito Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Terhadap GDP (CGDP) di negara D-8 Negara Berkembang

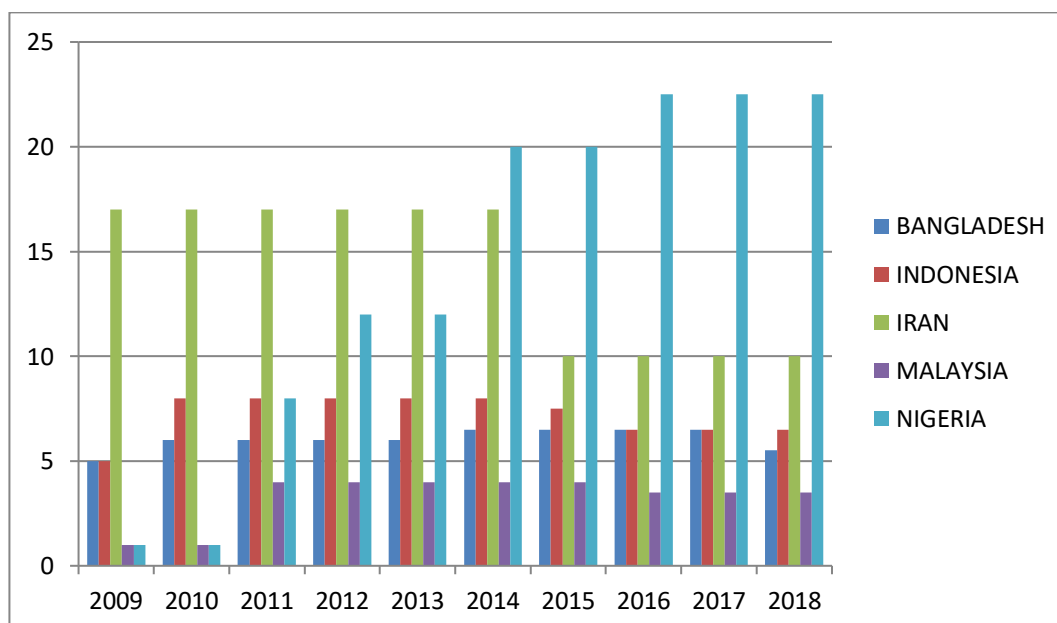
Pada negara Bangladesh di tahun 2009 hingga 2012 tingkat CGDP di negara tersebut terus meningkat, pada tahun 2013 hingga tahun 2018 pertumbuhan CGDP di negara Bangladesh terus meningkat. Di negara Indonesia dari tahun 2009 hingga tahun 2018 pertumbuhan CGDP di negara Indonesia terus mengalami kenaikan, sama halnya di negara Iran pertumbuhan CGDP terlihat jelas bahwa dari tahun 2009 hingga tahun 2016 terus mengalami kenaikan, dan di tahun 2017 dan 2018 pada tingkat pertumbuhan yang sama. Di negara Malaysia dari tahun 2009 hingga tahun 2012 mengalami penurunan tingkat CGDP, dan terus naik pada tahun 2013 hingga tahun 2015, dan terjadi penurunan tingkat CGDP di 2016 hingga tahun 2017 dan kembali naik di tahun 2018. Di negara Nigeria di tahun 2009 hingga tahun 2012 terus mengalami penurunan tingkat CGDP, di tahun 2014 tingkat CGDP mulai naik hingga tahun 2016, dan di tahun selanjutnya pertumbuhan CGDP kembali menurun hingga di tahun 2018. Terjadinya ketimpangan tingkat CGDP di negara Nigeria dan Indonesia dengan negara Bangladesh, Iran dan Malaysia, dimana Nigeria dengan persentase 10,9% dan Indonesia sebesar 38,8%, sedangkan di negara Bangladesh dengan persentase sebesar 46,9% di susul oleh negara Iran sebesar 66,1% dan Malaysia sebesar 120,4%.

h. Pertumbuhan Giro Wajib Minimum(GWM)

Tabel 4.8 Giro Wajib Minimum(GWM) pada negara pada negara D-8 Negara Berkembang Tahun 2009 sampai 2018 (Persen)

NO	TAHUN	Giro Wajib Minimum (GWM)				
		BANGLADESH	INDONESIA	IRAN	MALAYSIA	NIGERIA
1	2009	5	5	17	1	1
2	2010	6	8	17	1	1
3	2011	6	8	17	4	8
4	2012	6	8	17	4	12
5	2013	6	8	17	4	12
6	2014	6,5	8	17	4	20
7	2015	6,5	7,5	10	4	20
8	2016	6,5	6,5	10	3,5	22,5
9	2017	6,5	6,5	10	3,5	22,5
10	2018	5,5	6,5	10	3,5	22,5

Sumber: <http://www.worldbank.org>



Sumber: Tabel 4.8

Gambar 4.8 Grafik Pertumbuhan Giro Wajib Minimum (GWM) di Negara D-8 Negara Berkembang.

Pada negara Bangladesh pertumbuhan tingkat GWM dari tahun 2009 hingga tahun 2017, dan turun di tahun 2018. Di negara Indonesia tingkat GWM

mengalami kenaikan dari tahun 2009 hingga tahun 2015 dan tingkat GWM tersebut turun pada tahun berikutnya dan diangka yang sama hingga tahun 2018. Di negara Iran dari tahun 2009 hingga 2014 tetap berada pada angka yang sama dan kembali turun pada tahun berikutnya hingga sampai tahun 2018. Pada negara Malaysia tingkat GWM tumbuh dari tahun 2009 hingga 2015, dan kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 pada angka yang sama. Pada negara Nigeria dari tahun 2009 hingga 2018 terus mengalami kenaikan tingkat GWM. Terjadi ketimpangan di negara D-8 Negara Berkembang di tahun 2013 dimana negara Iran dengan persentase 17% di susul negara Nigeria sebesar 12%, dan Indonesia 8% dan terendah yaitu Bangladesh dan Malaysia, Bangladesh sebesar 6% dan Malaysia sebesar 4%.

3. Hasil Interpretasi (Indonesia).

A. Interpretasi Hasil CFA

Untuk menganalisis data hasil penelitian maka penelitian melakukan dan menerapkan teknik analisis kuantitatif yaitu dengan mengolah data kemudian diinterpretasikan sehingga akan di peroleh gambaran yang sebenarnya tentang masalah yang di teliti. Selanjutnya di lakukan analisi faktor yang bertujuan untuk menemukan suatu cara meringkas informasi yang ada dalam variable asli (awal) menjadi 1 set dimensi baru atau variable (faktor) . Pengolahan data menggunakan Program SPSS, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.9 : KMO and Bartlett's Test

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.452
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	88.176
	df	21
	Sig.	.000

Metode yang di gunakan dalam analisis faktor ini yaitu metode Komponen Utama. Dari tabel KMO and *Barletts's Test*, di dapat nilai *Kaiser Mayer Olkin (KMO)* sebesar 0,452 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,5. Nilai ini membuktikan data sudah tidak valid untuk di analisis lebih lanjut dengan analisis faktor. Nilai Uji *Barlett's Test* sebesar 88,176 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 di bawah 5%, maka matriks korelasi yangn terbentuk merupakan matriks identitas, atau dengan kata lain model faktor yang di gunakan sudah baik.

Selanjutnya untuk melihat variable mana yang memiliki nilai *communalities correlation* di atas atau di bawah 0,5 atau di atas 50% dapat di lihat pada tabel *communalities* berikut ini :

Tabel 4.10: Communalities

Communalities		
	Initial	Extraction
atm	1.000	.981
saving	1.000	.876
sb	1.000	.716
credit	1.000	.971
car	1.000	.855
cgdp	1.000	.989
gwm	1.000	.846

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

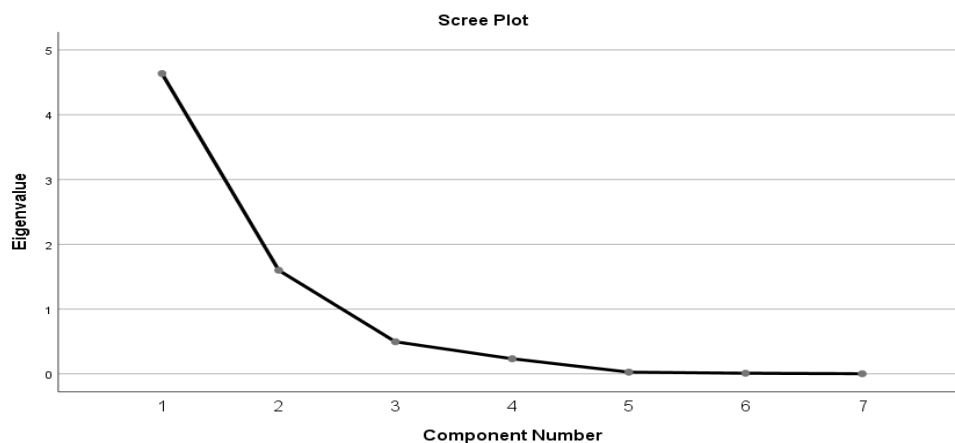
Hasil analisis data menunjukkan semakin besar *communalities* sebuah variabel, yang berarti bahwa semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Tabel communalities menunjukkan hasil *extraction* secara individu terdapat tujuh variabel yang memiliki kontribusi yang melebihi 0,5 atau diatas 50% yaitu : ATM, SAVING, SB, CREDIT, CAR, CGDP, dan GWM.

Tabel 4.11 : Total Variance Explained

Component	Total Variance Explained								
	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4.636	66.231	66.231	4.636	66.231	66.231	4.400	62.856	62.856
2	1.599	22.840	89.070	1.599	22.840	89.070	1.835	26.215	89.070
3	.495	7.071	96.141						
4	.233	3.332	99.473						
5	.026	.375	99.848						
6	.009	.134	99.981						
7	.001	.019	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Berdasarkan hasil total *Variance explained* pada tabel intial *Eigenvalues*, diketahui bahwa hanya ada 2 komponen variabel yang menjadi faktor mempengaruhi Inflasi. *Eigenvalues* menunjukkan kepentingan *relative* masing-masing faktor dalam menghitung varians ke 7 variabel yang di analisis. Dari tabel di atas bahwa hanya ada 2 faktor yang terbentuk. Karena kedua faktor tersebut memiliki nilai total angka *Eigenvalues* diatas 1 yakni : 4.636 untuk faktor 1 dan 1.599 untuk faktor 2. Hal ini menunjukkan bahwa dua faktor adalah paling bagus untuk meringkas tujuh variabel tersebut, sehingga proses *factoring* berhenti pada 2 faktor saja yang akan ikut dalam analisis selanjutnya.



Gambar Grafik 4.9 : Scree Plot

Dari gambar scree plot diatas terlihat bahwa dari faktor 1 ke 2 arah grafik menurun tajam namun masih berada diatas angka 1, faktor 2, ke 3 dan seterusnya juga menurun dan sudah berada di bawah angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa 2 faktor adalah paling bagus untuk meringkas ke 7 variabel tersebut.

Tabel 4.12: Component Matrix

	Component	
	1	2
atm	.971	.196
saving	-.522	.777
sb	.826	-.185
credit	.975	.144
car	.899	.217
cgdp	.970	.219
gwm	-.200	.898

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Setelah diketahui bahwa dua faktor adalah jumlah yang paling optimal, maka dapat dilihat dalam tabel Component Matrix menunjukkan distribusi dari tujuh variabel pada dua faktor yang terbentuk. Sedangkan, angka-angka yang ada pada tabel tersebut adalah faktor *loadings*, yang menunjukkan besar korelasi antar suatu variabel dengan faktor 1 dan faktor 2. Proses penentuan variabel mana akan masuk ke faktor yang mana, dilakukan dengan melakukan perbandingan besar korelasi pada tiap baris. Pada tabel *Component Matrix* menunjukkan korelasi di atas 0,5 pada komponen 1 adalah ATM, SB, CREDIT, CAR, CGDP. Pada komponen 2 yaitu SAVING dan GWM.

Selanjutnya melakukan proses faktor rotation terhadap faktor yang terbentuk. Tujuan rotasi untuk memperjelas variabel yang masuk ke dalam faktor tertentu.

Tabel 4.13 : Rotated Component Matrix

	Component	
	1	2
atm	.987	-.083
saving	-.284	.892
sb	.741	-.408
credit	.976	-.134
car	.924	-.042
cgdp	.993	-.060
gwm	.059	.918

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with

Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Matrix hasil dari rotasi (*Rotated Component Matrix*) memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Terlihat bahwa Faktor Loadings yang dulunya kecil semakin di perkecil dan yang besar semakin di perbesar.

Berdasarkan hasil nilai component matrix diketahui bahwa dari 7 faktor maka yang layak mempengaruhi Inflasi adalah 2 faktor yang berasal dari :

- Komponen 1 terbesar : CGDP
- Komponen 2 terbesar : GWM.

Tabel 4.14 : Component Transformation Matrix

Component Transformation Matrix		
Component	1	2
1	.960	-.279
2	.279	.960

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser

Normalization.

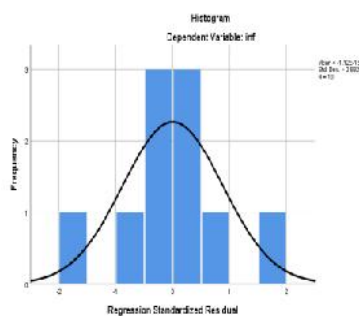
Dari tabel component transformation matrix terlihat angka angka yang ada pada diagonal, antara *component 1* dengan 1 serta *component 2* dengan 2. Terlihat kedua angka jauh di atas 0,5 . Hal ini membuktikan kedua faktor (*component*) yang terbentuk sudah tepat, karenal mempunyai korelasi yang tinggi.

Setelah diketahui bahwa dari 7 faktor maka yang layak mempengaruhi Inflasi adalah 2 faktor yang berasal dari CGDP dan GWM, sehingga terbentuklah set dimensi baru model Persamaan OLS yaitu Regresi Linier Berganda.

1. Uji Asumsi Klasik.

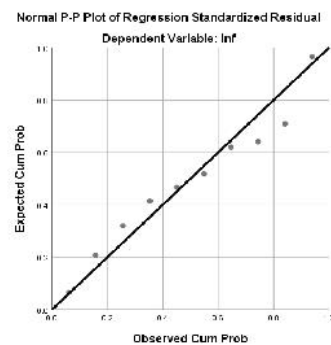
a. Uji Normalitas Data.

Sebelum dilakuksn pengolahan daya dengan menggunakan uji regresi, terlebih dahulu di lakukan uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk menganalisis apakah syarat persamaan regresi sudah di penuhi atau belum. Output dari uji normalitas data adalah berupa gambar visual yang menunjukkan jauh-dekatnya titik-titik pada gampar tersebut dengan garis diagonal.



Gambar 4.10

Uji Normalitas Data



Gambar 4.11

Uji Normalitas JB Test

Dari gambar di atas menunjukkan dappat di jelaskan bahwa hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi normal, dimana gambar histogram memiliki kecem seimbang di tengah, kemudian pada gambar PP plot terlihat titik-titik berada dalam garis diagonal. Dengan melihat tampilan grafik histogram dapat disimpulkan bahwa pola distribusi data adalah normal. Kemudian pada grafik normal plot terlihat titik sebaran data normal. Normalitas data dilakukan dengan mentransformasi data kedalam data logaritma agar data menunjukkan pergerakan yang tidak terlalu berbeda dengan tahun sebelumnya.

b. Uji Multikorelitas

Multikorelitas adalah suatu keadaan dimana variabel lain (independen) saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Persamaan regresi berganda yang baik adalah persamaan yang bebas dari adanya multikorelitas antar variabel independen. Alat ukur yang sering di gunakan untuk mengukut ada tidaknya variabel yang berkorelasi, maka di gunakan uji atau deteksi VIF (*Variabel Inflation Factor*) > 5 .

Tabel 4.15 : Uji Multikorelitas

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)					
	Cgdp	-.829	-.837	-.828	1.000	1.000
	Gwm	.150	.255	.142	1.000	1.000
a. Dependent Variable: inf						

Nilai Tolerance CGDP $1.000 > 0,5$ dan VIF $1.000 < 5$

Nilai Tolerance GWM $1.000 > 0,5$ dan VIF $1.000 < 5$

Maka data dinyatakan terbebas dari masalah Multikolinieritas.

c. Uji Auto Korelasi

Tabel 4.16 : Uji auto korelasi

Model Summary ^b							
Model	R	Change Statistics					Durbin-Watson
		R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.841 a	.708	8.478	2	7	.013	2.134
a. Predictors: (Constant), gwm, cgdp							
b. Dependent Variable: inf							

Nilai DW sebesar 2.134 berada diantara 1-3 maka data dinyatakan terbebas dari masalah autokorelasi.

2. Interpretasi Hasil Analisis Data Regresi Linier Berganda.

Model analisis data yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh CGDP dan GWM terhadap nilai INF adalah model ekonometrik dengan teknik analisis menggunakan model kuadrat terkecil biasa. Model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu$$

$$Y = \text{INF}$$

$$a = \text{Intercept}$$

$$\beta_1, \beta_2 = \text{Koefisien Regresi}$$

$$X_1 = \text{CGDP}$$

$$X_2 = \text{GWM}$$

$$\mu = \text{Kesalahan Pengganggu/ Error Term}$$

Tabel 4.17 : Output Regresi Linier Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.667	7.729		3.192	.015
	Cgdp	-.645	.159	-.828	-4.052	.005
	Gwm	.514	.737	.142	.697	.508
a. Dependent Variable: inf						

Dari output SPSS table coefficient maka persamaan regresinya adalah

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

$$Y = 24.667 + (-0.645)x_1 + 0.514 + e$$

$$INF = 24.667 - (-0.645)CGDP + 0.514GWM + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah :

1. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel independent dianggap konstan maka nilai INF (Y) naik sebesar 24.667%
2. Jika segala terjadi penambahan aktivitas CGDP sebesar 1 persen (%) maka INF (Y) turun sebesar 0.645%.
3. Jika segala terjadi penambahan aktivitas GWM sebesar 1 persen (%) maka INF (Y) naik sebesar 0.514%.

1. Tes Goodnes Of fit

a. Uji-t (Uji Hipotesis Parsial)

Uji statistik dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap dependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Taraf signifikan yang digunakan adalah 5%. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari taraf kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternative, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

Kriteria pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta = 0$ tidak ada pengaruh signifikan secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_0 : \beta \neq 0$ ada pengaruh signifikan secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.

Nilai t hitung akan dibandingkan dengan t tabel.

Kriteria pengambilan keputusan untuk uji parsial adalah sebagai berikut :

H_0 diterima jika $- t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ dan prob sig $> 0,05$

H_0 ditolak (H_a diterima) jika $t_{hitung} < - t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ dan prob sig $< 0,05$.

Tabel 4.18 : Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.667	7.729		3.192	.015
	Cgdp	-.645	.159	-.828	-4.052	.005
	Gwm	.514	.737	.142	.697	.508
b. Dependent Variable: inf						

- a. Nilai t hitung CGDP $4.052 > 1,895$ ($n-k = 10 - 3 = 7$ $\alpha 5\%$) kemudian nilai sig $0.005 < 0,05$, sehingga H_a diterima dan H_o di tolak, artinya CGDP negatif signifikan mempengaruhi INF.
- b. Nilai t hitung GWM $0.697 < 1,895$ ($n-k = 10 - 3 = 7$ $\alpha 5\%$) kemudian nilai sig $0.508 > 0,05$, sehingga H_a ditolak dan H_o diterima, artinya GWM positif tidak signifikan mempengaruhi INF.

b. Uji F (Uji Hipotesis Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% ($\alpha = 5\%$). Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar dari pada nilai F maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Model hipotesis yang di gunakan uji F ini adalah :

$H_o : \beta_1, \beta_2 = 0$. Tdak ada pengaruh signifikan secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat

$H_0 : \beta_1, \beta_2 \neq 0$. Ada pengaruh signifikan secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Nilai F hitung akan di bandingkan dengan nilai F tabel.

Kriteria pengambilan keputusannya adalah :

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ dengan prob sig $> 0,05$

H_0 ditolak (H_a diterima) jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ dan prob sig $> 0,05$

Hasil F statistik atau F hitung sebesar $8.47 > f_{tabel} 4,75$ pada $\alpha = 5\%$

$df = a (k-1), (n-k)$

atau $0,05 (3-1), (10-3)$, k banyaknya variabel, n jumlah sampel $0,05 (2), (7)$

maka $F_{tabel} = 4,74$.

Tabel 4.19 : Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	88.416	2	44.208	8.478	.013 ^b
	Residual	36.500	7	5.214		
	Total	124.916	9			
a. Dependent Variable: inf						
b. Predictors: (Constant), gwm, cgdp						

Hasil pengujian F menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya hipotesis yang menyatakan CGDP dan GWM secara simultan (Bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap INF. Di terima konsisten dengan variasi pergerakan nilai dari INF atau perubahan dari nilai n_1 ke n_2 dan seterusnya, untuk CGDP, GWM dan INF memiliki arah yang positif dan konsisten.

c. Uji D (Uji Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin besar nilai koefisien determinasinya maka semakin besar variasi variabel independennya (variabel bebas) mempengaruhi variabel dependen (variabel terikat).

Tabel 4.20 : Uji D

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.841 ^a	.708	.624	2.28348
a. Predictors: (Constant), gwm, cgdp				
b. Dependent Variable: inf				

Nilai *Adjusted R Square* atau koefisien determinasi sebesar 0.624 menunjukkan bahwa, artinya CGDP dan GWM mampu menjelaskan INF sebesar 62.4%, sedangkan sisanya 37,6% INF dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian.

3. Interpretasi Panel ALDR

Analisis panel dengan *Auto Regressive Distributin Lag (ARDL)* menguji data pooled yaitu gabungan data cross section (negara) dengan data time series (tahunan), hasil panel ARDL lebih baik dibandingkan dengan panel biasa, karena mampu terkointegrasi jangka panjang dan memiliki distribusi lag yang paling sesuai dengan teori, dengan menggunakan software Eviews 10, maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.21 : Output Panel ALDR

Dependent Variable: D(INF)
 Method: ARDL
 Date: 07/23/20 Time: 19:30
 Sample: 2010 2018
 Included observations: 45
 Maximum dependent lags: 1 (Automatic selection)
 Model selection method: Akaike info criterion (AIC)
 Dynamic regressors (1 lag, automatic): ATM CGDP GWM
 Fixed regressors: C
 Number of models evaluated: 1
 Selected Model: ARDL(1, 1, 1, 1)
 Note: final equation sample is larger than selection sample

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
Long Run Equation				
ATM	-0.001302	0.029425	-0.044254	0.9651
CGDP	-0.164864	0.019946	-8.265563	0.0000
GWM	-0.010253	0.098380	-0.104216	0.9179
Short Run Equation				
COINTEQ01	-0.927835	0.169595	-5.470884	0.0000
D(ATM)	0.329891	0.623748	0.528886	0.6022
D(CGDP)	-0.659442	0.485740	-1.357603	0.1884
D(GWM)	1.060750	0.547472	1.937541	0.0656
C	13.51591	3.927046	3.441749	0.0023
Mean dependent var	0.962222	S.D. dependent var	7.498645	
S.E. of regression	2.847289	Akaike info criterion	3.484893	
Sum squared resid	178.3552	Schwarz criterion	4.555626	
Log likelihood	-59.12234	Hannan-Quinn criter.	3.892635	

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection.

Model Panel ARDL yang diterima adalah model yang memiliki lag terkointegrasi, dimana asumsi utamanya adalah nilai coefficient memiliki slope negatif dengan tingkat signifikan 5%. Syarat Model Panel ARDL : nilainya positif (-0,92) dan signifikan ($0,00 < 0,05$) maka model diterima. Berdasarkan penerimaan model, maka analisis data dilakukan dengan panel per negara.

a. Hasil Uji Panel Negara Indonesia

Tabel 4.22 : Output Panel Indonesia

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob. *
COINTEQ01	-0.881313	0.011860	-74.30744	0.0000
D(ATM)	-0.117635	0.002112	-55.69866	0.0000
D(CGDP)	0.145195	0.048909	2.968671	0.0591
D(GWM)	2.650942	0.127039	20.86714	0.0002
C	10.16342	5.632039	1.804572	0.1689

Hasil. Uji Panel menunjukkan :

1). ATM

ATM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap INF karena hal ini dilihat dari probabilitas sig $0.00 < 0.05$. Dimana jika terjadi kenaikan Jumlah Pengguna ATM sebesar 100.000/orang dewasa maka akan menurunkan INF sebesar 0.0117635% pada negara Indonesia.

2). CGDP

CGDP tidak berpengaruh signifikan mempengaruhi INF. Hal ini dilihat dari probabilitas sig $0.06 > 0.05$.

3). GWM

GWM berpengaruh positif dan signifikan terhadap INF karena hal ini dilihat dari probabilitas sig $0.00 < 0.05$. Dimana jika terjadi kenaikan

GWM 1% maka akan menaikkan INF sebesar 2.650942% pada negara Indonesia.

b. Hasil Uji Panel Negara Iran

Tabel 4.23 : Output Panel Iran

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob. *
COINTEQ01	-0.969563	0.016561	-58.54613	0.0000
D(ATM)	2.612299	0.404002	6.466063	0.0075
D(CGDP)	-2.402832	0.168284	-14.27846	0.0007
D(GWM)	1.818206	0.606139	2.999650	0.0577
C	14.13702	31.23816	0.452556	0.6816

Hasil. Uji Panel menunjukkan :

1). ATM

ATM berpengaruh positif dan signifikan terhadap INF karena hal ini dilihat dari probabilitas sig $0.0075 < 0.05$. Dimana jika terjadi kenaikan Jumlah Pengguna ATM sebesar 100.000/orang dewasa maka akan menaikkan INF sebesar 2.612299% pada negara Iran.

2). CGDP

CGDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap INF karena hal ini dilihat dari probabilitas sig $0.0007 < 0.05$. Dimana jika terjadi kenaikan CGDP 1% maka akan menurunkan INF sebesar -2.402832% pada negara Iran.

4). GWM

GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap INF karena hal ini dilihat dari probabilitas sig $0.0577 > 0.05$.

c. Hasil Uji Panel Negara Malaysia

Tabel 4.24: Output Panel Malaysia

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob. *
COINTEQ01	-1.271216	0.003199	-397.3713	0.0000
D(ATM)	-0.257646	0.009506	-27.10395	0.0001
D(CGDP)	-0.216867	0.001966	-110.3012	0.0000
D(GWM)	0.996064	0.021419	46.50277	0.0000
C	27.59273	16.91499	1.631259	0.2013

Hasil. Uji Panel menunjukkan :

1). ATM

ATM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap INF karena hal ini dilihat dari probabilitas sig $0.0001 < 0.05$. Dimana jika terjadi kenaikan Jumlah Pengguna ATM sebesar 100.000/orang dewasa maka akan menurunkan INF sebesar 0.257646% pada negara Malaysia.

2). CGDP

CGDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap INF karena hal ini dilihat dari probabilitas sig $0.00 < 0.05$. Dimana jika terjadi kenaikan CGDP 1% maka akan menurunkan INF sebesar 0.216867% pada negara Malaysia.

3). GWM

GWM berpengaruh positif dan signifikan terhadap INF karena hal ini dilihat dari probabilitas sig $0.00 < 0.05$. Dimana jika terjadi kenaikan GWM 1% maka akan menaikkan INF sebesar 0.996064% pada negara Malaysia.

d. Hasil Uji Panel Negara Bangladesh

Tabel 4.25 : Outpur Panel Bangladesh

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob. *
COINTEQ01	-0.313506	0.178143	-1.759853	0.1767
D(ATM)	0.496289	0.450225	1.102313	0.3508
D(CGDP)	0.185741	0.064540	2.877942	0.0636
D(GWM)	-0.456179	0.643227	-0.709204	0.5293
C	3.702397	42.17988	0.087776	0.9356

Hasil. Uji Panel menunjukkan :

1). ATM

Jumlah pengguna ATM tidak berpengaruh signifikan terhadap INF karena hal ini dilihat dari probabilitas sig $0.35 > 0.05$.

2). CGDP

CGDP tidak berpengaruh signifikan terhadap INF karena hal ini dilihat dari probabilitas sig $0.063 > 0.05$.

3). GWM

GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap INF karena hal ini dilihat dari probabilitas sig $0.52 > 0.05$.

e. Hasil Uji Panel Negara Nigeria

Tabel 4.26 : Outpur Panel Nigeria

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob. *
COINTEQ01	-1.203578	0.032583	-36.93827	0.0000
D(ATM)	-1.083851	0.891803	-1.215348	0.3112
D(CGDP)	-1.008445	0.186804	-5.398413	0.0125
D(GWM)	0.294716	0.093475	3.152884	0.0512
C	11.98396	8.039454	1.490644	0.2328

Hasil. Uji Panel menunjukkan :

1). ATM

Jumlah pengguna ATM tidak berpengaruh signifikan terhadap INF karena hal ini dilihat dari probabilitas sig $0.31 > 0.05$.

2). CGDP

CGDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap INF karena hal ini dilihat dari probabilitas sig $0.012 < 0.05$. Dimana jika terjadi kenaikan CGDP 1% maka akan menurunkan INF sebesar 1.008445% pada negara Bangladesh.

3). GWM

GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap INF karena hal ini dilihat dari probabilitas sig $0.0512 < 0.05$.

B. Pembahasan :

1. CFA, Regresi Berganda OLS (*Ordinary Least Square*) dan Panel ALDR

a. Pembahasan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA).

Hasil analisa pada CFA menunjukkan bahwa dari tabel KMO and *Bartlett's test*, didapat nilai *Kaiser Mayer Olkim* (KMO) sebesar 0,452 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,5. Nilai ini menandakan data belum valid untuk di analisis lebih lanjut dengan analisis faktor. Nilai uji *Bartlett* sebesar 88,176 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 di bawah 5%. Maka matriks korelasi yang terbentuk dibawah 5%. Maka matriks korelasi yang terbentuk merupakan matriks identitas. Selanjutnya untuk melihat variabel mana yang memiliki nilai *communalities correlation* diatas atau dibawah 0,5 atau diatas 50% dapat dilihat pada tabel *communities* bahwa hasil analisis data menunjukkan semakin besar *communalities* sebuah variabel, berarti semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Tabel *communalities* menunjukkan hasil *extraction* secara individu terdapat tujuh variabel yang memiliki kontribusi yang melebihi 0,5 atau 50% yaitu yaitu ATM, Savinm, Suku Bunga, Credit, CAR, CGDP, dan GWM. Namun kelayakan selanjutnya harus di uji dengan *variance Explained*. Hasil total *variance explained* diketahui hanya ada 2 komponen variabel yang menjadi faktor dalam penelitian ini.

Dari tabel *variance Explained* terlihat bahwa hanya ada 2 faktor yang terbentuk. Karena kedua faktor memiliki nilai total angka *eigenvalues* diatas 1 yaitu sebesar 4,636 untuk faktor satu dan 1,599 untuk faktor ke dua. Sehingga

proses factoring berhenti pada 2 faktor saja yang akan ikut dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya grafik scree plot menunjukkan bahwa dari faktor 1 ke 2 arah grafik menurun dengan cukup tajam, pada factor ke 3 dapat dilihat juga bahwa grafik tersebut masih menurun dan pada factor ke 4 dilihat bahwa grafik kembali meningkat sedikit. Sedangkan dari factor 5 ke 6 dan ke 7 grafik kembali menurun. Dari factor 3 ke 7 sudah dibawah angka 1 dari sumbu Y (*Eigenvalues*). Hal ini menunjukkan bahwa 2 faktor adalah paling bagus untuk meringkas ke 7 variabel tersebut.

Setelah diketahui bahwa dua faktor adalah jumlah yang paling optimal, maka dapat dilihat dalam tabel component matrix menunjukkan distribusi dari tujuh variabel tersebut pada dua faktor yang terbentuk. Lalu dapat dilihat pada tabel component matrix menunjukkan korelasi diatas 0,5 pada faktor 1 adalah variabel ATM, Suku Bunga, Credit, CAR, dan CGDP. Pada faktor 2 yaitu variabel Saving dan GWM. Selanjutnya melakukan faktor rotation terhadap faktor yang terbentuk. Tujuan rotasi untuk memperjelas variabel yang masuk kedalam faktor tertentu. Berdasarkan hasil nilai *component matrix* diketahui bahwa dari tujuh faktor, maka yang layak untuk mempengaruhi pengangguran adalah dua faktor yang berasal dari komponen 1 terbesar yaitu CGDP dan komponen 2 terbesar yaitu GWM. Sehingga model persamaan Regresi Linier Berganda (OLS) dapat dilakukan.

b. Pembahasan Regresi Berganda OLS (*Ordinary Least Square*).

1). Pengaruh CGDP terhadap INF

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CGDP berpengaruh negative dan Signifikan terhadap Inflasi. Hal ini dilihat dari hasil koefisien CGDP pada regresi linier berganda bertanda negative -4.052 dan sig $0.005 < 0.05$. berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 (satu) CGDP terhadap INF. Adanya pengaruh CGDP terhadap Inflasi di Indonesia.

2). Pengaruh GWM terhadap INF

Berdasarkan hasil metode CFA terdapat tujuh variabel yang diteliti, dari hasil metode tersebut terdapat dua variabel yang relevan mempengaruhi INF yaitu : CGDP dan GWM. Kemudian terbentuklah set dimensi baru yaitu Metode Regresi Linier Berganda berdasarkan hasil analisis data pada Uji-T GWM memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0.508 pada tabel (4.10) *coefficients^a* dengan nilai α (derajat signifikansi) 0.05 artinya $0.508 > 0.05$ atau dengan hitungan t hitung $(0.697) < t \text{ tabel } (1.895)$ maka Hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya GWM mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengendalian INF. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Sir, 2011) GWM berpengaruh positif tidak signifikan, Berdasarkan teori, Cadangan Wajib Minimum mempunyai pengaruh negatif terhadap inflasi. Hal ini menggambarkan bahwa dengan penentuan penetapan besaran Cadangan Wajib Minimum yang tepat maka akan berdampak terhadap pengendalian atau penurunan

nilai Inflasi di Indonesia. Perkiraan yang dapat disimpulkan hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai uang (daya beli) pada tiap tahun penelitian, sehingga nilai GWM menjadi tidak konstan.

c. Pembahasan Metode Panel ALDR.

Berdasarkan hasil keseluruhan diketahui bahwa yang signifikan dalam jangka panjang mempengaruhi inflasi di D-8 Negara Berkembang yaitu CGDP sedangkan dalam jangka pendek yaitu CGDP yang mempengaruhi inflasi. Berikut tabel rangkuman hasil panel ardl.

Tabel 4.27 : Rangkuman Panel ARDL

Variabel	Indonesia	Iran	Malaysia	Bangladesh	Nigeria	Short Run	Long Run
ATM	1	1	1				
CGDP		1	1		1	1	
GWM	1		1			1	

Sumber: Data diolah penulis,2020

Berikut rangkuman stabilitas jangka panjang di *D8 Developing countries* atau D-8 Negara Berkembang :



Gambar 4.12 Stabilitas Jangka Waktu Pengendalian Inflasi di negara D-8 Negara Berkembang

Hasil analisis panel ardl membuktikan :

Leading Indicator Efektivitas Negara D-8 Negara Berkembang.

- 1) *Leading indicator* efektivitas **negara Indonesia** dalam mengendalikan inflasi (**Jumlah Pengguna ATM dan GWM**).
- 2) *Leading indicator* efektivitas **negara Iran** dalam mengendalikan inflasi (**Jumlah pengguna ATM, Suku Bunga, dan CGDP**).
- 3) *Leading indicator* efektivitas **negara Malaysia** dalam mengendalikan inflasi (**Jumlah pengguna ATM, CGDP dan GWM**).
- 4) Tidak ada variabel yang menjadi *Leading indicator* efektivitas **negara Bangladesh** dalam mengendalikan inflasi.
- 5) *Leading indicator* efektivitas **negara Nigeria** dalam mengendalikan inflasi (**CGDP**).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab IV, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan CFA dan Regresi Berganda dapat disimpulkan:

- a. Berdasarkan hasil CFA, yang di ketahui dimana terdapat 7 faktor yang di teliti, dari hasil metode tersebut terdapat 2 variabel yang relevan mempengaruhi INF yaitu : CGDP dan GWM.

2. Hasil Regresi Berganda *Ordinary Least Square(OLS)*.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan Regresi Berganda dapat disimpulkan:

- a. CGDP mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap INF. Kesimpulan tersebut di buktikan dari hasil uji t yang di peroleh hasil Nilai t hitung CGDP $4.052 > 1,895$ ($n-k = 10 - 3 = 7$ $\alpha 5\%$) kemudian nilai sig $0.005 < 0,05$, sehingga H_a diterima dan H_o di tolak, artinya CGDP negatif signifikan terhadap INF.

- b. GWM mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap INF. Kesimpulan tersebut di buktikan dari hasil Nilai t hitung GWM $0.697 < 1,895$ ($n-k = 10 - 3 = 7$ $\alpha 5\%$) kemudian nilai sig $0.508 > 0,05$, sehingga H_a ditolak dan H_o diterima, artinya GWM positif tidak signifikan terhadap INF.
- c. Pengaruh CGDP dan GWM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap INF. Hasil tersebut dibuktikan dari hasil uji F dimana di peroleh F tabel sebesar 4,74, sedangkan F hitung di peroleh 8,748. Dapat di simpulkan bahwa $F_{hitung} 8,478 > \text{nilai } F_{tabel} 4,74$ Artinya secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel CGDP (X1) dan GWM (X2) terhadap INF (Y1)

3. Hasil Panel ARDL.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode panel ARDL dapat disimpulkan:

- a. Secara panel Jumlah Pengguna ATM mampu menjadi *leading indicator* pada kelompok negara D-8 Negara Berkembang hanya negara (Indonesia, Iran, dan Malaysia) dalam menjelaskan Pengendalian Inflasi.
- b. Secara panel Rasio Kredit Swasta Dari Deposito Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Terhadap GDP (CGDP) mampu menjadi *leading indicator* pada kelompok negara D-8 Negara Berkembang hanya pada negara Iran dan Malaysia dalam Pengendalian Inflasi

- c. Secara panel Giro Wajib Minimum (GWM) mampu menjadi *leading indicator* pada kelompok negara D-8 Negara Berkembang hanya negara (Indonesia dan Malaysia) dalam Pengendalian Inflasi.
- d. Hanya negara Malaysia yang memiliki pengaruh Fintech, Inklusi Keuangan serta Makroprudensial yang lebih besar dalam menjelaskan inflasi.
- e. Indonesia hanya memiliki pengaruh Fintech dan Makroprudensial yang lebih besar dalam menjelaskan inflasi

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang peneliti sampaikan bagi pihak peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah khususnya pada pemerintah kelompok negara D-8 Negara Berkembang (Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, dan Nigeria) harus lebih memperhatikan kebijakan Makro Prudensial karena kebijakan ini mampu mengendalikan Inklusi keuangan dalam pengendalian tingkat inflasi di negara tersebut.
2. Sebaiknya pemerintah khususnya pada pemerintah kelompok D-8 Negara Berkembang (Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, dan Nigeria) juga harus memperhatikan tingkat FINTECH, dalam hal ini mampu FINTECH mengendalikan inklusi keuangan dan makroprudensial karena mampu memberikan dampak pengendalian tingkat inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, S., Mutandwa, L., & Roux, P. L. (2018). *A Review of Determination of Financial Inclusion*. International Journal of Economics and Financial, VIII(3), 1-8.
- Adriani, D., & Wiksuana, I. B. (2018). *Inklusi Keuangan dalam Hubungan dengan Pertumbuhan UMKM dan tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali*. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol VII No. 12, 6420-6444.
- Afandi, M. A., & A'yun, I. Q. (2018). *The Forecasting of Financial Inclusion in East Java Through Islamic Microfinance Institution : An Autoregressive Integrated Moving Average Approach*. Journal Of Developing Economies, 38-52.
- Alimirruchi, W. (2017). *Analyzing Operational and Financial Performance On The Financial Technology (FINTECH) Firm (Case Study on Samsung Pay)*. Skripsi, 1-25.
- Altunbas, Y., Binici, M., & Gambacorta, L. (2017). *Macroprudential policy and bank risk*. BIS Working Papers, 1-46.
- Amaludin. (2010). *Kebijakan Moneter Investasi Swasta dan Tingkat Output di Indonesia : Suatu Aplikasi Granger Causality Test, Periode 1999-2009*. Cita Ekonomika, IV no. 2, 91-111.
- Anggraeni, R. K., Husaini, A., & Nuzula, N. F. (2014). *Analisis Pengelolaan Kredit Untuk Meningkatkan Likuiditas dan Profitabilitas (Studi Pada PT. BPR Wlingi Pahala Pakto)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), XII No 2, 1-10.
- Ansori, M. (2019). *PERKEMBANGAN DAN DAMPAK FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI JAWA TENGAH*. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, V No 1, 1-15.
- Arif, D. (2014). *PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, JUMLAH UANG BEREDAR, INFLASI*. Jurnal Ekonomi Bisnis, XVIII no 3, 63-77.
- Arnita, V. (2018). *Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan*. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, 4(2), 19-23.
- B.I. (2012, Mei 21). *www.bi.go.id*. Retrieved Agustus 5, 2019, from <https://www.bi.go.id.aspx>: <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/bi-dan-inflasi/contents/penetapan.aspx>
- Babajide, A. A., Adegboye, F. B., & Omankhanlen, A. E. (2015). *Financial Inclusion and Economics Growth in Nigeria*. International Journal of Economics and Financial, V(3), 629-637.

- Basuk, F. H., & Husein, H. (2018). *ANALISIS SWOT FINANCIAL TECHNOLOGY PADA DUNIA PERBANKAN DI KOTA AMBON (Survei Pada Bank di Kota Ambon)*. Jurnal Manis, II, 60-74.
- Bire, A. R., Sauw, M. H., & Maria. (2019). *The Effect Of Financial Literacy towards Financial Inclusion through Financial Training*. International of Social Sciences and Humanities, III No. 1, 186-192.
- Budiyanti, E. (2014). *Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Sektor Industri Manufaktur di Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, V no. 2, 145-159.
- Cahyono, E. F., & Rani, L. N. (2018). *Macroprudential Policy on Sharia Banking Financing The Indonesian Experience*. Shirkah Journal of Economics and Business, III, 153-177.
- Chrismastianto, I. W. (2017). *Analisis Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, XX No.1 , 133-144.
- Chrisna, H. (2019). *PENGARUH PERILAKU BELAJAR, PENGENDALIAN DIRI, MOTIVASI, EMPATI, KETERAMPILAN, DAN KEPERCAYAAN DIRI TERHADAP PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA PRODI AKUNTANSI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 10(1), 87-100.
- Chrisna, H. (2019). *ANALISIS KESIAPAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNPAB DALAM KONVERGENSI IFRS (INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD)*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 7(2), 1-11.
- Chrisna, H. (2018). *ANALISIS MANAJEMEN PERSEDIAAN DALAM MEMAKSIMALKAN PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN PADA PABRIK SEPATU FERRADINI MEDAN*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2), 82-92.
- Cociş, V., & Nucu, A. E. (2013). *Monetary policy and financial stability: empirical evidence from Central and Eastern European countries*. Baltic Journal of Economics, 75-98.
- Daniel, P. A. (2018). *Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi*. Jurnal of Economics and Business, II, 131-136.
- Deviana, N. (2014). *Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI, Suku Bunga Kredit dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi di Indonesia periode tahun 2006-2012*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 81-91.
- Ekonomibisnis.com. (2019, Agustus 28). *ekonomi.bisnis.com*. Retrieved January 11, 2020, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190828/9/1141939/2020-bi-proyeksikan-inflasi-3-persen-plus-minus-1-persen>:

<https://ekonomi.bisnis.com>

Fahmy, O. M., Rustam, M., & Asmayadi, E. (2016). *Pengaruh Keuangan Inklusif Terhadap Kredit yang Disalurkan pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, V, 118 - 135.

Faoriko, A. (2013). *PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR RUPIAH*. Skripsi, 1-127.

- Fauziah, F. (2015). *Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Inflasi di Indonesia*. Signifikan, IV, 83-94.
- Fita Dela, M. W. (2018). *PENERAPAN GIRO WAJIB MINIMUM YANG DITETAPKAN BANK INDONESIA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*. Skripsi Minor, 1-74.
- Gede, D. N., Sudirman, I. W., & Budhiasa, G. S. (2012). *Dampak Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan ROA Industri Perbankan studi kasus pada PT. Bank Sinar Harapan bali*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud) Bali Indonesia, 431-446.
- Ilham, N., & Siregar, H. (2007). Dampak Kebijakan Harga Pangan dan Kebijakan Moneter terhadap Stabilitas Ekonomi Makro. *Jurnal Agro Ekonomi*, XXV no. 1, 55-83.
- Irmawati, S., Damelia, D., & Puspita, D. W. (2013). *MODEL INKLUSI KEUANGAN PADA UMKM BERBASIS PEDESAAN*. Journal of Economics and Policy, 103-213.
- Juoro, U. (2013). *Model Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Terbuka untuk Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 81-97.
- katadata. (2019, September 19). *katadata.co.id*. Retrieved January 11, 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2019/09/19/inflasi-dan-rupee-stabil-bi-diprediksi-pangkas-lagi-bunga-acuan>: <http://katadata.co.id>
- Kay, V. P. (2015). *Tabungan dan Variabel Ekonomi Makro yang Mempengaruhinya di Kota Ambon*. Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi, IX No. 1, 1-105.
- Kemenkeu. (2016). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF*. Peraturan Presiden , 1-45.
- Kennedy, P. J. (2017). *Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dan Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya*. Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI), VI, 171-182.
- Kim, Y., Choi, J., Ju Park, Y., & Yeon, J. (2016). *The Adoption of Mobile Payment Services for "Fintech"*. International Journal of Applied Engineering Research, XI, 1058-1061.
- Lakmana, K. R., & Suryadhana, N. A. (2018). *Dampak Pertumbuhan Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia*. Universitas Mahendradatta, Denpasar, 20-36.

- Luckandi, D. (2018). *Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan Fintech Pada UMKM di Indonesia: Pendekatan Adaptive Structuration Theory*. Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, 1-98.
- Meyliana, Fernando, E., & Surjandy. (2019). *The Influence of Perceived Risk and Trust in Adoption of FinTech Services in Indonesia*. CommIT (Communication & Information Technology) Journa, 31-37.
- Mohamed, I. A. (2016). *The Impacts of Monetary Policies on Inflation Rates in Sudan (1970-2014)*. International Journal of Advance Research in Management, Engineering and Technology, I issue 1, 75-81.
- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Nasution, A. P. (2019). IMPLEMENTASI E-BUDGETING SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN TRANPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government. In *International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah-Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 101-114.
- Nasution, H., Nasution, Y., & Yafiz, M. (2017). *ANALISIS FINANCIAL INCLUSION TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI MEDAN (STUDI KASUS PEMBIAYAAN MIKRO SS II DI BANK SUMUT SYARIAH)*.j- Ebis Jurnal Ekonomi dan Bisnis, II No 1, 1-20.
- Nasution, L. N., & Dwilita, H. (2016). *Keuangan Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi SUMUT*. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, II No. 3, 94-101.

- Novianty. (2017). *ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI*. Skripsi, 1-11.
- Nugroho, A., & Purwanti, Y. E. (2014). Determinan Inklusi Keuangan di Indonesia (Global Findex 2014). *Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, 1-13.
- Nuryana, I. (2017). *Aessment On Macroprudential Instrument Effectivity In Reducing Banking Credit Risk In Indonesia (A Study On Go Public Banking 2012-2015 period)*. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Vol 5 no 1 April 2017*, 55-68.
- Pantangan, A. E. (2017). *Analisis Pengaruh Kebijakan Makroprudensial, Kebijakan Moneter dan Indikator Makroekonomi terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia tahun 2006:Q1 =2016:Q4*. Skripsi, 1-15.
- Piliyanti, I. (2018). *Fintech Achieving Sustainable Development The Side Perspective of Crowdfunding Platform*. *Shirkah Journal of Economics and Business*, III, 223-242.
- Purba, D. (2011). *PENGARUH KECUKUPAN MODAL, LIKUIDITAS DAN EFISIENSI OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA*, Tbk. Skripsi, 1-113.
- Purba, R. B. (2018). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Riduwan, & Wahyudi, R. (2017). *Contribution of Macroprudential Policy of Central Bank On Microprudential Islamic Banking*. *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, XI, 291-308.
- Rizkina, M. (2019). *Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating*. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 80-94.
- Rompas, W. F. (2018). *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Permintaan Kredit pada Perbankan*. *Jurnal Berkalah Ilmiah Efisiensi*, XVIII No 2, 204-215.
- Rusdianasari, F. (2018). *Peran Inklusi Keuangan melalui Integrasi Fintech dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia*. *JURNAL EKONOMI KUANTITATIF TERAPAN*, XI, 244-253.
- Rusiadi, & Novalina, A. (2015). *Efektifitas Penerapan Inflation Targeting Framework (ITF) dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, VI no 1, 1-9.

- Sakti, M. R., Thaker, H. M., Qoyum, A., & Qizam, I. (2018). *The Concept and Practice of Macroprudential Policy in Indonesia : Islamic and Conventional*. Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics), X No. 1, 75-96.
- Saksonova, S., & Merlino, I. K. (2017). *Fintech as Financial Innovation – The Possibilities and Problems of Implementation*. European Research Studies Journal, XX, 961-973 .
- Sanistasya, P. A., Rahardjo, K., & Iqbal, M. (2019). *Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur*. jurnal Economia, XV, 48-59.
- Saputra, F. (2012). *Pengelolaan Produk Tabungan Pada PT. BPR Cincin Permata Andalas Padang*. Tugas Akhir, 1-64.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 110-120.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Satria, D. (2012). *Analisis dampak inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. ResearchGate, 1-23.
- Seprilina, L., Maskie, G., & Kusaini, M. (2016, April). *Analisis Respon Kebijakan Moneter dan Kebijakan Makroprudensial dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Kredit di Indonesia* . International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG), Vol II no 1, 1-12.
- Setiawan, A. (2012). *Inflation Targeting Framework dan Perubahan Respon Kebijakan Moneter*. Jurnal BPPK Volume 5 , V, 65-76.
- Simatupang, S. A. (2017). *Analisis dampak Bauran kebijakan Makroprudensial, Inflation Targeting dan Kebijakan Fiskal terhadap Siklus Keuangan Indonesia dalam sistem Kurs Mengambang*. Skripsi, 1-31.
- Siravati, S. A. (2017). *Dampak Kebijakan Loan To Value dan Variabel Makroekonomi terhadap Permintaan Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah*. Skripsi, 1-126.
- Sir, Y. A. (2011). *PENGARUH CADANGAN WAJIB MINIMUM DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP INFLASI DI INDONESIA*. JEJAK, 82-89.
- Soelistyo, A., & Wicaksono, N. A. (2019). *Econometry Model of the Impact of Macroprudential Policy on Poverty in Indonesia*. Kne Social Sciences,

1152-1171.

- Sujlana, P., & Kiran, C. (2018). *A Study on Status of Financial in India*. International Journal of Management Studies, V, 96-104.
- Suseno, & Astiyah, S. (2009, Maret). *Inflasi*. Seri kebanksetralan Bank Indonesia, 1-57.
- Sutawijaya, A., & Zulfahmi. (2012). *PENGARUH FAKTOR-FAKTOR EKONOMI TERHADAP*. Jurnal Organisasi dan Manajemen, VIII no 2, 85-101.
- Wulansari, N., Wahyu, & Kurniawan, Y. (2017). *Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi melalui Sinergi UMKM dan Good governance di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis, 262-268.
- Yasid, M. (2009, Juli). *Perilaku Menabung Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin Peserta Program Ikhtiar Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok Di Bogor, Jawa Barat*. TAZKIA Islamic Finance & Business Review, IV No. 1, 90-100.
- Yoel, E. M. (2016). *Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap Siklus Kredit : Sebuah Studi Kasus atas Penggunaan Instrumen Car dan GWM Perbankan Indonesia 2006-2013*. Bina Ekonomi, XX no.1, 77-96.
- Yunus, R. N. (2018). ANALISIS PENGARUH BAHASA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI JURUSAN AKUNTANSI. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(1), 13-20.
- Yunus, R. N. (2019). KEMAMPUAN MENULIS ARGUMENTASI DALAM LATAR BELAKANG SKRIPSI MAHASISWA MANAJEMEN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI. JUMANT, 11(1), 207-216. Yunus, R. N. (2019). KEMAMPUAN MENULIS ARGUMENTASI DALAM LATAR BELAKANG SKRIPSI MAHASISWA MANAJEMEN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI. JUMANT, 11(1), 207-216.v